



SESKOAD

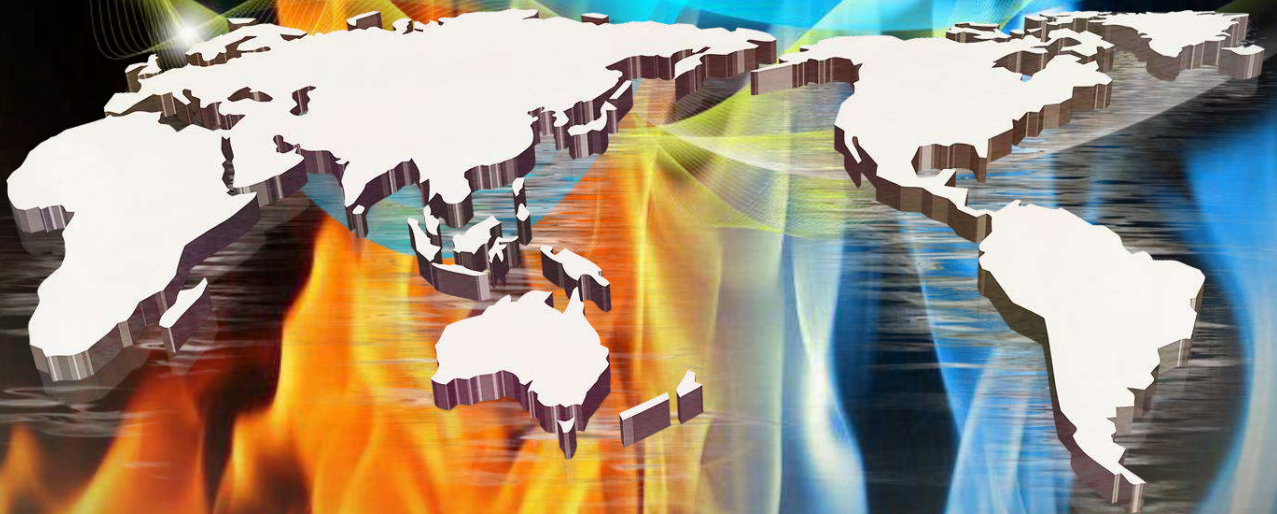
Terbaik, Terhormat dan Disegani



BULETIN VIRAJATI

MEDIA KOMUNIKASI ONLINE SESKOAD
Edisi XIV November 2021

NEGOSIASI & DIPLOMASI



ISSN 2086-9312



9772086931295

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, Buletin Virajati Seskoad Online edisi XIV bulan November 2021 kembali hadir dihadapan para pembaca dengan menyajikan berbagai informasi pilihan menarik dan bermanfaat.

Pada kesempatan edisi kali ini, Buletin Virajati Seskoad mengangkat tajuk **"Negosiasi dan Diplomasi"**. Tema ini diangkat merupakan salah satu upaya Seskoad sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan kualitas SDM bagi perwira siswa yang merupakan calon pemimpin TNI/TNI AD ke depan dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategi dunia, saat ini.

Selain mengulas materi utama, dalam buletin edisi kali ini juga menyajikan sejumlah tulisan penting dan menarik, yakni Peran diplomasi pertahanan negara maroko dalam konflik maroko–sahara barat, Peran diplomasi dan negoisasi terhadap pencegahan konflik Myanmar dan Perang saudara Libanon dalam diplomasi pertahanan negara serta beberapa informasi menarik lainnya.

Kami berharap berbagai tulisan yang disajikan bermanfaat bagi prajurit TNI AD dan kalangan masyarakat luas, menjadi bacaan literasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna memberikan sumbangsih untuk masyarakat, bangsa dan negara. Demi peningkatan kualitas Buletin Seskoad kedepan, saran masukan pembaca kami nantikan.

Redaksi

BULETIN VIRAJATI

Pelindung

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS, M.A.

Pembina

Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si,

Penasihat

Brigjen TNI Dwi Endrosasongko, S.Sos.

Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Drs. Paiman

Wakil Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Roy H.J. Sinaga, S.Sos.

Redaktur Pelaksana

Kolonel Chb Muhamad Mukson

Kolonel Inf Singgih Pambudi Arianto, S.I.P., M.M.

Sekretaris Redaksi

Mayor Chb Untung

Staf Redaksi

Mayor Inf Gede Agus Dian Pringgana, S.Sos., MMAS.

Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, S.E., MMAS.

Mayor Kav Barid Budi Susila, S.Sos.

Reporter

Letda Inf Asmadi

Fotografer

Serma Winarna

Desain Grafis

Sertu Faizal Ridho Ilhami

Penata Muda/III-A Rendra Boyke, S.Pd., M.Pd.

Alamat Redaksi

Seskoad Jl. Jend. Gatot Subroto 96 Bdg

Alamat Email

buletinvirajati@gmail.com

Website

<http://www.seskoad.mil.id>

Facebook

<https://www.facebook.com/Buletinvirajati>

Instagram

<https://www.instagram.com/Buletinvirajati>

Disclaimer :

- Semua hasil karya yang dimuat dalam "Jurnal Virajati" adalah menjadi hak cipta <http://www.seskoad.mil.id>.
- Tulisan dalam "Jurnal Virajati" merupakan buah pemikiran dan menjadi tanggung jawab penulis, serta tidak merepresentasikan pandangan organisasi Seskoad.
- Ide dan gagasan berbentuk tulisan essay dapat disampaikan kepada redaksi melalui email Redaksi

NEGOSIASI & DIPLOMASI

DAFTAR ISI

PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN NEGARA MAROKO
DALAM KONFLIK MAROKO-SAHARA BARAT

Letkol Inf Sukijan, S.Ag., M.H.

4

DIPLOMASI DAN NEGOSIASI MESIR DALAM
UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN ISRAEL

Mayor Inf Dian Aksmiyandita

37

PERAN DIPLOMASI DAN NEGOSIASI
TERHADAP PENCEGAHAN KONFLIK MYANMAR

Mayor Kav Suprpto S.Ag.

11

PRO MUNDI BENEFICIO
PERSPEKTIF PANAMA

Letkol Inf Drs. Jasaruddin

43

PERANG SAUDARA LIBANON DALAM
DIPLOMASI PERTAHANAN NEGARA

Letkol Inf Irfan Sugiharto, S.Sos.

18

DIPLOMASI MALAYSIA MELAWAN INDONESIA DALAM
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN
WILAYAH PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN

Letnan Kolonel Czi Ketut Sudirta

48

UPAYA DIPLOMASI REPUBLIK RAKYAT CHINA (RRC)
DALAM RANGKA MENJALIN HUBUNGAN DIPLOMATIK
DENGAN AMERIKA SERIKAT PADA MASA PERANG DINGIN

Kompol Indra Ranudikarta, S.I.K., M.Si.

25

PERTEMPURAN CARACAS :
KAJIAN PERTEMPURAN KEMERDEKAAN VENEZUELA

Kompol A. Mukti Surya A. S., S.H., S.I.K., M.Si.

54

DIPLOMASI PERTAHANAN NEGARA
REPUBLIK MALI DALAM PENERAPAN
PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAHNYA

Letkol Inf Irianto H. Pasaribu

30

TINJAUAN DIPLOMASI PERTAHANAN TERHADAP
UPAYA MONAKO MEMISAHKAN DIRI DARI
PERANCIS

Mayor Czi Sigit Adi Soebekti, S.T.

59



PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN NEGARA MAROKO DALAM KONFLIK MAROKO – SAHARA BARAT

Letkol Inf Sukijan, S.Ag., M.H.

© picture-alliance/dpa/epa/K. Försterling

Pendahuluan

Pertikaian suatu pihak dengan pihak lain atau suatu negara dengan negaranya sendiri maupun dengan negara lain seringkali berupa konflik wilayah. Bentuk-bentuk dari konflik wilayah sendiri beragam seperti sengketa batas wilayah, tindakan penempatan atau pemanfaatan sumber daya wilayah lain secara ilegal, dan tindakan separatisme. Konflik wilayah merupakan salah satu konflik yang paling sering terjadi bahkan sejak berabad-abad lalu. Salah satu konflik wilayah yang belum terselesaikan hingga kini adalah konflik wilayah antara Maroko dan Front Polisario (Sahara Barat).

Titik-titik kemunculan konflik wilayah ini mulai terlihat saat Maroko merdeka dari penjajahan Prancis yakni sekitar tahun 1956 yang kemudian terus berkembang hingga 1975 ketika Sahara Barat lepas dari Spanyol. Konflik ini terjadi akibat adanya klaim sejarah terkait Kerajaan Maroko yang luas wilayahnya sebelum mengalami penjajahan dan perpecahan meliputi wilayah negara Maroko saat ini hingga wilayah Sahara Barat. Wilayah Sahara Barat diakui sebagai bagian dari wilayah Maroko yang kemudian menurut Front Polisario (Sahara Barat) merupakan tindakan penjajahan baru karena mereka telah menjadi negara yang berdaulat selepas penjajahan dari Spanyol.

Berbagai upaya penyelesaian konflik telah dilakukan namun kenyataannya hingga saat ini masih belum menemukan hasil yang baik bahkan beberapa diantaranya mengalami kegagalan. Pihak yang terlibat dalam konflik wilayah ini adalah pemerintahan Maroko dan Front Polisario (Republik Demokratik Arab Sahrawi) yang memiliki klaim atas wilayah Sahara Barat pasca penjajahan Spanyol.

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik wilayah Maroko dan Sahara Barat harus segera diidentifikasi dan dianalisa sehingga tidak menimbulkan konflik yang berulang pada masa depan. Menurut teori MPP (metode pemecahan persoalan) dalam rangka memecahkan suatu masalah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali masalah serta menetapkan tujuan pemecahannya. Hal ini diawali dengan mencari/mengidentifikasi tentang pokok permasalahannya.

Setidaknya ada beberapa persoalan yang dapat kita identifikasi, antara lain sebagai berikut :

Pertama, Latar belakang terjadinya konflik Maroko – Sahara Barat. **Kedua**, Langkah-langkah strategis diplomasi pertahanan (soft power) yang digunakan oleh negara tersebut. **Ketiga**, solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan negara tersebut dari perspektif komunikasi persuasif.

Dari uraian permasalahan di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu **"Bagaimanakah Peran Diplomasi Pertahanan dalam Konflik Maroko – Sahara Barat"**. Agar cara berfikir Penulis dapat dipahami secara baik oleh pembaca maka penulis berusaha memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, proses pelaksanaan diplomasi pertahanan dalam konflik Maroko – Sahara Barat yang dibantu dengan referensi-referensi yang ada serta menganalisisnya melalui metode penulisan deskriptif analisis dan studi kepustakaan.

Nilai guna dari tulisan ini adalah untuk memberikan manfaat bagi pembaca dalam menerapkan diplomasi pertahanan dihadapkan dengan penugasan di masa depan, sedangkan maksud penulisan ini untuk memberikan gambaran kepada Komando Atas tentang pelaksanaan negosiasi dan diplomasi yang telah dilaksanakan oleh kedua negara untuk mencegah terjadinya konflik Maroko – Sahara Barat. Tujuan penulisan adalah untuk memberikan bahan masukan sumbangan pemikiran dan pertimbangan Komando Atas untuk dapat mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang studi negosiasi dan diplomasi. Ruang lingkup penulisan mencakup pendahuluan, pembahasan dan penutup dengan dibatasi pelaksanaan konflik Maroko-Sahara Barat.

Pembahasan

Setelah mengidentifikasi permasalahan dan menemukannya, maka menurut teori MPP langkah selanjutnya adalah mempersempit permasalahan sampai ke tingkat yang dapat diteliti oleh Penulis. Penyempitan masalah pada latar belakang pelaksanaan diplomasi dan negosiasi dalam konflik Maroko – Sahara Barat dan langkah-langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi dan negosiasi tersebut sehingga perlu dilakukan analisa dengan cara menggali lebih dalam tentang hal tersebut. Disini Penulis menggunakan teori Kerlinger (1986) sehingga ditemukan inti permasalahan yang harus dipecahkan yaitu Peran Diplomasi dan Negosiasi yang telah dilaksanakan untuk penyelesaian Konflik Maroko-Sahara Barat.

Sesuai dengan metoda MPP, maka setiap permasalahan tersebut harus dihilangkan.

Latar Belakang Konflik Maroko – Sahara Barat

Sebelum bangsa Eropa masuk ke Afrika dan melakukan penjajahan, Maroko dan Sahara Barat bernaung dalam satu pemerintahan yang sama yakni dalam Kerajaan Maroko. Kerajaan ini pernah melakukan perjanjian terkait pembangunan *trading station* di sisi selatan Kerajaan Maroko dengan Inggris dan Spanyol yang secara tidak langsung memuat pernyataan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari Kerajaan Maroko. Prancis dan Inggris juga pernah melakukan perjanjian yang mengakui wilayah selatan Kerajaan Maroko merupakan bagian resmi dari kerajaan dan memberikan wewenang kepada Prancis untuk mengurus wilayah tersebut.³ Namun, ketika Prancis dan Spanyol terlibat konflik yang membuat kedua belah pihak harus membagi kawasan jajahan, Kerajaan Maroko adalah salah satu yang terkena imbasnya. Kerajaan Maroko terbelah, Prancis menguasai wilayah Maroko bagian utara dan Spanyol menguasai wilayah Maroko bagian selatan yang kemudian menjadi Sahara Barat.



Peta wilayah Maroko-Sahara Barat

Maroko bagian utara akhirnya mampu merdeka pada tahun 1956 dan mendeklarasikan negara berdaulat bernama Maroko. Setelah merdeka, Maroko mulai memperjuangkan integritas wilayahnya dengan memaksa Spanyol untuk mengembalikan wilayah yang mereka kuasai kepada Maroko.

Sementara itu, penduduk Sahara Barat mulai membentuk gerakan kemerdekaan bernama *Front Polisario* untuk melawan penjajahan Spanyol dan mendirikan negara berdaulat. Perjuangan Maroko untuk menyatukan kembali wilayahnya dimulai dengan memaksa Spanyol menandatangani perjanjian *Angra de Cintra* yang membolehkan Maroko untuk mengambil kembali beberapa daerah di wilayah selatan Kerajaan Maroko (Kasraoui, 2017). Tidak hanya itu, Maroko juga meminta Persatuan Bangsa-bangsa untuk memuat isu Sahara Barat dalam pembicaraan terkait dekolonisasi. Maroko mendorong Persatuan Bangsa-bangsa untuk memaksa Spanyol keluar dari wilayah Sahara Barat. Ditengah proses dekolonisasi, tentara Maroko melakukan aksi konfrontasi dengan *Front Polisario*. Maroko juga melakukan aksi protes bernama '*Green March*' ke wilayah Sahara Barat untuk menekan Spanyol (SC Report, 2019). Akhirnya, Spanyol membuat perjanjian Madrid dan menyerahkan wilayah Sahara Barat kepada Maroko dan Mauritania.



Pasukan Maroko di wilayah perbatasan Sahara Barat 4 November 1964

Sesaat setelah kepergian Spanyol dari Sahara Barat, Maroko melakukan aneksasi terhadap wilayah tersebut. Namun, disaat yang bersamaan *Front Polisario* juga mendeklarasikan pembentukan negara baru bernama Republik Demokratik Arab Sahrawi. Konflik wilayah pun pecah diantara Maroko, *Front Polisario*, dan Mauritania. Pada 1979, Mauritania menyatakan untuk keluar dari konflik dan melakukan perjanjian penyerahan wilayah kepada *Front Polisario* (SC Report, 2019). Namun, wilayah yang diserahkan oleh Mauritania juga dianeksasi oleh Maroko.

Pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam konflik ini Aljazair yang memberikan sokongan senjata dan pengungsian bagi *Front Polisario*. Meskipun begitu, konflik wilayah ini tetaplah antara Maroko dan *Front Polisario*. Setelah proses panjang oleh Persatuan Bangsa-bangsa, organisasi ini akhirnya mengeluarkan misi perdamaian khusus bernama *UN Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO)*, dari misi ini kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan gencatan senjata pada tahun 1991 dan *MINURSO* menjanjikan untuk memfasilitasi referendum bagi penduduk Sahara Barat (SC Report, 2019). Selagi konflik mereda diantara Maroko dan *Front Polisario*, Persatuan Bangsa-bangsa terus mengupayakan penyelesaian masalah melalui metode dialog dan negosiasi seperti *Baker's Plan I dan II*, *Rountable Meeting on Western Sahara*.



Peta Sahara Barat yang menampilkan wilayah kekuasaan Maroko (kuning) & wilayah kekuasaan Polisario (merah)

Langkah-langkah Strategis Diplomasi Pertahanan

Sejak 50 tahun penduduk Sahara Barat menantikan referendum seperti yang dituntut PBB. Ketika Spanyol mengakhiri pendudukan pada 1976, harapan kemerdekaan sempat merayap di udara, sebelum menguap cepat, ketika Maroko mengajukan klaim teritorial atas Sahara Barat dan menduduki duapertiga wilayah.

“Pembukaan kantor konsulat sejumlah negara di kawasan yang diduduki Maroko menjadi bukti fisik atas klaim teritorial Rabat”, kata Alex Vines, Direktur Program Afrika di Chatham House, sebuah lembaga tangki pemikir di Inggris.

Keberadaan kantor perwakilan asing merupakan sebuah pengakuan resmi atas kedaulatan Maroko. Strategi Maroko mem-buahkan hasil sejumlah negara ber-kepentingan secara ekonomi dengan mem-bantu klaim Maroko, seperti Burundi dan Sao Tome. Adapun negara lain sebaliknya merawat hubungan historis dengan kerajaan di Rabat. “Perkembangan politik ini adalah bagian dari strategi pemerintah Maroko. Mereka ingin memperlemah Aljazair dan juga posisi Uni Afrika yang menginginkan kawasan otonomi di Sahara Barat. Maroko menarik diri dari Organisasi Uni Afrika (OAU) pada 1984 sebagai protes atas diterimanya Sahara Barat sebagai anggota organisasi. Baru pada 2017 Rabat kembali bergabung ke dalam organisasi yang kini bernama Uni Afrika. Sejak itu Maroko melancarkan kampanye diplomasi untuk membetoni klaimnya atas Sahara Barat. Hal itu antara lain dicapai dengan menempat-kan perairan Sahara Barat ke dalam kawasan teritorial Maroko. Undang-undang terkait sudah disahkan oleh parlemen di Rabat Januari silam.

Maroko menentang keras keinginan Front Polisario untuk mengadakan referendum. Selain itu, Maroko juga mengecam tindakan Aljazair yang memberikan bantuan senjata dan membiayai gerakan yang dianggap oleh Maroko separatis tersebut. Keinginan Maroko untuk menyatukan kembali wilayah yang terpisah akibat penjajahan bangsa Eropa membuat Maroko berupaya dengan keras untuk mengembalikan wilayah Sahara Barat ke dalam kedaulatannya. Isu penyatuan Sahara Barat dijadikan sebagai salah satu isu prioritas bagi Maroko. Hal ini dibuktikan dengan adanya badan khusus dalam pemerintahan yang mengurus isu ini. Badan khusus ini bernama Dewan Penasihat Kerajaan untuk Urusan Sahara (CORCAS). Maroko memberikan tawaran penyelesaian konflik kepada Front Polisario yaitu menjadikan wilayah Sahara Barat sebagai wilayah Maroko yang memiliki

otonomi khusus (SC Report, 2019). Maroko tidak menginginkan adanya referendum bagi warga Sahrawi dikarenakan permasalahan wilayah ini merupakan isu yang berkaitan dengan integritas dan stabilitas negara. Maroko meyakini wilayah Sahara Barat ter-masuk dalam kedaulatan Maroko dikarenakan bukti sejarah yang kuat termasuk perjanjian-perjanjian yang pernah disepakati oleh Maroko dan bangsa Eropa.

Konflik wilayah antara Maroko dan *Front Polisario* telah melalui beberapa upaya penyelesaian konflik yang diusahakan oleh Persatuan Bangsa-bangsa melalui *UN Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO)*. Tahap pertama menuju resolusi konflik yang berhasil diwujudkan oleh Persatuan Bangsa-bangsa adalah penghentian gencatan senjata yang disepakati oleh Maroko dan Front Polisario.

Kemudian MINURSO melakukan beberapa upaya penyelesaian konflik lanjutan bernama *Baker’s Plan I dan II, Roundtable Meeting on Western Sahara*. Misi Persatuan Bangsa-bangsa adalah untuk membantu mengatur referendum bagi warga Sahrawi apakah mereka akan memilih untuk merdeka atau bersatu dengan Maroko.

Resolusi pertama yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa-bangsa adalah melalui dialog damai bernama *Baker’s Plan I*. Dialog damai ini diatur oleh Utusan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa bernama James Baker. Melalui dialog ini, Baker mengajukan sebuah Framework Agreement yang berisikan usulan mengenai referendum (SC Report, 2019).

Usulan yang ditawarkan adalah Persatuan Bangsa-bangsa akan mengadakan atau memfasilitasi referendum dengan melakukan pemungutan suara terbatas. Orang-orang yang berhak ikut serta dalam pemungutan suara adalah warga Sahrawi. Maroko menerima usulan isi asalkan orang-orang yang melakukan pemungutan suara terdiri atas 74.000 warga Sahrawi dan 120.000 penduduk Maroko (Cherkaoui, 2017). Pernyataan ini jelas ditentang oleh Front Polisario, mereka menilai usulan Maroko tersebut tidak adil karena jumlah orang-orang yang dapat ikut dalam pemungutan suara tidak seimbang.

Perbedaan tanggapan dari kedua belah pihak membuat resolusi pertama ini berujung pada kegagalan.

Setelah mengalami kegagalan, Persatuan Bangsa-bangsa kembali mengeluarkan resolusi kedua bernama *Baker's Plan II*. Resolusi ini hampir sama dengan resolusi sebelumnya yang tetap mengupayakan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak yang berkonflik. Usulan yang ditawarkan adalah Persatuan Bangsa-bangsa akan mengadakan atau memfasilitasi referendum dalam jangka waktu empat hingga lima tahun mendatang. Usulan lainnya adalah memberikan pilihan kepada penduduk wilayah Sahara Barat berupa independensi, otonomi, atau integrasi dengan Maroko (SC Report, 2019). Resolusi ini disetujui oleh Front Polisario, Aljazair, dan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa, namun ditolak oleh Maroko. Tidak adanya kesepakatan atas resolusi membuat resolusi ini kembali mengalami kegagalan.

Setelah kegagalan dua resolusi, Maroko dan Front Polisario beberapa kali melakukan pertemuan atas inisiatif sendiri dan atas keterpaksaan dikarenakan harus membicarakan beberapa hasil sidang Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa. Resolusi terakhir yang tengah diupayakan oleh Persatuan Bangsa-bangsa adalah *Rountable Meeting on Western Sahara* yang dihadiri oleh Maroko, Front Polisario, Aljazair, dan Mauritania (SC Report, 2019). Diikut sertakannya Aljazair dan Mauritania dalam pembicaraan damai ini adalah karena kedua negara ini adalah tetangga terdekat dari wilayah konflik dan memiliki hubungan yang berdekatan dengan Maroko dan Front Polisario. Kehadiran Aljazair dan Mauritania dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan pandangan dan usulan baru terkait upaya penyelesaian konflik. Selain itu, kehadiran kedua negara ini dapat membantu meyakinkan Maroko dan Front Polisario bahwa keputusan perdamaian harus diputuskan segera. *Rountable Meeting on Western Sahara* telah dilakukan dua kali yakni pada Desember 2018 dan Maret 2019. Berdasarkan pandangan Peter Wallensteenn terkait unsur penting dalam resolusi konflik maka dapat dilihat bahwa Persatuan

Bangsa-bangsa telah mengupayakan salah satu unsur resolusi konflik dalam konflik Maroko dengan Front Polisario. Persatuan Bangsa-bangsa telah berhasil membuat Maroko dan Front Polisario untuk bersepakat dalam penghentian penggunaan kekerasan dalam konflik. Tidak adanya gencatan senjata diwilayah konflik memudahkan upaya resolusi konflik yang membutuhkan kepercayaan satu sama lain antara pihak yang berkonflik. Meskipun begitu, unsur penting lain dalam resolusi konflik yang berupa kesepakatan tertulis masih belum terwujud.

Solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan dari perspektif komunikasi persuasif

Berdasar latar belakang Konflik Maroko – Sahara Barat tersebut dihadapkan dengan langkah-Langkah strategis diplomasi pertahanan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Maroko maka selanjutnya akan dilaksanakan suatu proses analisa secara mendalam. Hal ini berkaitan dengan solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan dari perspektif komunikasi persuasif negara Maroko. Dalam proses analisa ini akan digunakan pisau analisis *SWOT* yaitu suatu analisis yang mencakup didalamnya upaya-upaya untuk mengenali kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) yang menentukan solusi penyelesaian masalah. Dalam hal ini adalah peran diplomasi pertahanan dari perspektif komunikasi persuasif negara Maroko. *Strength* atau kekuatan meliputi: Pertama, Isu tentang Sahara Barat menjadi penenang tensi politik di Maroko sebagai suatu isu *nasionalise* dan integrasi Sahara Barat. kedua, adanya faktor historis yang menganggap Sahara Barat merupakan bagian dari Maroko sejak sebelum pembagian Afrika oleh negara-negara Eropa sebelum 1880. *Weakness* atau kelemahan meliputi : Pertama, Belum adanya pengakuan yang legal dari PBB sebelum adanya pelaksanaan referendum untuk menentukan nasib apakah menjadi negara merdeka atau bergabung dengan Maroko. Kedua, Adanya kemungkinan instabilitas politik dalam negeri

Maroko yang dapat mempengaruhi konflik tersebut. *Opportunity* atau peluang : Pertama, Masuknya Maroko ke Sahara Barat merupakan bagian dari strategi perang dingin yang dilancarkan pihak Barat untuk membendung gerakan sosialis di seluruh dunia, kedua : Amerika dan negara sekutunya mendukung Maroko untuk melakukan pendudukan di Sahara Barat, ketiga, Sebagian besar negara Afrika telah membuka hubungan diplomatik dengan berkantor di kota Ainun yang terletak di Sahara Barat sehingga secara langsung mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut.

Threats atau kendala meliputi: Pertama, kekayaan alam Sahara Barat yang kaya akan fosfat, minyak, dan hasil tambang lainnya serta kekayaan laut sehingga membuat banyak negara turut campur dalam konflik ini. Kedua, adanya sebagian negara Afrika khususnya Aljazair yang mendukung Sahara Barat untuk merdeka sehingga turut mempengaruhi hubungan Maroko dengan negara-negara tersebut.

Apabila kita lihat dari berbagai aspek diatas dapat diketahui bahwa secara Strength atau kekuatan memiliki keunggulan yang jauh lebih berpengaruh untuk menentukan keberhasilan penyelesaian konflik apabila dihadapkan dengan Weakness atau kelemahan yang dimilikinya. Disamping itu juga *Opportunity* atau peluang yang dimiliki jauh lebih besar daripada *Threats* atau kendala yang dihadapi untuk mengambil solusi penyelesaian yang menentukan.

Berdasarkan pertimbangan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya konflik Maroko – Sahara Barat, penulis akan menganalisa pelaksanaan diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Maroko. Apabila kita lihat dari perspektif komunikasi persuasif maka terdapat lima pendekatan persuasif yang dapat dilaksanakan untuk mempermudah proses negoisasi antara lain sebagai berikut : *logical persuasion*, *power* dan koersi, kompromi, menciptakan konsesi yang saling menguntungkan, pendekatan emosional. Apabila kita analisa maka negara Maroko menggunakan salah satu pendekatan komunikasi persuasif yaitu *power* dan koersi.

Dalam hal ini menggunakan diplomasi pertahanan berupa serangkaian kegiatan yang utamanya dilakukan oleh perwakilan departemen pertahanan atau juga institusi pemerintah yang lainnya dengan tujuan untuk memenangkan kepentingan nasional di bidang keamanan dan pertahanan. langkah yang ditempuh menggunakan cara negosiasi dan instrumen diplomatik lainnya.

Dari pertimbangan tersebut maka diambil strategi yang paling relevan diambil oleh negara Maroko adalah menggunakan SO yaitu penggunaan kekuatan yang dimiliki serta memanfaatkan peluang yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam konflik Maroko – Sahara Barat. Solusi yang berupaya dilaksanakan oleh Maroko antara lain : pembukaan kantor konsulat sejumlah negara di kawasan yang diduduki Maroko menjadi bukti fisik atas klaim teritorial Rabat, penarikan diri dari Organisasi Uni Afrika (OAU) pada 1984 sebagai protes atas diterimanya Sahara Barat sebagai anggota organisasi, menempatkan perairan Sahara Barat ke dalam kawasan teritorial Maroko.

Pembentukan badan khusus dalam pemerintahan yang mengurus isu Sahara, memberikan tawaran penyelesaian konflik kepada *Front Polisario* yaitu menjadikan wilayah Sahara Barat sebagai wilayah Maroko yang memiliki otonomi khusus.



Warga Polisario di wilayah Sahara Barat
Pertengahan September 2020

Berdasarkan hal tersebut solusi penyelesaian permasalahan Maroko – Sahara Barat melalui diplomasi pertahanan dengan pen-dekatan komunikasi persuasif memperoleh hasil negoisasi yaitu menang – kalah.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa terdapat salah satu pihak mencapai seluruh atau sebagian besar hasil dari rencana yang diharapkan yaitu negara Maroko, sedangkan pihak lainnya tidak mendapatkan hasil apa-apa, atau mencapai hasil yang sangat kecil yaitu Sahara Barat.

Penutup

Latar belakang konflik Maroko – Sahara Barat adalah setelah kepergian Spanyol dari Sahara Barat, Maroko melakukan aneksasi terhadap wilayah tersebut. Namun, disaat yang bersamaan *Front Polisario* juga mendeklarasikan pembentukan negara baru bernama Republik Demokratik Arab Sahrawi. Konflik wilayah pun pecah diantara Maroko, *Front Polisario*.

Dihadapkan pada langkah-langkah strategis diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Maroko adalah menggunakan cara negosiasi dan instrumen diplomatik berupa pembukaan konsulat di negara Sahara Barat serta mengajukan klaim teritorial atas Sahara Barat.

Selanjutnya dengan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi baik dari internal maupun eksternal maka dapat diambil suatu solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan dari perspektif komunikasi persuasif yaitu *power* dan *koersi*. Hal ini dikarenakan pemilihan strategi SO untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk menyelesaikan konflik tersebut sehingga memperoleh hasil negoisasai menang-kalah.

Berdasarkan sejarah Peperangan Maroko dapat diperoleh adanya hal-hal penting yang dapat diambil sebagai suatu bahan pelajaran untuk diaplikasikan selanjutnya guna pelaksanaan diplomasi pertahanan melalui komunikasi persuasif untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Beberapa point penting sebagai suatu *lesson learned* (proses pembelajaran) antara lain sebagai berikut :

- Menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain untuk mendukung tujuannya. Negara - negara besar dan dunia seperti Amerika, Perancis dan negara Eropa lain mendukung upaya Maroko untuk menjadikan Sahara Barat sebagai bagian dari wilayah teritorial negara tersebut. Hal ini dapat terwujud karena sejak lama sudah terjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan negara-negara tersebut.
- Menjalankan strategi timbal balik. Maroko melaksanakan kebijakan dan strategi kepada negara-negara yang berkepentingan secara ekonomi untuk membantu klaim Maroko, seperti Burundi dan Sao Tome. Hal ini merupakan salah satu strategi jitu sehingga kantor konsulat sejumlah negara tersebut dibuka di kawasan yang diduduki Maroko menjadi bukti fisik atas klaim teritorial Rabat.
- Menempatkan isu nasionalisme dan kedaulatan negara sebagai prioritas negara. Pemerintahan Maroko mengesampingkan konflik dalam negeri untuk mendukung penyelesaian konflik Maroko – Sahara Barat sebagai isu nasionalisme atau kepentingan bersama. Disamping itu juga melaksanakan pembentukan badan khusus dalam pemerintahan negara Maroko untuk mengurus permasalahan tersebut.

Demikianlah *essay* tentang **Peran Diplomasi Pertahanan Negara Maroko Dalam Konflik Maroko – Sahara Barat**, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa *essay* ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diperlukan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penulisan di masa – masa yang akan datang.



PERAN DIPLOMASI DAN NEGOSIASI TERHADAP PENCEGAHAN KONFLIK MYANMAR

Mayor Kav Suprpto S.Ag.

Pendahuluan

Dalam pergaulan internasional, setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Tidak jarang ditemukan, kepentingan nasional suatu negara beririsan dan bahkan berbenturan dengan kepentingan negara lain. Hal tersebut rentan mengantarkan negara tersebut dalam ketegangan dan terkadang berujung konflik.

Negara menggunakan cara diplomasi untuk mengamankan atau meraih kepentingan nasionalnya. Diplomasi cenderung diasosiasikan sebagai *soft power* dan penggunaan kekuatan militer dianggap sebagai *hard power*. Diplomasi merupakan suatu keahlian dalam menentukan cara memenangkan kepentingan kita tanpa harus menimbulkan permusuhan. Dikaitkan dengan pertahanan, maka diplomasi pertahanan bisa bermakna sebagai suatu cara memenangkan kepentingan bangsa dengan menggunakan militer/pertahanan sebagai alat atau sumber daya tanpa harus mengedepankan kekerasan sebagai jalannya. Dalam sejarah modern Myanmar (Birma/Burma) mengalami dua kali masa penjajahan kolonial yakni oleh Inggris (abad ke XVIIIIX) dan pendudukan oleh Jepang pada tahun 1940.

Di bawah kolonial Inggris, etnis Rohingnya cenderung berada pada masa perdamaian. Namun berbeda halnya ketika berada dibawah kolonial Jepang di Myanmar, pernah terjadi

konflik komunal antara etnis Rakhine dan Rohingnya di wilayah Arakan. Bahkan pada tahun-tahun tersebut terjadilah sebuah peristiwa yang dinamakan sebagai pembantaian etnis Rohingnya.

Konflik ini memuncak dengan adanya pembakaran besar-besaran terhadap perumahan yang dihuni oleh etnis Rohingnya serta penyerangan yang dilakukan oleh kedua etnis. Bahkan terdapat dugaan pula dimana tentara dan polisi Myanmar untuk memprovokasi kedua etnis tersebut dan turut menyerang perkampungan Rohingnya. Konflik dan kekerasan berbau SARA yang terjadi di Myanmar hingga kini belum terselesaikan dengan baik.

Melihat kondisi yang terjadi pada saat itu, dunia internasional terkejut karena dalam waktu yang bersamaan Myanmar sedang mengalami proses demokrasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa mengecam kekerasan yang terjadi pada konflik tersebut, namun tidak menyalahkan pemerintahan Myanmar sebagai penyebab dari konflik tersebut.

Lembaga lain seperti *Amnesty Internasional* dan Organisasi HAM (Hak Asasi Manusia) dunia menilai bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan diskriminasi secara sistematis terhadap etnis Rohingnya yang telah menyebabkan penderitaan etnis Rohingnya yang tak kunjung usai.

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) sebagai sebuah organisasi regional di Asia Tenggara, mencoba merespon kasus konflik Rohingnya secara hati-hati. Hal ini dikarenakan ASEAN menganut prinsip non-intervensi yaitu prinsip untuk memastikan bahwa masalah setiap negara harus diurus masing-masing tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Negara-negara ASEAN setuju bahwa masalah Rohingnya adalah masalah domestik dan merupakan sebuah konflik komunal, bukan konflik religius.

Banyaknya faktor yang menjadi akar konflik dalam perseteruan di Myanmar membuat kasus-kasusnya menjadi sorotan dunia internasional. Rohingnya sebagai bagian dari etnis yang ada di Myanmar kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi dan tidak manusiawi, kondisi etnis Rohingnya yang beragama Islam sering terkucilkan oleh etnis mayoritas yang beragama Budha. ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara dituntut untuk lebih berperan aktif dalam proses perdamaian dan penyelesaian konflik di Myanmar. Namun pada kenyataannya, Kerjasama yang dilakukan selama ini dirasa belum memperlihatkan hasil, khususnya jika melihat pemberitaan yang masih menggambarkan ketidakadilan terhadap etnis Rohingnya.



Misi Pencari Fakta PBB soal Myanmar menyebut genosida terhadap Muslim Rohingnya masih terjadi

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik Rohingnya dengan negosiasi dan diplomasi antara ASEAN dan Myanmar harus segera diidentifikasi dan dianalisa untuk sehingga tidak menimbulkan konflik yang berulang pada masa depan. Menurut teori MPP (metode pemecahan persoalan) dalam rangka memecahkan suatu masalah, langkah pertama yang harus

dilakukan adalah mengenali masalah serta menetapkan tujuan pemecahannya. Hal ini diawali dengan mencari/mengidentifikasi tentang pokok permasalahannya. Setidaknya ada beberapa persoalan yang dapat kita identifikasi, antara lain sebagai berikut : **Pertama**, Latar belakang terjadinya konflik Rohingnya yang diselesaikan dengan diplomasi pertahanan negara, **Kedua**, Langkah-langkah strategis diplomasi pertahanan (*soft power*) yang digunakan oleh negara tersebut, **Ketiga**, solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan negara tersebut dari perspektif komunikasi persuasif, **Keempat**, *lesson learned* (proses pembelajaran) yang didapat dari diplomasi pertahanan yang bersifat *soft power* dari negara tersebut. Dari uraian permasalahan di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu **"Bagaimanakah Peran Diplomasi dan Negoisasi yang telah dilaksanakan untuk mencegah Konflik Rohingnya"**.

Agar cara berfikir Penulis dapat dipahami secara baik oleh pembaca maka penulis berusaha memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan di antara permasalahan negara Myanmar dan etnis Rohingnya yang dibantu dengan referensi-referensi yang ada serta menganalisisnya melalui metode penulisan deskriptif analisis dan studi kepustakaan.

Nilai guna dari tulisan ini adalah untuk memberikan manfaat bagi pembaca dalam menerapkan diplomasi dan negosiasi dihadapkan dengan penugasan di masa depan, sedangkan maksud penulisan ini untuk memberikan gambaran kepada Komando Atas tentang pelaksanaan negosiasi dan diplomasi yang telah dilaksanakan untuk mencegah terjadinya Konflik Myanmar dan etnis Rohingnya. Tujuan penulisan adalah untuk memberikan bahan masukan sumbangan pemikiran dan pertimbangan Komando Atas untuk dapat mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang studi diplomasi dan negosiasi. Ruang lingkup penulisan mencakup pendahuluan, pembahasan dan penutup dengan dibatasi pelaksanaan pencegahan Konflik Myanmar dan etnis Rohingnya.

Pembahasan

Setelah mengidentifikasi permasalahan dan menemukannya, maka menurut teori MPP langkah selanjutnya adalah mempersempit permasalahan sampai ke tingkat yang dapat diteliti oleh Penulis. Penyempitan masalah pada latar belakang pelaksanaan diplomasi dan negosiasi dalam pencegahan Konflik Rohingnya dan Langkah-langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi dan negosiasi tersebut sehingga perlu dilakukan analisa dengan cara menggali lebih dalam tentang hal tersebut. Disini Penulis menggunakan teori Kerlinger (1986) sehingga ditemukan inti permasalahan yang harus dipecahkan yaitu Peran Diplomasi dan Negoisasi yang telah dilaksanakan untuk mencegah Konflik Rohingnya. Sesuai dengan metoda MPP, maka setiap permasalahan tersebut harus dihilangkan.

Latar Belakang Faktor Pemicu Konflik Rohingya

Konflik yang kerap muncul di Myanmar yang melibatkan antar etnis terjadi dalam kurun 1991 sampai sekarang. Banyak faktor yang menjadi pemicu awal meledaknya konflik yang berkepanjangan ini, mulai dari kasus pemerkosaan, diskriminasi warga minoritas dan masalah entitas etnis. Perlakuan diskriminatif terhadap Etnis Rohingnya, antara lain disebabkan oleh status mereka yang berbeda. Tidak seperti etnis lain, Etnis Rohingnya tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, melainkan sebagai pendatang ilegal. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap Etnis Rohingnya, antara lain mereka tidak diberi izin usaha; diberikan pajak yang tinggi dan berlebihan, jika pajak tersebut tidak mampu untuk dibayarkan maka lahan pertanian, tambak, atau properti apapun yang mereka miliki akan disita.

Akar konflik dari masalah yang ada adalah kecemburuan terhadap etnis Rohingya yang dalam beberapa dasawarsa ini terus meningkat. Hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan pada etnis mayoritas Rakhine. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya pun sangat mungkin dianggap “kerikil dalam sepatu”, yakni sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya

dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim ini. Pemerintah Myanmar tak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya, karena menganggap kelompok Muslim ini bukan bagian dari kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948. Hal itu ditegaskan kembali oleh Presiden Myanmar, Thein Sein, bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh itu.



Pengungsi etnis Rohingya di perahu menuju tempat pengungsian di Bangladesh.

Langkah - Langkah Strategis Negoisasi dan Diplomasi

Penyelesaian konflik di Myanmar memerlukan adanya partisipasi dari banyak negara untuk mendesak Myanmar agar segera menyelesaikan masalah di Rakhine. Hingga saat ini masih sedikit negara yang mengungkit masalah di Myanmar karena menurutnya masalah ini kurang memberikan keuntungan bagi negaranya. Jika banyak negara ikut berpartisipasi terhadap masalah ini maka akan banyak pula bantuan yang di dapat Myanmar untuk mewujudkan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rakhine.

Kerjasama seluruh aktor internasional sangatlah diperlukan untuk menciptakan perdamaian dunia. Jika dilihat dari kerja PBB sebagai organisasi internasional sudah baik dengan memberikan bantuan dan desakan ke Myanmar. Namun perlu disayangkan karena tindakan internasional sering ditolak oleh pemerintah Myanmar. Indonesia sebagai negara satu kawasan ikut berpartisipasi untuk

menciptakan adanya perdamaian di Myanmar. Indonesia telah membantu permasalahan kemanusiaan di Rohingnya sejak tahun 2012 dan pada tahun 2017 memberikan usulan Formula 4+1 melalui Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. Marsudi.

Dalam menjalankan Formula 4+1, Indonesia mengalami banyak hambatan. Namun, Indonesia harus tetap berjuang untuk membela hak dasar kemanusiaan masyarakat. Langkah langkah yang diambil Indonesia sudah baik dalam membantu Myanmar. Konsistensi Indonesia yang selalu membantu tiap tahunnya perlu diapresiasi. Perjalanan panjang Indonesia dalam menyelesaikan konflik Rohingnya juga mendapat respon positif dari pemerintah Myanmar.

Penyelesaian permasalahan kemanusiaan memerlukan waktu yang panjang karena memperbaiki segala bidang kemasyarakatan. Tindakan atas dasar kemanusiaan ini perlu dipercepat agar tidak memperparah konflik. Pemerintah Indonesia dan Myanmar tetap perlu melakukan evaluasi bertahap guna menjalin hubungan yang komunitatif.

Penyelesaian konflik di Rohingnya belum menemukan titik terang hingga tahun 2018. Semua bantuan dari negara lain itu tidak berarti tanpa adanya kerja nyata dari pemerintahan Myanmar dan partisipasi masyarakat lokal. Selain Indonesia dan lembaga internasional yang turun tangan untuk melakukan diplomasi, pemerintah Myanmar juga perlu melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat lokal. Pemerintah Myanmar dirasa perlu banyak belajar dari negara-negara lain yang berhasil menjalankan pemerintahannya.

Solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan dari perspektif komunikasi persuasif

Berdasar latar belakang diplomasi pertahanan yang melibatkan negara Myanmar dengan ASEAN khususnya melalui diplomasi pertahanan oleh Indonesia. Dari hal tersebut dapat dianalisa secara mendalam berkaitan Solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan dari perspektif komunikasi persuasif oleh Indonesia sebagai duta ASEAN.

Dalam proses analisa ini akan digunakan pisau analisis SWOT yaitu suatu analisis yang mencakup didalamnya upaya-upaya untuk mengenali kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) yang menentukan solusi penyelesaian masalah. Dalam hal ini adalah peran diplomasi pertahanan dari perspektif komunikasi persuasif untuk mengatasi konflik Rohingnya di Myanmar. *Strength* atau kekuatan meliputi: Pertama, Keragaman etnis, budaya, dan agama di Myanmar, kedua, Dominasi militer. *Weakness* atau kelemahan meliputi: Sistem demokrasi yang lemah, Kecemburuan terhadap etnis Rohingnya. *Opportunity* atau peluang, dukungan dari ASEAN melalui Indonesia, dukungan penyelesaian Konflik masyarakat Internasional. *Threats* atau ancaman meliputi tidak mengakui kewarganegaraan Rohingnya, konflik berkepanjangan, kondisi sosial, politik, dan keamanan Myanmar masih sangat rapuh.

Peranan merupakan perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi, dan setiap orang yang menduduki posisi itu diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu dalam menjalankan peranan politiknya. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Peran dalam konteks politik adalah perilaku yang dilakukan oleh para aktor dalam menjalankan peran politik mereka, dan yang membentuk peranan adalah harapan atau dugaan yang datang dari diri sendiri ataupun orang lain. Teori ini juga berkaitan dengan peranan yang lain. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku politik. K. J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional Kerangka untuk analisis mengungkapkan tiga variabel penjelasan mengenai konsep peran, diantaranya beberapa kondisi ekstern, yang mencakup persepsi ancaman dan perubahan penting dalam kondisi penting luar negeri; atribut nasional, yaitu berkaitan dengan kemampuan negara (lemah atau kuat) pendapat dan sikap umum, kebutuhan ekonomi dan komposisi etnis negara; serta atribut ideologis dan sikap,

yang mencakup kebijakan atau peran tradisional, pendapat dan sikap umum, urusan humaniter, prinsip ideologis, serta identifikasi kawasan. Peran aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik di Myanmar dapat di analisa dengan menggunakan 3 (tiga) faktor yang dijelaskan oleh K. J Holsti. Faktor pertama dalam hal ini adalah kondisi eksternal, dimana masyarakat Indonesia merasa prihatin terhadap konflik pembantaian yang dilakukan oleh etnis Arakan yang mayoritas beragama Budha, terhadap etnis Rohingnya yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, hampir seluruh masyarakat menginginkan agar pemerintah secepatnya melakukan upaya penyelesaian terhadap konflik yang terjadi di bagian Barat Rakhine, Myanmar.

Faktor kedua adalah atribut nasional, Indonesia adalah negara kepulauan yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Dalam hal ini, masyarakat ASEAN memiliki identitas yang sama dengan etnis Rohingnya, hampir seluruh masyarakat ASEAN melakukan aksi demonstrasi khususnya hampir di seluruh wilayah Indonesia, tujuannya adalah mendesak agar pemerintah Indonesia secepatnya melakukan upaya yang tegas terkait penyelesaian konflik tersebut.



Bantuan dari warga Indonesia kepada pengungsi etnis Rohingnya di Bangladesh

Faktor ketiga adalah atribut nasional, kondisi eksternal serta atribut ideologis Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Pancasila yang merupakan pencerminan cita-cita bangsa yang harus dipatuhi secara setia serta tidak boleh menyimpang dari Pancasila tersebut. Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif berupaya melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan etnis

Rohingya, baik melalui PBB, ASEAN, dan OKI. Pemerintah Indonesia juga kerap menerima kedatangan para pengungsi dan pencari suaka dari etnis Rohingnya, kemudian bekerja sama dengan badan-badan PBB dan lembaga internasional lainnya untuk menyelesaikannya. ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara telah banyak memainkan peran penting dalam mewujudkan proses demokratisasi bagi negara-negara anggotanya.

Hal tersebut dapat terlihat setidaknya dalam menangani kasus di Myanmar. Rezim militer yang telah berkembang di Myanmar sejak tahun 1988 telah menimbulkan aksi protes dan menelan korban ribuan nyawa tidak berdosa. Dunia internasional dengan keras mengutuk pemerintah Myanmar dengan memberlakukan sederet sanksi untuk menekan pemerintah Myanmar. Prinsip *non-interference* yang dijunjung ASEAN lebih menekankan pada pendekatan diplomatik dan kekeluargaan. Pada pertemuan ASEAN ke 42 di Thailand, PM Thailand menekankan bahwa pendekatan *soft way* (ASEAN way) lebih produktif daripada memberikan sanksi kepada Myanmar. Pendekatan ASEAN way lebih menitikberatkan pada proses meyakinkan pemerintah berkuasa Myanmar bahwa ASEAN akan terus mendukung langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk menekan angka kekerasan yang terjadi di Myanmar. ASEAN sendiri lebih menempatkan diri sebagai arena/forum untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi dan bukan sebagai aktor utama yang berhak melakukan tindakan kepada negara anggotanya. Salah satu upaya ASEAN adalah menggelar *The ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC)*, komisi khusus yang dibentuk untuk menangani isu Myanmar. Pada pertemuan di Bali, AIPMC menghimbau Presiden Myanmar Thein Sein untuk melanjutkan tugasnya memajukan proses demokratisasi dan penegakan Hak Asasi Manusia di Myanmar. "Myanmar harus mengambil langkah-langkah konkret dan maju menuju perundingan damai dengan kelompok-kelompok etnis yang bersenjata sebagai prasyarat untuk kemajuan demokrasi" bunyi *pers release* pertemuan pada 29 November 2011 tersebut.

Prinsip *non-interference* yang diterapkan ASEAN selama ini telah menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan yang memiliki tingkat stabilitas dan perdamaian terbaik dibandingkan kawasan negara berkembang lainnya. ASEAN selain sebagai penggerak utama pertumbuhan politik di kawasan, juga mampu menciptakan partisipasi yang aktif dan rasa saling memiliki. Indonesia bagian anggota ASEAN menyuarakan pentingnya semua negara anggota ASEAN untuk memberikan bantuan penuh kepada penyelesaian konflik rohingya tanpa membedakan SARA dengan melakukan diplomasi-diplomasi internasional.



Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pentingnya keterlibatan ASEAN untuk membantu Myanmar permasalahan *Rakhine Statesaat* saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Istana Merdeka, Jakarta. Rabu (13/3/2019).

Lesson learned (proses pembelajaran) yang didapat dari diplomasi pertahanan yang bersifat *soft power* di Myanmar

Lesson learned (proses pembelajaran) adalah Dalam jangka pendek, upaya diplomasi Indonesia terhadap Myanmar terbilang cukup sukses, melalui adanya sinyal positif untuk pembukaan akses dan bantuan kemanusiaan ke negara bagian Rakhine.

Dengan dibukanya akses kepada Indonesia, komitmen bantuan kemanusiaan untuk penanganan krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine state, setidaknya dapat menjadi langkah awal yang baik bagi Indonesia untuk bisa menerapkan langkah strategis berikutnya dalam mencari solusi dari akar permasalahan dari etnis rohingya yaitu tentang hak 93 kewarganegaraan, lebih lanjut, untuk saat ini Indonesia hanya perlu, memobilisasi bantuan dari negara-negara ASEAN dan dunia internasional beserta organisasi kemanusiaan

Internasional dan PBB untuk bersama-sama memberikan secercah perhatian untuk Myanmar, utamanya kepada korban dari krisis yaitu etnis rohingya.

Dalam jangka menengah, sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa akar permasalahan di Rakhine state yaitu soal hak kewarganegaraan atau tidak diakuinya etnis rohingya sebagai anak kandung oleh pemerintah Myanmar, oleh karena itu, Indonesia harus bekerja ekstra untuk mencari solusi atas krisis kemanusiaan ini.

Indonesia bisa dan sangat mampu untuk bisa menyelesaikan krisis kemanusiaan etnis Rohingya baik dengan menjadi Mediator sekaligus Fasilitator. Tidak salah mengulang kesuksesan Indonesia dalam memediasi dan memfasilitasi permasalahan yang pernah terjadi di Thailand Selatan dengan etnis Muslim Pattaninya dan Filipina Selatan dengan pasukan Moronya, dan bahkan Indonesia bersama dengan Francis dalam penanganan Vietnam dengan Kamboja.

Sedangkan dalam jangka panjang, sebagaimana yang telah diketahui bahwa, Myanmar dibawah kekuasaan pemimpin *de facto state counsellor* Daw Aung San Suu Kyi, sedang dalam masa transisi menuju demokrasi, tak pelak, jika Myanmar akan dihadapkan pada berbagai persoalan tidak hanya kemandirian warga sipil, pembangunan, dan militer Myanmar. Maka, Indonesia sebagai *Role Model* dari demokrasi yang coba di implementasikan oleh Myanmar harus bekerja ekstra untuk mendukung upaya tersebut, baik melalui pertukaran institusi ataupun mekanisme lainnya.



Aung San Suu Kyi

Satu Pelajaran penting dari tragedi kemanusiaan rohingya ini adalah negara haruslah bersikap netral, imparial dan objektif secara holistik dan tidak secara parsial berada dan memihak di satu pihak kepada warganya, apalagi, Myanmar memiliki cukup banyak kesamaan dengan Indonesia, memiliki banyak etnis, dengan prinsip ini, negara sebagai entitas tertinggi diupayakan tidak memberikan celah dan ruang aspirasi kepada kelompok-kelompok yang mencoba menghegemoni atau mendominasi yang lainnya.



Peringatan 50 Tahun ASEAN diwarnai Demonstrasi warga Jakarta agar ASEAN membantu Myanmar menyelesaikan permasalahan *Rakhine Statesaat*

Penutup

Dalam penyelesaian masalah Konflik Rohingya tersebut terdapat upaya diplomasi dan negosiasi yang telah dilakukan oleh negara tersebut sebelumnya. Hal ini merujuk pada pengertian diplomasi yaitu semua kegiatan dan interaksi untuk menjalankan politik luar negeri suatu negara terkait interaksi dan hubungannya dengan negara atau bangsa lainnya.

Sedangkan negosiasi adalah suatu upaya untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi antara dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Diplomasi pertahanan juga bisa dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang utamanya dilakukan oleh perwakilan departemen pertahanan atau juga institusi pemerintah yang lainnya dengan tujuan untuk memenangkan kepentingan nasional di bidang keamanan dan pertahanan.

Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan di tingkat global, regional dan bilateral. Dari semua itu, diplomasi dalam tingkatan bilateral memainkan peranan yang sangat penting. Keberhasilan strategi diplomasi pertahanan suatu negara merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan dan pembangunan. Tampaknya konflik etnis di Myanmar akan mengarah ke Rekonsiliasi damai.

Adanya indikasi itikad baik dari pemerintah untuk melakukan pendataan ulang terhadap warga Rohingya menjadi awal yang baik terbukanya jalan damai. Walaupun keraguan pemerintah masih terlihat dalam hal pemberian status kewarganegaran Rohingya, setidaknya pemerintah sudah membuka diri untuk mencari solusi bagi konflik yang melanda negaranya.

Demikianlah *essay* tentang Peran Diplomasi dan Negoisasi yang telah dilaksanakan untuk mencegah konflik di Myanmar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa *essay* ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diperlukan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penulisan di masa-masa yang akan datang.

Mayor Kav Suprpto S.Ag. adalah Abituren Pendidikan Regular LXI SESKOAD TA 2021





PERANG SAUDARA LIBANON DALAM DIPLOMASI PERTAHANAN NEGARA

Letnan Kolonel Inf Irfan Sugiharto, S.Sos.

Pendahuluan

Perang Saudara Lebanon dimulai dari 1975 hingga 1990. Diperkirakan sekitar 150 ribu hingga 230 ribu warga sipil tewas akibat peperangan tersebut. Sekitar satu juta jiwa lain, sekitar seperempat populasi negara tersebut, terluka dan 350 ribu penduduk mengungsi. Tidak diketahui secara jelas faktor pemicu peperangan tersebut. Keterlibatan Suriah, Israel, Amerika Serikat, dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) telah memperburuk konflik tersebut. Perang ini sebenarnya telah ada pada akhir masa pemerintahan Dinasti Ottoman di Lebanon. Perang Dingin memberi dampak yang cukup kuat terhadap Lebanon dan menyebabkan krisis politik pada 1958. Insiden ini diduga terjadi ketika seorang warga Lebanon dan kelompok orang Palestina (PLO) di Ain ar-Rummanah, Beirut bentrok pada bulan April 1975. Ini adalah titik awal yang kemudian menjadi pemicu perang saudara ke seluruh wilayah Lebanon.

Perang tersebut melibatkan kelompok-kelompok yang bersaing, dan didukung oleh sejumlah negara tetangga. Orang-orang Kristen Maronit, yang dipimpin oleh partai Phalangis dan milisi, mula-mula bersekutu dengan Suriah, dan kemudian dengan Israel, yang mendukung mereka dengan senjata dan latihan untuk memerangi fraksi PLO (Organisasi Pembebasan Palestina).

Sementara itu fraksi-fraksi lainnya bersekutu dengan Suriah, Iran dan negara-negara lain di wilayah itu. Pertempuran sempat terhenti pada 1976 karena ada mediasi dari Liga Arab dan intervensi Suriah. Pertempuran ini terpusat di Lebanon Selatan. Mereka menjalankan hak veto pada politik Lebanon. Pembentukan negara Israel dan perpindahan 100 ribu pengungsi Palestina ke Lebanon (sekitar 10 persen total populasi) mengubah demografi Lebanon dan memberikan dasar bagi keterlibatan jangka panjang Lebanon dalam konflik regional. Setelah pertempuran sempat terhenti pada 1976 karena mediasi Liga Arab dan intervensi Suriah, pertikaian Palestina-Lebanon berlanjut di Lebanon selatan, telah diduduki PLO sejak 1969. Hal ini bertentangan dengan kesepakatan Kairo yang juga ditandatangani Pemerintah Lebanon.

Bedasarkan penjelasan latar belakang di atas. Pasis dapat mengidentifikasi persoalan yang akan di bahas dalam penulisan esai tersebut yaitu : **Pertama**, Latar belakang terjadinya konflik antara negara yang diselesaikan dengan diplomasi perthanan negara. **Kedua** Langkah-langkah strategis diplomasi pertahanan (*soft power*) yang di gunakan oleh negara tersebut. **Ketiga**, solusi penyeslasiian permasalahan diplomasi pertahanan negara tersebut dari perspektif komunikasi persuasif.

Keempat. *Lesson Learned* proses pembelajaran) yang didapat dari diplomasi pertahanan yang bersifat *soft power* dari negara tersebut. Kelima. Teknik analisis SWOT (kekuatan atau keunggulan, kelemahan atau kekurangan, peluang dan kendala) pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan Gabon.

Dari keempat persoalan tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yang perlu dianalisa yaitu: "**Bagaimana Perang Antar Negara Di Lebanon Dalam Diplomasi Pertahanan Negara?**"

Metode yang digunakan dalam penulisan esai ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan yang mengumpulkan informasi relevan dengan masalah atau fenomena yang sedang dibahas. Informasi diperoleh dari sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

Penulisan esai ini diharapkan mempunyai nilai guna kepada pembaca agar mudah dipahami tentang diplomasi perang saudara Libanon, dan maksud dari penulisan esai ini ialah untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang diplomasi perang saudara Libanon dalam sistem pertahanan negara.

Esai ini mempunyai tujuan sebagai sumbang saran dan pemikiran kepada Komando Atas dalam rangka memberikan pemecahan masalah dalam melihat peluang diplomasi perang saudara Libanon dalam sitem pertahanan negara. Ruang lingkup penulisan esai ini meliputi pendahuluan, pembahasan dan penutup dengan pembatasan pada Diplomasi perang saudara Libanon.

Pembahasan

Yang menjadi konflik antar negara di Libanon bermula dari perjuangan Palestina Liberation Organization (PLO) yang dipimpin oleh Yaser Arafat (1929-2004) untuk membebaskan tanah palestina dari penjajahan Zionis Israel ikut menyeret Libanon terlibat konflik dengan Israel. Pada 6 juni 1982, Israel menginvasi wilayah Lebanon Selatan yang tujuannya adalah untuk menghancurkan basisi para pejuan PLO yang berada di lebanon serta memperluas wilayahnya hingga Sungai Litani.



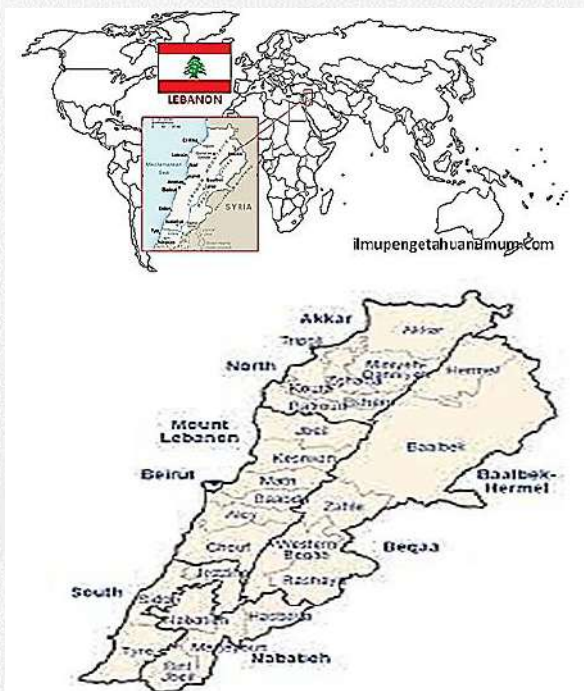
Yaser Arafat (1929-2004) Pimpinan *Palestina Liberation Organization (PLO)*

Ariel Sharon yang kala itu menjadi panglima yang tertinggi ingin mewujudkan David Ben Gurion (pendiri partai Mapan dari kelompok buruh sekaligus tokoh zionis yang mewarisi kepemimpinan *Theodore Herzl* tentang wilayah Israel yang natural terbentang mulai wilayah timur yakni dari sungai Jordan di Palestina sampai ke utara di sungai Litani, Lebanon. Infvasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982 melakukan sebuah perlawanan bernama Hizbullah yang bertujuan mengakhiri pendudukan Zionis Israel di wilayah Lebanon.



Ariel Sharon (pendiri partai Mapan dari kelompok buruh sekaligus tokoh zionis)

Dari studi literatur latar belakang konflik antar negara yang di selesaikan dengan diplomasi pertahanan negara ialah, lambat laun keberadaan Hizbullah dengan kekuatan militernya yang bagi Israel untuk menguasai wilayah Lebanon Selatan khususnya dan wilayah semakin kuat karena mendapat dukungan dari Iran, semakin menjadi hambatan bagi Israel untuk menguasai wilayah Lebanon Selatan khususnya dan wilayah Timur Tengah pada umumnya.



Peta Wilayah Lebanon

Dari studi literatur latar belakang konflik antar negara yang di selesaikan dengan diplomasi pertahanan negara ialah, lambat laun keberadaan Hizbullah dengan kekuatan militernya yang bagi Israel untuk menguasai wilayah Lebanon Selatan khususnya dan wilayah semakin kuat karena mendapat dukungan dari Iran, semakin menjadi hambatan bagi Israel untuk menguasai wilayah Lebanon Selatan khususnya dan wilayah Timur Tengah pada umumnya. Terlebih lagi secara resmi Hizbullah menjadi partai politik yang ikut serta pada pemilu Lebanon 1992 dan mampu menempatkan wakilnya untuk menduduki Parlemen Lebanon.

Hal ini merupakan bukti kepercayaan rakyat Lebanon terhadap Hizbullah atas nasib bangsa Lebanon dimasa depan yang sebagian besar mengalami trauma akibat agresi militer Israel yang telah menghancurkan gedung-gedung dan perumahan serta infrastruktur di wilayah mereka, bahkan mengakibatkan ribuan warga sipil Lebanon tewas yang sebagian sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Banyak pengamat menyatakan bahwa dalam konflik 34 hari tersebut, Hizbullah keluar sebagai pemenang. Bahkan Komite Winograd yang didirikan oleh Pemerintah Israel pada 11 September 2006 yang diketuai oleh hakim Eliahu Winograd yang bertugas untuk melakukan investigasi atas peristiwa

selama 34 hari Perang Lebanon Kedua (Juli-Agustus 2006), serta peristiwa sebelum perang, pada poin 11 menyatakan bahwa Israel memulai perang yang panjang yang berakhir tanpa kemenangan militer yang jelas.

Fakta yang menarik adalah bahwa Hizbullah hanyalah merupakan sebuah kelompok perjuangan dan bukan merupakan sebuah negara. Namun kelompok ini mampu mengimbangi kekuatan Israel yang merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat di kawasan Timur Tengah.

Bahkan ketika Israel dikeroyok oleh gabungan pasukan negara-negara Arab pada perang Arab-Israel tahun 1967, Israel tidak terkalahkan. Perang Enam Hari tersebut berakhir dengan Israel menduduki Semenanjung Sinai milik Mesir, Dataran Tinggi Golan milik Suriah, Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Langkah-langkah strategi diplomasi pertahanan (*soft power*) yang digunakan Lebanon. Strategi yang digunakan oleh Hizbullah menghadapi Israel pada Perang Lebanon Kedua tahun 2006.

Dalam perang tahun 2006 itu, semua orang tahu bahwa tentara Israel telah dikalahkan, perang tersebut juga merupakan bukti bahwa Israel sudah semakin rapuh. Didalam disiplin ilmu Hubungan Internasional dengan kajian kawasan Timur Tengah pada umumnya serta strategi militer khususnya yang digunakan oleh kelompok Hizbullah dalam menghadapi Israel pada Perang Lebanon Kedua tahun 2006.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan mampu memberikan gambaran dan pemahaman tentang bagaimana negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan Timur Tengah memainkan perannya, sehingga memunculkan dugaan bahwa konflik tersebut sengaja diskenariokan oleh berbagai pihak demi kepentingan ekonomi-politis tertentu.

Dalam konteks inilah, kita sebagai kalangan akademisi harus memahami pokok permasalahan yang sebenarnya, sehingga tidak terus kemudian mengikuti anggapan kelompok Islam garis keras yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia yang menganggap serangan Israel ke Lebanon merupakan perang antara Yahudi dan Islam (perang antar agama).

Sebagai akademisi, adalah sudah sepantasnya kita melihat suatu permasalahan secara obyektif serta disesuaikan dengan kadar porsinya.

Keberhasilan Hizbullah dalam mengusir militer Israel dari kawasan Lebanon tahun 2006 silam melejitkan citra positif Hizbullah sebagai salah satu kelompok militer terbaik di dunia. Bahkan Mantan perwira operasi CIA Robert Baer menyatakan bahwa "keamanan Hizbullah terbaik di dunia saat ini dan lebih baik dari KGB (*Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti* atau Komite Keamanan Negara milik Rusia)".

Paling tidak dengan adanya penelitian ini, memberikan pemahaman bagaimana Hizbullah mampu membangun armada militernya sehingga dapat dijadikan referensi bagi militer Indonesia untuk mengembangkan dinas intellijen negara dan kita-pun mampu menjadi negara yang diperhitungkan bangsa lain di dunia.

Sebuah jurnal karya Iver Gabrielsen yang berjudul *Hezbollah's Strategy and Tactics in the Security Zone from 1985 to 2000*. Dalam penelitian tersebut Gabrielsen menjelaskan strategi Hizbullah yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dimana pada tahun-tahun awal berdirinya organisasi ini, yakni pada tahun 1982, Hizbullah masih mengandalkan serangan bom bunuh diri dalam operasi perlawanan menentang keberadaan tentara Israel di Lebanon.

Namun, seperti yang dikatakan oleh kepala brigade Golani Moshe Kaplinsky bahwa 'Hizbullah adalah organisasi yang terus belajar'. Taktik bom bunuh diri semakin menunjukkan ketidak seimbangan perlawanan antara Hizbullah dan Israel dan hanya akan menimbulkan semakin berkurang-nya anggota Hizbullah serta menurunnya dukungan masyarakat Lebanon.

Dalam kondisi yang demikian, pada tahun 1992 Hizbullah mendeklarasikan diri sebagai partai politik di Lebanon. Sejak saat itu, Hizbullah lebih pragmatis demi mendapatkan kembali dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat sangatlah penting bagi keberlangsungan perang gerilya dalam kota yang dilancarkan Hizbullah ketika menghadapi Israel.

Penyediaan layanan social memainkan peran penting bagi Hizbullah dalam memenangkan hati dan pikiran penduduk Syi'ah Lebanon di pinggiran selatan Beirut. Kawasan tersebut dikenal sebagai kubangan kesengsaraan yang luput dari perhatian Pemerintah Lebanon. Dimana air limbah membanjiri jalan-jalan, sampah yang tidak dibersihkan dalam beberapa tahun, listrik dianggap barang mewah dan tidak ada air bersih yang mengalir. Hizbullah kemudian memberikan layanan sosial yang berupa pembangunan rumah penduduk yang hancur akibat serangan Israel dan memberikan layanan kesehatan gratis. Hal ini menimbulkan dinamika yang menarik, dimana semakin Israel berusaha untuk menghukum Hizbullah, lebih banyak korban sipil dan kerusakan, semakin meningkat pula dukungan masyarakat terhadap Hizbullah berkat jasa rekonstruksi.

Menurut pendapat Anthony H. Cordesman yang berjudul Preliminary "*Lessons*" of the *Israeli-Hezbollah War*. Dalam jurnal tersebut, peneliti lebih menyoroti tentang peran Iran dan Suriah sebagai penyedia dan penyalur persenjataan yang dinilai sangat berpengaruh terhadap kemajuan teknologi yang dimiliki Hizbullah saat ini. Peran kedua negara tersebut tidak hanya terbatas sebagai pemasok dan penyalur persenjataan, namun mereka juga mendirikan pusat intelijen Hizbullah-Iran-Suriah di Damaskus yang mulai beroperasi selama perang berlangsung.



Simpatisan Hizbullah

Bahkan pejabat MOSSAD menyatakan bahwa 100 penasihat Iran bekerja dengan Hizbullah, dan bahwa mereka tahu tidak hanya teruskan pengiriman persenjataan dalam jumlah besar bagi Hizbullah, tetapi juga telah

menciptakan sebuah pusat komando Hizbullah untuk penargetan dan pusat pengendalian rudal.



Lambang Agen Rahasia Intelijen Israel, Mossad

Apa solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan negara tersebut dari perspektif komunikasi persuasif. Dalam konteks ini, Hizbullah mampu mengelola jalannya peristiwa dengan baik dan mampu memaksimalkan manfaat atas reaksi opini publik baik di negara-negara Arab maupun dunia internasional. Hizbullah mendorong wartawan dan editor memanfaatkan Al-Manar untuk mendapatkan laporan dan informasi tentang perang dan membagikan berbagai foto dari korban konflik. Gambar tentara Israel yang melakukan penyerangan pengeboman rumah-rumah dan desa-desa, warga sipil yang melarikan diri, serangan terhadap bandara Beirut, evakuasi, bunker dan mayat-mayat korban serangan Israel dilaporkan pada Web berkat teknologi luas.

Al-Manar yang mendefinisikan diri sebagai 'Stasiun Perlawanan' dimana salah satu tujuan utamanya adalah untuk melancarkan 'perang psikologis melawan Zionis Israel' telah sukses menampilkan Israel sebagai sang Agresor. Di sinilah Israel kehilangan kontrol atas cakupan media. Pertama, berita yang mencapai negara asing, perlahan-lahan telah mengikis konsensus yang sudah rapuh. Kedua, gerakan gerilya mampu mengelola faktor informasi dengan cara yang lebih baik, dan untuk memindahkan pion tepat di medan perang informasi serta memaksimalkan kekuatan mereka. Kemampuan Hizbullah dalam mengelola media massa, sehingga mampu dijadikan sebagai alat propaganda dalam

bentuk *propaganda of deed* selama peperangan berlangsung. Hal itu selain dimaksudkan untuk mempengaruhi opini masyarakat baik domestik Lebanon, masyarakat internasional maupun masyarakat Israel, juga untuk menutupi kekurangan Hizbullah atas perbedaan kekuatan yang signifikan diantara kedua kubu. Sehingga Hizbullah mampu mengklaim kemenangan diakhir peperangan.

Penjelasan *Lesson Learned* (proses pembelajaran) yang di dapat dari diplomasi pertahanan yang bersifat *soft power* dari negara tersebut. Penelitian ini merupakan studi mengenai diplomasi Indonesia terhadap negara kontributor dalam misi UNIFIL (*United Nations Interim Force In Lebanon*). *United Nations Peacekeeping Operations* (Misi pemeliharaan Perdamaian PBB/MPP PBB) merupakan "*Flagship Enterprise*" PBB yang dibentuk sebagai tool PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pada Awalnya, peran misi pemeliharaan perdamaian terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilitas situasi dilapangan untuk memberikan ruang bagi usaha-usaha politik dalam menyelesaikan konflik.

Dengan berakhirnya perang dingin konteks penggelaran misi pemeliharaan perdamaian berubah dari "tradisional" yang mengedepankan tugas militer menjadi misi yang lebih "multidimensional". Perubahan ini terjadi baik dari segi mandat maupun komposisi personil. Saat ini semakin banyak melibatkan komponen polisi dan sipil dalam rangka mengimplementasikan perjanjian damai secara komprehensif dan membantu meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Berdasarkan sejarah, konflik yang terjadi antara Lebanon dan Israel bermula Ketika Hizbullah melakukan penyerangan lewat udara ke wilayah Israel Utara yaitu kota Shlomi dan juga menembakan roket Angkatan Pertahanan Israel IDF (*Israeli Defence Force*). IDF yang sedang melakukan patroli di perbatasan menjadi korban yang mengakibatkan delapan tentara IDF tewas serta ditangkapnya dua tentara lainnya (*Ehud Goldwasser dan Elgad Regev*).

Tentara Hizbullah juga menembakkan roket dan mortir secara beruntun ke wilayah utara Israel lainnya sebagai suatu pengalihan perhatian pada waktu yang sama. Hal itu mendorong Israel untuk melakukan serangan balasan dengan membombardir kawasan Lebanon Selatan dan mengakibatkan kerusakan infrastruktur sipil Lebanon yang nilai kerugiannya mencapai dua miliar dolar AS (sekitar Rp 18 triliun).

Berdasarkan uraian mengenai beberapa persoalan di atas dan telah dilakukan analisis dengan menggunakan teori maupun konsep yang relevan dapat diketahui bahwa konflik antar negara di Libanon sempat beberapa kali mengalami pasang surut karena potensi politik namun hal tersebut dapat diatasi oleh negara tersebut sehingga dalam pelibatan militer dalam pertahanan negara dapat dilakukan dengan baik, hal ini tercermin adanya fraksi PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) yang bersekutu dengan Suriah, Iran dan negara-negara lain di wilayah itu. Kemudian untuk menganalisis lebih lanjut fenomena tersebut dapat dilakukan analisa menggunakan Teknik analisis SWOT. Dalam fenomena yang Penulis angkat terdapat faktor internal dan eksternal mengenai hubungan militer dan sipil sehingga memiliki kekuatan/*Strength*, yaitu adanya regulasi yang jelas mengenai pelibatan sipil dalam pertahanan negara, lalu stabilitas ekonomi yang cenderung baik menghasilkan kekuatan militer yang dapat bersaing di wilayah Lebanon, bahkan militer PLO dapat mengirimkan pasukannya untuk bertugas sebagai pasukan perdamaian dibawah naungan PBB. Akan tetapi, Kekuatan yang dimiliki tersebut rupanya memiliki kelemahan/*Weakness*, di mana stabilitas politik negara tersebut masih belum cukup stabil, hal ini dibuktikan dengan agresi militer Israel di negara tersebut, yang mengakibatkan ribuan warga sipil Lebanon Tewas, kelompok pejuang yang dinamakan Hizbullah yang belum diperhatikan oleh pemerintah juga seringkali bersitegang dengan militer di wilayah setempat. Terdapat juga suatu peluang/*Opportunity* yaitu dengan adanya kerjasama pertahanan antara Lebanon dengan negara-negara seperti Suriah, Iran dan negara lain di wilayah itu menghasilkan kekuatan pertahanan

yang cukup baik karena militer Lebanon mendapatkan dukungan berupa pelatihan personel, modernisasi Alutsista dan juga dukungan keamanan di wilayah perbatasan Lebanon.

Dari Peluang tersebut kemudian terdapat suatu ancaman/*Threat*, yang menjadi ancaman bagi rakyat Palestina di Lebanon ialah dengan adanya kehadiran negara-negara asing di Lebanon mengakibatkan segala lini kehidupan masyarakat Lebanon mau tidak mau harus terbiasa dan tergantung dengan kehadiran pasukan dari Suriah, Iran dan negara lainnya, hal ini terbukti ketika adanya Agresi Israel kepada pemerintahan Lebanon di wilayah perbatasan.

Dari analisa SWOT tersebut kemudian menghasilkan strategi yang efektif dalam menghadapi permasalahan yang ada, yaitu dengan menggunakan strategi W-O, strategi tersebut yaitu dengan masih adanya instabilitas politik di negara tersebut yang berakibat pada rentannya pertahanan Lebanon maka akan dapat diatasi dengan adanya kerjasama antara Lebanon dengan Suriah maupun Iran, kedua negara ini dapat membantu apabila sewaktu-waktu terjadi krisis yang terjadi di dalam negeri Lebanon.



Para pendukung Hezbollah menghadiri pemakaman rekan mereka yang tewas akibat konflik Suriah di Beirut

Penutup

Kondisi geografis Lebanon yang terbelang strategis di wilayah Timur Tengah mengharuskan Lebanon untuk dapat mempertahankan negaranya dari segala bentuk ancaman, oleh karenanya Lebanon menggunakan diplomasi pertahanan negara yang berfokus pada pengoptimalan militer Hizbullah yang professional beserta personel militer dari sipil dan didukung oleh militer dari negara-negara seperti Suriah dan Iran.

Bentuk hubungan atau kerjasama antara militer dalam Diplomasi pertahanan negara Lebanon ialah terlaksana pada kemajuan teknologi, menurut beberapa sumber dijelaskan bahwa Lebanon. Menurut pendapat Anthony H. Cordesman yang berjudul *Preliminary "Lessons" of the Israeli-Hezbollah War*. Dalam jurnal tersebut, peneliti lebih menyoroti tentang peran Iran dan Suriah sebagai penyedia dan penyalur persenjataan yang dinilai sangat berpengaruh terhadap kemajuan teknologi yang dimiliki Hizbullah saat ini. Peran kedua negara tersebut tidak hanya terbatas sebagai pemasok dan penyalur persenjataan, namun mereka juga mendirikan pusat intelijen Hizbullah-Iran-Suriah di Damaskus yang mulai beroperasi selama perang berlangsung.

Bahkan pejabat MOSSAD menyatakan bahwa 100 penasihat Iran bekerja dengan Hizbullah, dan bahwa mereka tahu Iran tidak hanya terus mengirimkan persenjataan dalam jumlah besar bagi Hizbullah, tetapi juga telah menciptakan sebuah pusat komando Hizbullah untuk penargetan dan pusat pengendalian rudal.

Pada masa damai, militer berpartisipasi dalam pembangunan negara. Dinas wajib militer telah di atur dengan jelas dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 yang menetapkan bahwa pertahanan negara menjadi tanggung jawab Angkatan Bersenjata tetap, namun dapat diperkuat dengan adanya personel wajib militer.

Dari analisa SWOT kemudian menghasilkan strategi yang efektif dalam menghadapi permasalahan yang ada, yaitu dengan menggunakan strategi W-O, strategi tersebut yaitu dengan masih adanya instabilitas politik di negara tersebut yang berakibat pada rentannya pertahanan Lebanon maka akan dapat diatasi dengan adanya kerjasama internasional antara Lebanon dengan Suriah maupun Iran, kedua negara ini dapat membantu apabila sewaktu-waktu terjadi krisis yang terjadi di dalam negeri Lebanon.

Berdasarkan uraian simpulan di atas kemudian dapat diambil suatu lesson learned dari esai ini, yakni diplomasi Indonesia terhadap negara kontributor dalam misi UNIFIL (*United Nations Interim Force In Lebanon*).

United Nations Peacekeeping Operations (Misi pemeliharaan Perdamaian PBB/ MPP PBB) merupakan "*Flagship Enterprise*" PBB yang dibentuk sebagai tool PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pada Awalnya, peran misi pemeliharaan perdamaian terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilitas situasi dilapangan untuk memberikan ruang bagi usaha-usaha politik dalam menyelesaikan konflik.

Dengan berakhirnya perang dingin konteks penggelaran misi pemeliharaan perdamaian berubah dari "tradisional" yang mengedepankan tugas militer menjadi misi yang lebih "multidimensional". Perubahan ini terjadi baik dari segi mandat maupun komposisi personil.

Saat ini semakin banyak melibatkan komponen polisi dan sipil dalam rangka mengimplementasikan perjanjian damai secara komprehensif dan membantu meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Dengan berakhirnya esai ini, pasis menyampaikan saran sebagai berikut: **pertama**, bagi Komando Atas, esai ini dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan terkait hubungan militer-sipil dalam sistem pertahanan negara yang dihadapkan pada berbagai jenis ancaman; dan **kedua**, kepada seluruh pembaca, esai ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam memperdalam kajian mengenai perang saudara Libanon dalam diplomasi ketahanan negara di dunia.

Letkol Inf Irfan Sugiharto, S.Sos. adalah
Abituren Pendidikan Regular LXI SESKOAD
TA 2021





UPAYA DIPLOMASI REPUBLIK RAKYAT CHINA (RRC) DALAM RANGKA MENJALIN HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN AMERIKA SERIKAT PADA MASA PERANG DINGIN

Kompol Indra Ranudikarta, S.I.K., M.Si.

Pendahuluan

Republik Rakyat China (RRC) adalah bentuk pemerintahan di pusat China daratan, yang dibentuk oleh pemimpin Komunis China Mao Zedong dalam deklarasinya pada 1 Oktober 1949. Deklarasi berdirinya merupakan puncak dari pertempuran yang terjadi antara kaum komunis (PKC) dan kaum nasionalis (Partai Kuomintang/KMT) selama bertahun-tahun. Pendukung kaum nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek akhirnya melarikan diri ke wilayah Pulau Formosa, sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah tenggara daratan. Setelah didirikan, Republik Rakyat China dengan Beijing sebagai ibu kota mendapatkan pengakuan Uni Soviet. Pengakuan Uni Soviet tersebut diberikan setelah satu hari dideklarasikan berdiri yaitu pada 2 Oktober 1949. Mao Zedong pun kemudian menyatakan kebijakan bahwa RRC bersandar pada satu sisi atau *leaning to one side* sebagai komitmen terhadap komunisme.

Republik Rakyat Cina dideklarasikan empat tahun setelah Perang Dunia II berakhir. Namun meskipun Perang telah berakhir, negara-negara di dunia masih belum merasa terbebas dari suasana perang. Pada masa itu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang merupakan sekutu dan juga negara pemenang dalam Perang Dunia II, justru menjadi pihak yang bermusuhan satu sama lain.

Amerika Serikat beserta negara-negara sekutunya dan Uni Soviet bersama negara-negara sekutunya termasuk berusaha untuk memperluas pengaruh dan mendapatkan supremasi. Atas ideologi masing-masing. Hal ini yang kemudian dikenal sebagai masa Perang Dingin. Perang Dingin merupakan suatu peristiwa yang begitu penting bagi wajah dunia di mana negara-negara terpisah ke dalam blok, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Pada masa Perang Dingin tersebut Republik Rakyat Cina merupakan negara yang menjadi bagian dari Blok Timur yang berideologi komunis.

Hubungan Republik Rakyat Cina dan Amerika Serikat merupakan suatu hubungan yang sangat kompleks dan memiliki sejarah yang panjang. Sejak Cina dikuasai oleh Partai Komunis Cina (PKC) dan dinyatakan berdiri sebagai Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, negara ini tidak berhasil untuk memenangkan pengakuan dari Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Amerika Serikat tetap memberikan dukungannya untuk rezim nasionalis yang telah berhasil dikalahkan oleh Partai Komunis Cina. Selain karena perang ideologi, hubungan keduanya juga tidak terjalin dengan baik karena keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik yang terjadi antara Republik Rakyat Cina dan Taiwan.

Namun dalam perkembangannya di bawah kepemimpinan Mao Zedong mulai membuka diri terhadap negara non komunis pada akhir tahun 1960an. Republik Rakyat Cina kemudian berupaya agar dapat menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penulisan esai ini dapat dirumuskan rumusan masalahnya adalah: “Bagaimana Upaya Diplomasi Republik Rakyat China (RRC) dalam rangka menjalin hubungan Diplomatik dengan Amerika Serikat Pada masa perang dingin”.

Dimana pada saat Republik Rakyat Cina berdiri, pemerintah harus menghadapi permasalahan serius di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian terjadi krisis perekonomian yang menyebabkan inflasi dan pengangguran tinggi, Sehingga sampai akhirnya mendorong Republik Rakyat Cina memiliki keinginan yang kuat untuk mengakhiri permasalahan tersebut supaya rakyat dapat meningkatkan standar kehidupan mereka. Sampai akhirnya mendorong adanya perubahan yang perlu dilakukan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat pada masa Perang Dingin.

PEMBAHASAN

Republik Rakyat Cina didirikan pada 1 Oktober 1949 oleh Mao Zedong, yaitu pemimpin Partai Komunis Cina setelah berhasil mengalahkan Partai Kuomintang. Sementara itu, sebelum Republik Rakyat Cina dideklarasikan, Duta Besar Amerika Serikat John Leighton Stuart telah bertemu dengan para pemimpin komunis untuk membahas pengakuan Amerika Serikat.

Tetapi pembicaraan tersebut gagal karena Mao mengumumkan niatnya untuk bersandar ke arah sisi Uni Soviet. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pun segera mengeluarkan China White Paper yang menyatakan bahwa Amerika Serikat telah berhenti terlibat dalam perang saudara yang terjadi di Republik Rakyat Cina karena tidak dapat mempengaruhi hasilnya. Kemudian Amerika Serikat mendorong sekutunya untuk tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina.



**Mao Zedong pendiri Republik Rakyat Cina
pada 1 Oktober 1949**

Selain itu Amerika Serikat juga melarang warga Amerika Serikat untuk mengunjungi negara tersebut, serta menghentikan perdagangan dan merencanakan *embargo* internasional terhadap Republik Rakyat Cina. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih bertahan pada komitmen sebelumnya, yaitu Amerika Serikat hanya memberikan dukungan bagi pemerintahan nasionalis yang kemudian pergi mendirikan Taiwan.

Sebagai sebuah negara yang telah berdiri selama 22 tahun yaitu sejak tahun 1949, Republik Rakyat Cina belum mendapatkan pengakuan Amerika Serikat dalam organisasi internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pengakuan tersebut sangatlah penting sebagai bukti atas kedaulatan negara tersebut di mata dunia internasional. Adapun pengakuan Amerika Serikat dalam PBB masih diberikan kepada Taiwan yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek. Jika Republik Rakyat Cina mendapatkan pengakuan di PBB maka akan menjadi mudah bagi Cina untuk menggantikan posisi Taiwan dalam organisasi internasional PBB tersebut.

Berdasarkan keadaan di mana Republik Rakyat Cina tidak mendapatkan pengakuan Amerika Serikat dalam organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ini kemudian menjadi pertimbangan untuk berupaya menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.

Dalam melakukan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Republik Rakyat Cina melakukan langkah-langkah strategis diplomasi pertahanan (*soft power*) yang digunakan melalui diplomasi ping pong. Seperti sebutannya, yakni Diplomasi Ping-Pong merupakan suatu variasi diplomasi yang diawali dari pertandingan eksibisi olahraga ping-pong dan pada akhirnya membuka hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Cina. Bahwa ping pong dipilih sebagai langkah menjalin hubungan diplomatik antara Republik Rakyat Cina dan Amerika Serikat yang berawal dari suatu peristiwa di kejuaraan dunia tenis meja di Nagoya, Jepang, pada tahun 1971.

Di tengah suasana perang dingin di akhir tahun 1960-an, keberadaan atlet RRC dan AS bersama-sama dalam suatu tempat tentu saja menyedot perhatian. Dan saat ditanyai oleh para wartawan tentang apakah Cowan (salah satu kontingen AS) ingin berkunjung ke Cina maka dengan yakin Cowan menjawab “tentu saja”. Berita ini kemudian tersebar di media massa Jepang. lengkap dengan foto Zuang Zedong dan Cowan. Peristiwa inilah yang pada akhirnya mengawali hubungan diplomatik antar kedua Negara yang memiliki ideologi berbeda secara mendasar.

Hal ini dibuktikan dengan dikirimnya undangan kepada seluruh pemain AS dalam kejuaraan ping-pong di Nagoya untuk berkunjung ke Beijing oleh Perdana Menteri Mao Zedong dari tanggal 11-17 April 1971 untuk melakukan pertandingan eksibisi, berwisata ke Great Wall dan Summer Palace, serta menyaksikan pertunjukan ballet. Beliau juga memuji langkah Zhuang Zedong yang cakap tidak hanya sebagai pemain ping-pong, tetapi juga aksinya dalam pelaksanaan hubungan luar negeri dan memiliki pikiran politik yang terbuka.

Upaya Cina untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat juga terjadi karena ketika keadaan perekonomian sebuah negara memburuk, hal yang harus dilakukan adalah menjalin hubungan dengan negara-negara lain untuk dapat mengembalikan stabilitas ekonomi dalam negeri. Begitu pula halnya Republik Rakyat Cina, berupaya untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat agar embargo yang diterapkan dapat segera berakhir. Sehingga hubungan perdagangan maupun investasi antara kedua negara dapat dilakukan. Dan perekonomian Republik Rakyat Cina dapat kembali stabil.

Ditinjau dari analisis SWOT (kekuatan atau keunggulan, kelemahan atau kekurangan, peluang dan kendala) upaya diplomasi Republik Rakyat Cina terhadap Amerika Serikat terdapat Faktor Internal yang berupa Kekuatan atau keunggulan diantaranya Pengambilan keputusan mutlak pimpinan, dimana pada kepemimpinan Mao Zedong, apapun yang menjadi keputusannya mutlak tetap berada pada keputusannya tanpa dapat diganggu gugat. Termasuk dalam upayanya untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Kemudian, kepercayaan Rakyat kepada pimpinan, dimana pemimpin RRC melakukan strategi diplomasi melalui olahraga pingpong yang akhirnya dapat memainkan peran dalam kemampuan komunikasi yang efektif dalam melakukan upaya menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Sedangkan kelemahan atau kekurangan diantaranya Kepemimpinan yang ambisius dengan gaya otokrasi, dimana semua oposisi yang menentang Mao secara kejam ditekan dan siapapun yang dianggap mengancam Mao baik ideologi maupun kekuasaan Mao akan dilenyapkan. Kemudian Terjadinya Krisis pangan yang menyebabkan puluhan juta rakyat kelaparan merupakan permasalahan perekonomian Republik Rakyat Cina yang mendesak untuk diselesaikan. Hal ini terjadi dipengaruhi oleh embargo ekonomi penuh terhadap Republik Rakyat Cina yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutu Amerika Serikat.

Ditinjau dari Faktor Eksternal terdapat peluang dan kendala dalam upaya diplomasi Republik Rakyat Cina terhadap Amerika Serikat. Adapun dihadapkan pada Peluang yang ada antara lain salah satu keuntungan dari paham komunis adalah keputusan mutlak pimpinan. Keputusan para pemimpin akan mempengaruhi hubungan kedua negara, tanpa adanya gangguan baik dari dalam maupun tekanan dari negara komunis lainnya. Sehingga Jika Republik Rakyat Cina berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, terdapat kemungkinan bahwa Amerika Serikat segera mencabut embargo ekonomi penuh terhadap Republik Rakyat Cina. Selain itu Amerika Serikat merupakan negara yang dapat membuka peluang bagi Republik Rakyat Cina untuk memasarkan hasil produksinya baik di Amerika Serikat maupun ke berbagai negara lain. Kemudian dihadapkan pada peluang lainnya yaitu komunikasi dapat membangun citra publik yang menyebabkan adanya perbaikan hubungan antara kedua negara, dimana keberhasilan RRC dalam melakukan diplomasi dengan Amerika Serikat tidak terlepas dari komunikasi yang efektif sehingga mampu menjadikan kedua negara untuk melakukan diplomasi resmi setelah diawali oleh diplomasi ping-pong yang terjadi. Sedangkan Kendala dalam upaya diplomasi Republik Rakyat Cina terhadap Amerika Serikat antara lain pemerintah harus menghadapi berbagai permasalahan serius baik di bidang sosial, politik maupun ekonomi. Masyarakat dan pemerintah mengalami fragmentasi, kebijakan publik tidak dapat berjalan efektif yang mengakibatkan terjadinya krisis perekonomian serta kemunduran dalam bidang militer.

Dari analisis SWOT tersebut dapat dirumuskan beberapa strategi diantaranya: a) Strategi SO, meningkatkan pendapatan negara melalui upaya memperluas pasar atas hasil proses produksi yang dilakukan maupun melalui upaya untuk mendapatkan investasi asing ditengah krisis ekonomi yang dihadapi. b) Strategi WO, menerapkan beberapa program yang bertujuan untuk membangun Republik Rakyat Cina menjadi negara yang besar. c) Strategi ST, Republik

Rakyat Cina harus menyesuaikan kebijakannya agar dapat bersaing dan bisa menghadapi resiko gesekan dengan Amerika Serikat. d) Strategi WT, memperketat hambatan anggaran dengan mengendalikan pinjaman agar permasalahan ekonomi cepat teratasi.

Terkait solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan negara ditinjau dari perspektif komunikasi persuasif. Diplomasi tidak akan berjalan sesuai rencana ketika tidak ada komunikasi yang mendukung di dalam pelaksanaan diplomasi. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Dalam komunikasi, seorang komunikator publik harus mampu menunjukkan integritas. Integritas itu menepati janji dan dan memenuhi ekspektasi orang terhadap dirimu.

Berdasarkan keadaan perekonomian yang semakin memburuk, di mana salah satu penyebabnya adalah karena embargo Amerika Serikat kemudian terdapat upaya Mao Zedong untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Karena jika Republik Rakyat Cina berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, terdapat kemungkinan bahwa Amerika Serikat segera mencabut embargo ekonomi penuh maka tentu harapan Republik Rakyat Cina mengenai keadaan perekonomian yang memburuk tersebut dapat segera membaik dan kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi. Diketahui Bahwa diplomasi yang dilakukan Republik Rakyat Cina dengan Amerika Serikat mampu mempengaruhi keadaan kedua negara tersebut melalui diplomasi Ping-Pong sebagai upaya diplomasi yang dilakukan. Sehingga proses diplomasi antar kedua negara dapat dilakukan.

Adapun lesson learned (proses pembelajaran) yang didapat dari diplomasi pertahanan yang dilakukan Republik Rakyat Cina bersifat soft power. Dikaitkan dengan pertahanan, maka diplomasi pertahanan bisa bermakna sebagai suatu cara memenangkan kepentingan bangsa dengan menggunakan militer/pertahanan sebagai alat atau sumber

daya tanpa harus mengedepankan kekerasan sebagai jalannya. Diplomasi pertahanan juga bisa dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang utamanya dilakukan oleh perwakilan departemen pertahanan atau juga institusi pemerintah yang lainnya dengan tujuan untuk memenangkan kepentingan nasional di bidang keamanan dan pertahanan. langkah yang ditempuh menggunakan cara negosiasi dan instrumen diplomatik lainnya. Gregory Winger dalam tulisannya *The Theory of Defense Diplomacy* menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan merupakan suatu cara penggunaan militer bukan untuk kekerasan, seperti pertukaran perwira, kunjungan kapal perang, Latihan militer Bersama dalam rangka mencapai kepentingan internasional suatu negara.

Dikaitkan dengan diplomasi ping pong yang dilakukan Republik Rakyat Cina dengan Amerika Serikat. Cina menjadikan Olahraga Nasional untuk menjalankan misi diplomasi-nya. Salah satunya merujuk kepada pertukaran pemain tenis meja (ping-pong) antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina (RRC) pada awal 1970an. Diplomasi pingpong pertama terjadi pada tahun 1971 ketika pertandingan seorang pemain pingpong Republik Rakyat Cina dengan pemain pingpong AS berujung pada keputusan Tiongkok mengundangkan tim tenis meja AS untuk melakukan pertandingan persahabatan. Pertandingan tersebut akhirnya berujung pada kunjungan Presiden AS saat itu, Richard Nixon ke Tiongkok pada tahun 1972.

Kunjungan ini berlanjut pada terbentuknya ikatan diplomatik antara kedua negara mulai tahun 1979, yang juga mengakhiri isolasi Republik Rakyat Cina dari dunia luar. Maka di masa kepemimpinan Presiden AS Jimmy Carter dibuka hubungan diplomatik antara Amerika dan Cina pada 1 Maret 1979. Kedua negara pun membuka kedutaan besarnya masing-masing di Washington dan Beijing. Dengan pembukaan hubungan diplomatik ini, AS secara resmi mengakui RRC, mencabut pengakuannya terhadap Taiwan dan menganggap Taiwan sebagai bagian dari RRC.

KESIMPULAN

Perang Dingin merupakan suatu peristiwa yang begitu penting bagi wajah dunia di mana negara-negara terpisah ke dalam blok, yaitu Blok Barat dan Blok Timur.

Pada masa Perang Dingin tersebut Republik Rakyat Cina merupakan negara yang menjadi bagian dari Blok Timur yang berideologi komunis. Hubungan Republik Rakyat Cina dan Amerika Serikat merupakan suatu hubungan yang sangat kompleks dan memiliki sejarah yang panjang. Sejak Cina dikuasai oleh Partai Komunis Cina (PKC) dan dinyatakan berdiri sebagai Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, negara ini tidak berhasil untuk memenangkan pengakuan dari Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Namun dalam perkembangannya Republik Rakyat Cina yang berada di bawah kepemimpinan Mao Zedong mulai membuka diri terhadap negara non komunis pada akhir tahun 1960an. Republik Rakyat Cina kemudian berupaya agar dapat menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Keinginan Mao tersebut sangat bertentangan dengan keadaan yang terjadi pada saat itu di mana Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina merupakan pihak yang saling berlawanan satu sama lain. Dalam melakukan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Republik Rakyat Cina melakukan strategis diplomasi pertahanan melalui diplomasi ping pong. Seperti sebutannya, yakni Diplomasi Ping-Pong merupakan suatu variasi diplomasi yang diawali dari pertandingan eksibisi olahraga ping-pong dan pada akhirnya membuka hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Cina.

Diketahui bahwa diplomasi yang dilakukan Republik Rakyat Cina dengan Amerika Serikat mampu mempengaruhi keadaan kedua negara tersebut. Keputusan Republik Rakyat Cina melakukan langkah pembukaan diplomasi ini pada masa kepemimpinan Richard Nixon sebagai Presiden Amerika. Sehingga proses diplomasi antar pemerintah pun dapat dilakukan. Setelah diawali oleh diplomasi ping-pong dan kemudian dilanjutkan dengan diplomasi resmi antar pemerintah Republik Rakyat Cina dan Amerika Serikat, kemudian hubungan diplomatik resmi antara kedua negara dapat terjalin pada tahun 1979.

Kompil Indra Ranudikarta, S.I.K., M.Si. adalah
Abituren Pendidikan Regular LXI SESKOAD TA 2021



DIPLOMASI PERTAHANAN NEGARA REPUBLIK MALI DALAM PENERAPAN PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAHNYA

Letkol Inf Irianto H. Pasaribu

Pendahuluan

Republik Mali (bahasa Prancis: *Republique du Mali*) adalah sebuah negara yang terkurung daratan (*landlocked country*) di Afrika Barat, sebelumnya merupakan jajahan Prancis. Negara terbesar kedua di Afrika Barat ini berbatasan dengan Aljazair di sebelah utara, Niger di timur, Burkina Faso dan Pantai Gading di selatan, Guinea di barat daya, serta Mauritania di barat. Perbatasannya di sebelah utara memanjang ke tengah gurun Sahara. Mayoritas penduduknya tinggal di wilayah selatan, di mana terdapat Sungai Niger dan Senegal. Negara yang dahulunya bernama Sudan Prancis ini mengambil namanya dari Kekaisaran Mali. Kekaisaran Mali menjadi pusat perdagangan emas yang membuat pemimpinnya Mansa Musa menjadi salah satu orang terkaya dalam sejarah.

Mansa Musa adalah seorang muslim yang taat sehingga dia menjalankan ibadah ke Mekkah. Dalam perjalanannya dia membawa banyak budak, emas, dan pengawal berkain sutra. Dia membagikan emasnya ke orang-orang miskin yang dilaluinya. Secara tak sadar, donasinya ini menyebabkan harga emas di Timur Tengah menjadi turun drastis. Kota yang paling terkenal di Mali adalah Timbuktu yang terkenal sebagai salah satu pusat perdagangan di Afrika pada abad ke-14 sampai 16 pada zaman Kekaisaran Mali.

Barang yang diperdagangkan antara lain garam, emas, gading, dan budak. Selain itu, kota ini juga dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran dan pendidikan Islam di Afrika dengan berdirinya Universitas Timbuktu. Timbuktu pada masa kejayaannya merupakan bagian dari Kekaisaran Mali. Kota lain yang terkenal adalah Djenne yang terdapat Masjid Raya Djenne yang terbuat dari lumpur. Masjid ini dimasukkan dalam lambang negara Mali dan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Pada 20 Desember 2012, untuk membantu Mali merebut kembali wilayah utara negeri itu yang kini dikuasai kelompok pemberontak Islam, Dewan Keamanan PBB, menyetujui pengiriman pasukan militer Afrika. Pemberontak Tuareg dan kelompok militan Islam yang terkait Al-Qaeda memanfaatkan kudeta pada Maret lalu untuk menguasai wilayah utara yang luas.

Konflik di Mali telah lama terjadi dan dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris. Negara ini digolongkan sebagai salah satu negara "*weak state*" karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan di negara tersebut. Hal tersebut mendorong pemerintahan Mali untuk meminta bantuan lebih lanjut kepada PBB. Menanggapi hal tersebut, PBB membentuk sebuah organisasi perdamaian untuk Mali yang disebut dengan MINUSMA untuk

membantu menangani konflik atau permasalahan yang terjadi di negara tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh MINUSMA dalam menjalankan mandatnya dari tahun 2013 hingga 2018. Namun, konflik masih terjadi hingga tahun 2018 ini. Konflik yang terjadi di Republik Mali merupakan konflik vertikal yang melibatkan pemerintahan Mali dengan kelompok masyarakatnya. Konflik ini menjadi rumit karena terjadi berkepanjangan tanpa adanya solusi pemecahan. Efek konflik berkepanjangan di Mali jelas berdampak luas baik terhadap kelangsungan hidup negara dan masyarakat Mali serta berefek terhadap negara-negara tetangga.



Berdasarkan permasalahan diatas maka penting kiranya untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Mali serta menganalisis strategi diplomasi dan negosiasi yang digunakan dalam penyelesaian konflik di Mali. Metode analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah diskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan studi pustaka.

PEMBAHASAN

Munculnya beragam konflik dalam tatanan dunia memunculkan sebuah pemikiran bahwa perlunya sebuah badan yang bertindak untuk mencegah dan maupun menghentikan konflik. Kesadaran ini menumbuhkan keinginan masyarakat dunia untuk membangun kembali kerjasama internasional dan upayaupaya penyelesaian konflik serta permasalahan-permasalahan internasional lainnya. Perang merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan masalah, karena peperangan hanya menimbulkan banyak kerugian bagi negara

serta mengganggu negara lain di luar negara yang berkonflik. Hal ini menjadi latar belakang dari negara-negara lain untuk turut serta dalam penyelesaian konflik di suatu negara guna mencegah serta meminimalisir dampak dari adanya peperangan. Disinilah peran penting diplomasi dan negosiasi dalam mencegah terjadinya perang.

Namun demikian, jalan penyelesaian diplomasi antar negara terkadang menemui jalan buntu hingga berakhir dengan peperangan. Kerumitan penyelesaian konflik dipengaruhi juga oleh beragam faktor yang menjadi penyebabnya hingga beragam cara dan strategi dalam menyelesaikan konflik.

Terjadinya konflik atau peperangan memiliki beragam faktor penyebab. Penyebab terjadinya konflik menurut beberapa teori sebagai berikut

1. **Teori Hubungan Masyarakat.** Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. **Sasaran yang ingin dicapai** teori ini:
 - a. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik.
 - b. Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.
2. **Teori Negosiasi Prinsip.** Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. **Sasaran yang ingin dicapai** teori ini adalah:
 - a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.
 - b. Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.
3. **Teori Kebutuhan Manusia.** Berasumsi

Bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. **Sasaran yang ingin dicapai** teori ini adalah :

- a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan Bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.
- b. Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

4. Teori Identitas. Berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. **Sasaran yang ingin dicapai** teori ini adalah :

- a. Melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.
- b. Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

5. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya.

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. **Sasaran yang ingin dicapai** teori ini adalah :

- a. Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain.
- b. Mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain.
- c. Meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.

6. Teori Transformasi Konflik. Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidak-adilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah :

- a. Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidak-adilan, termasuk kesenjangan ekonomi.
- b. Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik.
- c. Mengembangkan berbagai proses dan system untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

Sejarah konflik panjang antara Pemerintah Mali dengan kelompok pemberontak National Movement for the *Liberation of Azawad* (MNLA) dimulai sejak 1961 yaitu tahun setelah Mali merdeka dari Perancis.

Pemberontakan etnis Tuareg dikarenakan tidak setuju atas sistem pemerintahan negara Mali yang melarang etnis Tuareg untuk tinggal dan bekerja di luar wilayah Azawad. Kebijakan pemerintah Mali di anggap mendiskriminasi etnis Tuareg dan hal ini yang menjadi akar permasalahan awal banyaknya pemberontakan di Mali. Pemberontakan tersebut masih bisa di-tangani oleh pihak pemerintah Mali. Semenjak itu diberlakukan undang-undang darurat militer dan seluruh penduduk sipil dilarang mendekati daerah Azawad. Pada awal tahun 1970 hingga akhir 1980-an daerah Mali mengalami kekeringan dan kondisi ini menyebabkan banyak etnis Tuareg mengungsi ke negara-negara tetangga seperti negara Libya, sehingga mereka direkrut oleh militan Libya (*Legium Islam*) dan disinyalir mempersenjatai dan mendidik ilmu kemiliteran.

Pada akhirnya etnis Tuareg melakukan pemberontakan di Mali sekitar tahun 1991. Namun pemberontakan ini masih bisa diredam oleh pemerintah Mali. Alpha Konare sebagai Presiden Mali memberikan otonomi kepada Azawad guna meredakan konflik untuk beberapa waktu.

Perkembangan konflik selanjutnya adalah pada tahun 1992 merupakan Pemilu pertama di Mali. Pemberontakan secara fisik tidak terjadi namun terjadi gesekan dalam urusan politik.

Pada awal tahun 2006, sebagai efek dari konflik politik pemerintah Mali menyetujui pemberian otonomi daerah bagian Padang Pasir Utara (daerah Azawad) sebagai tuntutan dari etnis Tuareg. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 2007 hingga 2009 banyak dari pasukan Tuareg yang dahulunya adalah anggota "*Legium Islam*" ikut menjadi partisipan dalam konflik di Libya. Setelah konflik di Libya selesai pada tahun 2011 tentara-tentara "*Legium Islam*" yang berasal dari Mali khususnya daerah Azawad kembali ke daerah Azawad dan merencanakan untuk membuat negara baru yang bernawa Azawad. Pada Januari 2012, para pemberontak dari daerah Azawad yang di sebut sebagai *National Movement for the Liberation of Azawad* (MNLA) melakukan kampanye agar pemerintah Mali segera memberikan kemerdekaan atas Azawad. Tuntutan tersebut tidak mungkin disetujui oleh pemerintah Mali karena 60% wilayah Mali adalah daerah Azawad. Konflik Mali semakin komplek dengan munculnya kudeta militer *National Committee for the Restoration of Democracy and State (CNRDR)* terhadap Presiden Mali Amadou Toumani Toure, pada bulan Maret 2012.



Presiden Mali Amadou Toumani Toure

Peristiwa ini dipicu karena pemerintah dianggap tidak mampu menangani permasalahan dan pemberontakan yang terjadi. Efek kudeta mengakibatkan minimnya kontrol terhadap otonomi daerah karena

hanya dipimpin oleh Presiden dan Menteri sementara. Lemahnya politik pemerintahan pasca kudeta dimanfaatkan oleh MNLA untuk melakukan pemberontakan dan pada 6 April 2012 dan pemerintahan Mali harus kehilangan Azawad (Mali utara) yang jatuh di tangan MNLA.

Keberhasilan pemberontakan MNLA dibantu oleh beberapa kelompok lain yaitu *Islam Ansar Dine*, *Al-Qaida in the Islamic Maghreb* (AQIM), dan *the Movement for Unity and Jihad in west Africa* (MUJAO). Pada dasarnya, kelompok-kelompok tersebut membantu MNLA dalam memerdekakan Azawad dengan tujuan ingin mengatur pemerintahan Azawad dengan hukum-hukum Islam dalam segala aspeknya. AQIM dan MUJAO adalah kelompok-kelompok yang muncul untuk Menegakan syariat Islam di sebagian Mali utara yaitu Kidal Gao dan Timbuktu (Angelia, 2013).

Setelah berakhirnya pertempuran dengan Angkatan Darat Mali, MNLA dan Islamis terus menyatukan visi mereka yang saling bertentangan untuk negara baru tersebut. Pada tanggal 27 Juni Islamis MOJWA bertempur dengan MNLA dalam Pertempuran Gao, melukai sekretaris Jenderal MNLA Bilal Acherif dan mengambil alih kota Gao. Pada 17 Juli 2012, MNLA kehilangan kontrol atas kota-kota di Mali utara yang saat ini diambil alih Islamis.

Ditinjau dari keterlibatan aktor-aktor dalam konflik di Mali maka konflik di Mali cukup rumit dan berkembang karena banyak aktor terlibat. Awal konflik bersumber dari permasalahan atau konflik internal negara dan pada akhirnya berkembang menjadi konflik eksternal dengan masuknya negara luar yang terlibat dalam konflik. Hal ini sesuai pandangan Soerjono Soekanto bahwa konflik internal terjadi antar masyarakat dalam sebuah negara karena adanya perbedaan pendapat, cara pandang, tujuan dan berupaya memaksakan kehendaknya sehingga ada pihak yang terancam.

Posisi pendukung dari MNLA dianggap memiliki kekuatan yang cukup kuat yaitu AQIM dan MUJAWO sebagai kelompok berkepentingan berbasis Islam yang memiliki keterkaitan dengan Al-Qaeda.

Sedangkan dari sisi pemerintahan Mali banyak mendapat dukungan dari Prancis berupa kekuatan militer tambahan. Ketika MNLA mengancam akan menuju ke Bamako pada awal 2013, Prancis merespons dengan mengirim pasukan untuk merebut kembali kendali atas kota-kota utara Mali (Operasi Serval). Intervensi Prancis ini tidak berhasil menghilangkan konflik, namun kelompok Jihad hanya mundur untuk mengatur strategi dan Kembali menyerang misi penjaga perdamaian PBB MINUSMA, serta pasukan Mali dan Prancis dengan sasaran warga sipil di ibukota Bamako. Keterlibatan Amerika dalam konflik Mali terlihat dari dukungan dan bantuan Tindakan intervensi yang dilakukan oleh Prancis (Omba, 2008).

Posisi kekuatan Amerika dan Prancis sudah tidak bisa diragukan karena ke dua negara tersebut anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB Konflik vertikal yang terjadi di Mali sebaiknya diambil jalan penyelesaian secara negosiasi intern yaitu antara pemerintah dan kelompok pemberontak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pihak ke-3 yang ikut campur urusan dalam negeri.

Adanya pihak ke-3 sulit untuk menilai netralitas mereka atas bantuan dukungan yang diberikan. Timbulnya fenomena penyimpangan adalah hadirnya pihak ke-3 sebagai penengah yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik dengan menjadi penengah namun kehadiran pihak ke-3 malah menimbulkan permasalahan baru sehingga konflik menjadi berkepanjangan.

Berdasarkan data dan fakta diatas dapat diketahui bahwa konflik terjadi karena adanya tekanan dari pihak pemberontak kepada pemerintah akibat adanya diskriminasi kepada etnis Tuareq. Hal ini sesuai dengan teori identitas, yaitu terjadinya konflik karena terancamnya identitas karena hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.

Sedangkan sesuai teori kebutuhan manusia, yaitu konflik disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia baik fisik, mental dan sosial berupa keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi yang sering menjadi inti terjadinya konflik.

Clausewitz menggagas tiga konsep dasar yang terkenal yang disebut *Three Dimensions of Wondrous Trinity*, yaitu adanya aksi sebagai aktualisasi dari perang yang merupakan kelanjutan dari kebijakan politik. Aksi disini menjurus pada konfrontasi fisik antara pihak yang berselisih. Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan secara internal namun belum menemukan kesepakatan. Kendala dalam penyelesaian konflik ini dipengaruhi oleh kehadiran pihak-pihak lain yang terlibat dalam konflik sehingga menjadikan permasalahan berkembang semakin rumit.

Keterlibatan pihak ke-3 baik kelompok maupun aktor negara masing-masing memberikan dukungan kepada pihaknya. Pemerintah Mali didukung oleh negara Prancis, sedangkan Prancis sendiri didukung oleh Amerika. Sehingga pemerintah Mali memiliki dukungan yang kuat, sedangkan kelompok pemberontak (MNLA) hanya mendapat dukungan dari militansi Islam Palestina namun memiliki sikap yang keras dalam mendukung kemerdekaan Awazad.

Berdasarkan kondisi diatas, dapat diambil jalan penyelesaian yaitu :

1. Memperjelas akar konflik dengan mengembalikan permasalahan kepada intern Mali yaitu negosiasi antara pemerintah Mali dengan kelompok MNLA dengan meniadakan kehadiran pihak ke-3 sebagai upaya menghilangkan kendala dalam penyelesaian konflik. Kehadiran pihak ke-3 disinyalir menjadi menghambat dalam mewujudkan kesepakatan pihak konflik, karena memiliki maksud dan tujuan tersendiri untuk mengambil keuntungan dari adanya konflik.
2. Negosiasi membahas inti permasalahan utama yaitu adanya keinginan Awazad untuk diberikan otonomi dan menghapuskan sikap pemerintah yang diskriminasi terhadap etnis Tuareq. Hal ini dimungkinkan karena adanya peluang yaitu pemerintah Mali sudah berupaya memberikan otonomi kepada Awazad namun pihak MNLA meminta wilayah yang lebih luas. Negosiasi ini harus dibangun Kembali dalam upaya menciptakan kedamaian di Mali sehingga membawa

Manfaat positif bagi semua pihak. Peran diplomasi dan negosiasi menjadi hal penting sebagai salah satu jalan damai dalam penyelesaian sebuah konflik.

Hal ini sesuai dengan *system balance of power* yang menyediakan berbagai alternatif bagi para *policy makers*, apakah memilih perang atau berusaha menyelesaikan konflik melalui cara-cara yang *acceptable* melalui negosiasi. *Sistem balance of* diantara keteraturan dunia (*world power* juga bisa dianggap berada *order*) dan kekacauan internasional (*international chaos*).

Keteraturan dunia (*world order*) sehingga membutuhkan suatu otoritas pusat yang cukup mampu menetapkan suatu tata tertib bagi aktor-aktor politik. Penyelesaian konflik di Mali yang rumit pada akhirnya menempuh jalan diplomasi dan negosiasi. *Human Rights Watch* (HRW) mendesak perjanjian damai di Mali Utara. Pemerintah Mali menandatangani perjanjian pendahuluan dengan sebagian kelompok separatis di utara Mali.

Aliansi pemberontak Tuareg meliputi Gerakan Nasional Pembebasan Azawad (MNLA) menghadiri acara perjanjian, namun pemberontak Tuareg dan kelompoknya menahan karena meminta konsesi lebih besar.

Perjanjian damai yang selama ini dibuat untuk mengakhiri krisis militer dan konflik di Mali Utara tidak cukup mengatasi kebutuhan keadilan bagi warga sipil di Mali Utara. Pada akhir 2014 Menlu Aljazair menyatakan tim mediasi internasional telah menghasilkan rancangan perjanjian damai dan dimotori oleh Misi Penjaga Perdamaian PBB.

Aktor-aktor yang terlibat dalam perjanjian di Algiers 2015 adalah 1) Pemerintah Mali; 2) aliansi milisi pro pemerintah yang dikenal sebagai *Plateforme*, dan 3) Koordinasi Gerakan Azawad (CMA), sebuah koalisi kelompok yang mencakup etnis Arab dan Tuareg.

Namun ada kelompok lain memboikot perjanjian dan menuntut dilibatkan dalam proses, seperti kelompok *des Mouvements de Entente* (CME), serta faksi lain dari *Mouvement pour le Salut de Azawad* (MSA).

Berbagai kelompok bersenjata dan milisi lainnya juga menuntut akses ke beberapa manfaat dari perjanjian tersebut, khususnya program Pelucutan Senjata, *Demobilisasi*, dan *Reintegrasi (DOR)* yang akan menjamin manfaat ekonomi dan kemungkinan reintegrasi ke dalam pasukan pertahanan dan keamanan Mali.

Penandatanganan perjanjian perdamaian di Algiers pada Juni 2015 ternyata tidak cukup memperbaiki situasi di Mali. MINUSMA sebagai misi penjaga perdamaian PBB terbesar di dunia belum berhasil mengembalikan otoritas negara. Berbagai konflik telah terjadi sejak perjanjian ditandatangani. Kelompok-kelompok Jihadis telah tumbuh dan menyebar ke Burkina Faso dan Niger, dan konflik-konflik lokal juga telah merebak dengan cara-cara baru. Sampai detik ini, Mali masih terus dihantui dengan rasa tidak aman. Upaya penegakkan hukum di Mali juga terkendala karena para hakim takut melakukan investigasi karena adanya intimidasi dari kelompok jihad. Kelompok jihadis kerap kali melakukan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap para hakim. Sebagai gantinya, kelompok jihad membentuk sistem peradilan paralel yang menghancurkan infrastruktur penegakan hukum di kawasan Mali Utara.

Berdasarkan cara penyelesaian diplomasi damai dalam kasus konflik di Mali belum mampu menampung inspirasi pihak yang berkonflik, sehingga menyikan konflik selanjutnya. Negosiasi yang diambil adalah kalah-kalah yaitu pemerintah memberikan otonomi dan pemberontak belum mencapai apa yang diinginkan sehingga kedua belah pihak belum mencapai hasil yang diinginkan. Upaya damai yang ditawarkan hendaknya mampu menampung aspirasi dari kedua belah pihak. Menciptakan konsesi yang saling menguntungkan akan lebih bernilai dengan membuka kemungkinan kedua belah pihak membuat konsesi yang harganya sedikit dengan imbalan keuntungan yang memiliki nilai lebih besar. Hal ini dapat berarti bahwa konsesi mungkin berbeda nilai untuk masing-masing pihak. Penyelesaian konflik di Mali sebetulnya sudah diupayakan dengan berbagai cara serta melibatkan berbagai pihak hingga

menghadirkan PBB dalam upaya mewujudkan perdamaian di Mali.

Kehadiran berbagai pihak ke-3 seharusnya sudah dapat menyelesaikan konflik di Mali, namun kenyataannya konflik terus terjadi meskipun perjanjian perdamaian sudah disepakati dan ditandatangani oleh ke-2 belah pihak. Sesuai teori bahwa kehadiran pihak ke-3 baik secara personil maupun NGOs hingga NGOs dapat menjadi mediator dalam penyelesaian konflik. Namun fenomena kasus konflik di Mali yang terjadi berbalik dengan teori yang ada yaitu konflik menjadi rumit dengan kehadiran pihak ke-3. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya aspirasi dari pihak yang berkonflik. Hal ini sesuai dengan teori kebutuhan manusia, yaitu konflik disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia baik identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi. Adanya ketimpangan tersebut maka kelompok MNLA berupaya membangun kekuatan sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah Mali. Hal ini sesuai dengan teori *balance of power* bahwa suatu negara akan memperkuat kekuatannya untuk menjaga identitasnya.

Upaya negosiasi damai masih menemui kendala dan kelemahan yaitu adanya aspirasi dari pihak berkonflik yang belum terwadahi sehinggakesepakatan damai yang terjadi tidak dianggap atau diabaikan. Hal ini dapat terjadi jika proses negosiasi damai yang dilaksanakan sarat dengan tekanan dari pihak yang lebih kuat dalam hal ini pemerintah Mali beserta pendukungnya. Adanya kehadiran pihak ke-3 dalam proses damai dengan sikap yang tidak netral menjadi kelemahan dalam proses perdamaian di Mali.

Berdasarkan kondisi diatas, dapat diambil jalan penyelesaian konflik dengan jalan damai yaitu: 1) Membangun negosiasi damai antar pihak yang berkonflik dalam situasi persahabatan dengan saling menghormati; 2) Negosiasi damai dapat dilakukan oleh dua belah pihak tanpa menghadirkan pihak ke-3 guna menjamin netralitas; 3) saling menghormati dengan mendudukan kesamaan derajat sehingga tidak ada yang merasa benar dan kuat sehingga menimbulkan tekanan dalam proses negosiasi damai. Hal ini memanfaatkan peluang bahwa kedua belah pihak yang berkonflik punya itikad baik untuk menyelesaikan secara damai.

Penutup

Konflik vertical di Mali yang berkepanjangan antara pemerintah Mali dengan kelompok pemberontak dari daerah Azawad (MNLA) yang menuntut kemerdekaan bagian Azawad (etnis Tuareg). Konflik Mali semakin kompleks dengan munculnya kudeta militer terhadap Presiden Mali karena pemerintah dianggap tidak mampu menangani permasalahan dan pemberontakan yang terjadi. Beberapa kali diadakan kesepakatan namun tidak membuahkan hasil positif. Hal ini juga dipicu adanya campur tangan pihak ke-3 dalam konflik. Pemerintahan Mali didukung negara Prancis yang mendapat persetujuan dari Amerika. Sedangkan sebagai *counter of power* dari kelompok MNLA mendapat dukungan dari militansi Islam AQIM dan MUJAWO agen dari Al Qaeda yang memiliki agenda tersendiri atas bantuannya ke MNLA.

Lesson learned dari kasus konflik di Mali bahwa konflik vertikal dapat dipicu karena adanya diskriminasi atas identitas, pengakuan, maupun partisipasi dari warga negara. Sedangkan penyelesaian konflik dengan menghadirkan pihak ke-3 terkadang justru menambah persoalan baru karena adanya sikap tidak netral dari actor mediator yang mempunyai maksud tersendiri dengan memanfaatkan situasi konflik. Solusi untuk mengakhiri konflik di Mali dapat ditempuh dengan jalan :

1. Memutus kehadiran semua pihak luar dari konflik vertical di Mali guna menguraikan permasalahan konflik agar tidak menjadi bias;
2. Proses negosiasi intern antara pemerintah dan kelompok MNLA dilaksanakan secara *friendly negotiation* yaitu mengutamakan rasa saling menghormati atas dasar kesamaan hak yang dapat mengakomodir keinginan dari kedua belah pihak.
3. Penyelesaian konflik ini dilaksanakan dengan konsep menang-menang dengan *win-win solution* yaitu memberikan peluang kepada kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan dengan adanya kesepakatan atas solusi bersama sehingga kedua belah pihak dapat menerima dan komitmen untuk melaksanakan dengan itikad baik dan bertanggungjawab.



DIPLOMASI DAN NEGOSIASI MESIR DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN ISRAEL

Mayor Inf Dian Aksmiyandita

Pendahuluan

Hubungan internasional dapat dicirikan sebagai dunia dimana negara-negara bekerjasama satu sama lain untuk memelihara perdamaian dan kebebasan serta mengejar perubahan progresif. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerja sama internasional, yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Sedangkan Kerjasama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan antara dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Kerjasama antar negara biasanya didahului oleh pengakuan secara *de facto* dan *de jure* dari satu negara terhadap negara lain. Mesir atau Republik Arab Mesir adalah negara sosial demokrasi berbentuk republik, dengan kepala negara seorang presiden. Secara geografis, Mesir merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Afrika Utara dengan iklim yang panas. Namun, apabila dilihat dari sudut sejarah dan kebudayaannya, Mesir merupakan bagian dari Asia Barat. Wilayah Mesir banyak dikelilingi oleh gurun pasir yang tandus.

Hanya sebagian kecil wilayah Mesir yang cocok untuk pertanian. Salah satu kekayaan yang menjadi unggulan bagi Mesir adalah Sungai Nil, sekaligus sebagai pendukung kebudayaan Mesir sejak masa silam.

Keberadaan Mesir memiliki arti penting bagi dunia internasional, karena kebudayaan Mesir menjadi tolak ukur perkembangan kebudayaan di dunia. Keberuntungan itu semua tidak terlepas dari wilayah Mesir yang merupakan gerbang penghubung tiga benua: Asia, Afrika, dan Eropa. Hal ini membuat Mesir memiliki letak yang strategis, dan bangsa asing dengan mudah dapat masuk sekaligus menanamkan pengaruhnya kepada Mesir baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Mesir bukan merupakan negara yang kaya, apabila dilihat dari sektor ekonominya. Perekonomian Mesir tergantung pada sektor pertanian, ekspor minyak bumi, dan pariwisata. Selain itu, lebih dari 3.000.000 jiwa orang Mesir bekerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi, Teluk Persia, dan Eropa. Populasi yang tumbuh pesat, keterbatasan lahan pertanian, dan ketergantungan pada Sungai Nil membuat sumber daya ekonomi Mesir melemah.

Namun kenyataannya, Keadaan Mesir yang semakin terpuruk membuat kemunduran di berbagai bidang masyarakat Mesir baik dalam segi politik, sosial, dan ekonomi di bawah pemerintahan Raja Farouk.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan peran dan campur tangan Inggris yang selalu bercokol di Mesir. Situasi kian genting menjelang bulan Juni 1967. Israel mengulangi pernyataan pasca-1956 bahwa penutupan Selat Tiran bagi industri pelayarannya akan menjadi casus belli.

Pada bulan Mei, Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir memaklumkan penutupan selat bagi kapal-kapal Israel, lalu mengerahkan angkatan bersenjata Mesir untuk berjaga-jaga di sepanjang tapal batas Israel. Pada tanggal 5 Juni, Israel melancarkan serangan yang diklaimnya sebagai serentetan serangan udara dini terhadap lapangan-lapangan terbang Mesir. Klaim-klaim dan klaim-klaim tandingan yang berkaitan dengan rentetan peristiwa ini merupakan salah satu dari sekian banyak kontroversi seputar Perang Enam Hari. Mesir sama sekali tidak menduga serangan Israel, sehingga hampir seluruh kekuatan tempur udara Mesir binasa, sementara kekuatan tempur udara Israel hanya mengalami sedikit kerugian. Keadaan ini menjadikan Israel lebih unggul di udara. Pada saat yang sama, Israel juga melancarkan serangan darat ke daerah Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai, yang juga tidak disangka-sangka oleh Mesir. Setelah bertahan menghadapi gempuran Israel selama beberapa waktu, Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir, memerintahkan evakuasi dari Semenanjung Sinai. Pasukan Israel bergerak cepat ke arah barat, memburu dan menghancurkan pasukan Mesir yang sedang ditarik mundur, dan berhasil menguasai Semenanjung Sinai.



Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan konflik di Negara Mesir dengan Negara Israel yang tentunya berdampak terhadap pemerintahan Mesir harus segera diidentifikasi dan di analisa untuk memperoleh nilai pembelajaran Diplomasi dan negosiasi pada masa kini dan masa depan. Menurut Teori MPP (Metode Pemecahan Permasalahan) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali masalah serta menetapkan tujuan pemecahannya. Hal ini diawali dengan mencari/mengidentifikasi tentang pokok permasalahannya yaitu tentang latar belakang proses pelaksanaan diplomasi dan negosiasi negara Mesir dalam menyelesaikan permasalahan konflik antar Negara dan langkah strategis yang diambil.

Dari uraian permasalahan di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu : "Bagaimana proses pelaksanaan diplomasi dan negosiasi Mesir dalam upaya penyelesaian Konflik dengan israel?".

Agar cara berfikir Penulis dapat dipahami secara baik oleh pembaca maka penulis berusaha memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, proses pelaksanaan diplomasi dan negosiasi Mesir dalam Menyelesaikan permasalahan konflik antar Negara yang dibantu dengan referensi-referensi yang ada serta menganalisisnya melalui metode penulisan deskriptif analisis dan studi kepustakaan.

Pembahasan

Setelah mengidentifikasi permasalahan dan menemukannya, maka menurut teori MPP langkah selanjutnya adalah mempersempit permasalahan sampai ke tingkat



Peta Wilayah Mesir dan Israel

yang dapat diteliti oleh Penulis. Penyempitan masalah pada latar belakang pelaksanaan diplomasi dan negosiasi Mesir dalam menyelesaikan permasalahan konflik antar Negara dan Langkah-langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi dan negosiasi tersebut sehingga perlu dilakukan analisa dengan cara menggali lebih dalam tentang hal tersebut.

Disini Penulis menggunakan teori Kerlinger (1986) sehingga ditemukan inti permasalahan yang harus dipecahkan yaitu latar belakang pelaksanaan diplomasi dan negosiasi Mesir dalam menyelesaikan permasalahan konflik dengan Negara Israel serta langkah-langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi dan negosiasi tersebut ditinjau dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi. Sesuai dengan metoda MPP, maka setiap permasalahan tersebut harus dihilangkan.

Latar belakang pelaksanaan diplomasi dan negosiasi Mesir dalam upaya penyelesaian Konflik dengan Israel

Selepas Krisis Suez pada tahun 1956, Mesir menyetujui penempatan Pasukan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEF) di Semenanjung Sinai untuk memastikan semua pihak yang pernah bertikai benar-benar menaati Kesepakatan Gencatan Senjata 1949. Setahun kemudian, mulai marak terjadi keributan kecil antara Israel dan jiran-jiran Arabnya, terutama Suriah.

Pada awal bulan November 1966, Suriah menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama dengan Mesir. Tak seberapa lama sesudah penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama itu, Angkatan Pertahanan Israel (API) menyerbu desa As-Samu di daerah Tepi Barat yang dikuasai Yordania sebagai aksi balasan terhadap aktivitas gerilya Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), termasuk sebuah serangan ranjau darat yang merenggut tiga korban jiwa. Pasukan Yordania yang maju menghadapi Israel dapat dipukul mundur dalam waktu singkat. Raja Yordania, Hussein, mengecam Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir, karena tidak datang membantu Yordania, dan malah "sembunyi di balik rok UNEF".

Pada bulan Mei 1967, Presiden Gamal Abdul Nasir menerima laporan palsu dari Uni Soviet bahwa Israel sedang mengerahkan pasukan secara besar-besaran ke tapal batas Suriah. Presiden Gamal Abdul Nasir mulai mengerahkan pasukan mesir dalam dua barisan pertahanan ke tapal batas Israel di Semenanjung Sinai pada tanggal 16 Mei, mengusir pasukan UNEF dari Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai pada tanggal 19 Mei, dan mengambil alih posisi UNEF di Syarmus Syaikh, kota di atas tebing yang menghadap ke Selat Tiran. Israel mengulangi maklumat yang pernah diutarakannya pada tahun 1957 bahwasanya segala bentuk tindakan penutupan selat akan dianggap sebagai tantangan perang terhadap Israel maupun akan dijadikan dalih oleh Israel untuk maju berperang, tetapi Presiden Gamal Abdul Nasir tetap menutup Selat Tiran bagi kapal-kapal Israel pada tanggal 22–23 Mei.

Seusai Perang Enam Hari, Presiden Amerika Serikat, Lyndon Johnson, berkomentar sebagai berikut "Jika ada satu tindakan tolol yang lebih pantas disebut sebagai biang keladi prahara ini dibanding tindakan-tindakan lain, maka tindakan itu adalah pengumuman keputusan sepihak yang terkesan mencabar bahwasanya Selat Tiran akan ditutup. Hak lintas damai di laut harus dipertahankan bagi segala bangsa", Pada tanggal 30 Mei, Yordania dan Mesir menandatangani sebuah pakta pertahanan bersama. Keesokan harinya, atas undangan Yordania, Angkatan Darat Irak mulai mengerahkan serdadu dan kendaraan tempur ke Yordania. Pasukan ini kemudian diperkuat lagi oleh sepasukan kontingen Mesir. Pada tanggal 1 Juni, Israel membentuk pemerintahan persatuan nasional dengan memperluas kabinet, dan pada tanggal 4 Juni memutuskan untuk maju berperang. Keesokan paginya, Israel melancarkan Operasi Fokus, serangan udara dadakan berskala besar yang mengawali Perang Enam Hari.

Sebelum perang, para pilot dan petugas lapangan terbang Israel telah menjalani pelatihan ekstensif agar cekatan mereparasi pesawat-pesawat tempur yang kembali dari aksi serangan udara, sehingga memungkinkan

satu unit pesawat tempur untuk lepas landas sebanyak empat kali dalam sehari. Di lain pihak, pesawat tempur angkatan udara negara-negara Arab lazimnya cuma sekali atau dua kali lepas landas dalam sehari. Pelatihan ini memungkinkan Angkatan Udara Israel (AUI) untuk melancarkan serangan udara dalam beberapa gelombang terhadap lapangan-lapangan terbang Mesir pada hari pertama perang, melumpuhkan Angkatan Udara Mesir, dan menggempur angkatan udara negara-negara Arab yang lain pada hari yang sama.

Keunggulan ini telah membuat pihak Arab meyakini bahwa AUI dibantu oleh angkatan udara negara-negara asing. Para pilot Israel ditatar secara mendalam mengenai sasaran-sasaran mereka, dipaksa menghafal setiap detail informasi, dan berulang kali melakukan uji coba serangan udara terhadap lapangan-lapangan terbang palsu secara rahasia. Mesir telah mendirikan pangkalan-pangkalan pertahanan di Semenanjung Sinai atas dasar asumsi bahwa Israel akan menyerang lewat segelintir jalan lintas Sinai, alih-alih melalui medan yang sukar dijelajahi. Israel memutuskan untuk menghindari risiko menggempur pangkalan-pangkalan pertahanan Mesir dari arah depan, dan malah mengejutkan mereka dengan serangan dari arah yang tidak disangka-sangka.

Dalam tulisannya yang dimuat di harian *The New York Times* edisi 23 Mei 1967, James Reston mencermati bahwa, "dalam hal kedisiplinan, pelatihan, ketahanan mental, peralatan, dan kecakapan umum, angkatan bersenjata [Gamal Abdul Nasir] dan angkatan bersenjata negara-negara Arab lainnya, tanpa bantuan langsung dari Uni Soviet, bukanlah tandingan Israel. Bahkan dengan 50.000 orang serdadu berikut : jenderal-jenderal terbaiknya dan angkatan udara di Yaman sekalipun, ia tidak mampu menerobos masuk ke negara kecil yang primitif itu, malah usahanya membantu kaum pemberontak Konggo pun gagal total. Menjelang perang meletus, Israel sudah yakin akan menang dalam 3–4 hari. Amerika Serikat memperkirakan bahwa Israel perlu 7–10 hari untuk menang, dan perkiraan Amerika Serikat ini didukung oleh perkiraan yang dibuat Inggris.

Langkah-langkah strategis diplomasi pertahanan (*soft power*) yang digunakan oleh Negara Mesir dalam upaya penyelesaian Konflik dengan Israel.

Dalam sebuah upacara di Gedung Putih, Presiden Mesir Anwar el-Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin menandatangani perjanjian damai bersejarah. Hal ini berperan sebagai tanda berakhirnya permusuhan selama tiga dasawarsa antara Mesir dan Israel dan membangun hubungan diplomatik serta komersial.



Perdana Menteri Israel Menachem Begin

Melansir *history.com*, Rabu (25/3/2020), kurang dari dua tahun sebelumnya, dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang pemimpin Arab, Sadat melakukan perjalanan ke Yerusalem, Israel untuk mencari penyelesaian perdamaian permanen dengan tetangga Yahudi Mesir setelah beberapa dekade konflik. Kunjungan Sadat, di mana ia bertemu dengan Begin dan berbicara di hadapan parlemen Israel, Namun, disambut dengan kemarahan di sebagian besar dunia Arab. Terlepas dari kritik dari sekutu regional Mesir, Sadat terus mengejar perdamaian. Sampai pada akhirnya, pada bulan September 1978 kedua pemimpin bertemu lagi di Amerika Serikat, di mana mereka menegosiasikan kesepakatan dengan Presiden AS Jimmy Carter di *Camp David*, Maryland. Tujuh bulan kemudian, sebuah perjanjian perdamaian resmi ditandatangani. Atas prestasi mereka, Sadat dan Begin secara bersama-sama dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 1978. Namun, upaya perdamaian Sadat tidak begitu diakui di dunia Arab. Hal ini terbukti ketika Mesir diskors dari Liga Arab.

Hingga puncaknya, pada 6 Oktober 1981, para ekstremis Muslim membunuh Sadat di Kairo. Kendati demikian, proses perdamaian terus berlanjut tanpa Sadat, dan pada 1982 Mesir secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan negara tersebut dari perspektif komunikasi *persuasive*. Perang Enam Hari 1967, terdapat sejumlah rencana perdamaian, tetapi belum satu pun terlaksana sebelum berakhirnya Perang Yom Kippur pada Oktober 1973.



Prajurit Kavaleri Tank Mesir di Semenanjung Sinai

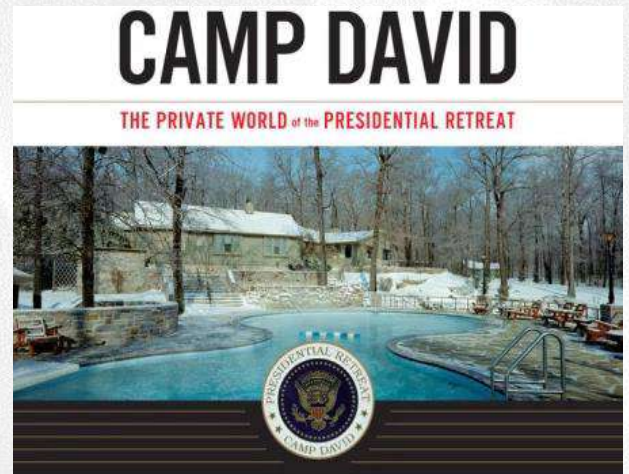
Awal mula perundingan damai Arab-Israel dimulai dengan kunjungan bersejarah Presiden Mesir Anwar Sadat ke Jerusalem pada November 1977. Situasi yang mulai membaik itu ditangkap Presiden AS Jimmy Carter yang kemudian mengundang Presiden Sadat dan PM Israel Menachem Begin untuk berunding di rumah peristirahatan Presiden AS di *Camp David*, tak jauh dari Washington DC, pada 17 September 1978. Presiden Sadat dan PM Begin ditengahi Presiden Carter melakukan perundingan maraton sepanjang 12 hari yang kemudian menghasilkan dua kesepakatan.



Prajurit Kavaleri Tank Mesir di Semenanjung Sinai

Kesepakatan pertama disebut "Sebuah Rencana Kerja untuk Perdamaian di Timur Tengah". Isi kesepakatan itu adalah meletakkan dasar-dasar dan prinsip perdamaian, memperluas resolusi DK PBB nomor 242, menyelesaikan apa yang disebut sebagai "masalah Palestina", menyetujui perdamaian Mesir-Israel, serta perdamaian antara Israel dan negeri-negeri tetangganya yang lain.

Resolusi DK PBB nomor 242 diterbitkan pada 22 November 1967 yang isinya menyerukan agar Israel menarik mundur militernya dari semua wilayah yang didudukinya setelah Perang Enam Hari yaitu Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan. Kelemahan kesepakatan pertama ini adalah pada bagian terkait masalah Palestina. Rencana dasar dari kesepakatan ini adalah membentuk sebuah "pemerintahan sendiri" di Tepi Barat dan Jalur Gaza sebelum status final ditentukan. Sayangnya, perwakilan Palestina tidak dilibatkan dalam pembicaraan ini. Kesepakatan kedua di *Camp David* adalah "Kerangka Kerja Camp David untuk Perjanjian Damai Israel-Mesir".



Kerangka kerja ini kemudian diwujudkan dengan penarikan mundur pasukan Israel dari Sinai pada 1979. Perjanjian ini merupakan pengakuan pertama dari sebuah negara Arab utama terhadap eksistensi Israel. Perundingan *Camp David* ini dianggap menjadi salah satu yang tersukses dalam seluruh rangkaian perjanjian damai Timur Tengah.

Perjanjian damai Israel dan Mesir masih berlangsung hingga hari ini dan secara substansial memperkuat posisi Israel di kawasan itu.

Sayangnya, perdamaian kedua negara baru berlangsung sesaat, Presiden Sadat kemudian tewas dibunuh pada 6 Oktober 1981. Anwar Sadat, yang kemudian mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian bersama PM Menachem Begin, tewas dibunuh kelompok kanan yang kecewa dengan keputusan berdamai dengan Israel. Tak diragukan, perjanjian *Camp David* ini mengubah peta politik di Timur Tengah, salah satunya adalah berubahnya status Mesir di mata negara-negara Arab lainnya. Bahkan Mesir sempat dikeluarkan dari Liga Arab mulai 1979-1989.

Selain itu, kalimat-kalimat menggantung yang digunakan untuk merujuk masalah Palestina dalam perjanjian ini terbukti telah mengakibatkan isu Palestina menjadi masalah utama proses perdamaian Timur Tengah dan tak kunjung terselesaikan hingga hari ini. Sementara itu, meski perjanjian Camp David ini didukung sebagian besar warga Israel, tidak demikian dengan warga Mesir. "Perdamaian" yang tercipta antara Mesir dan Israel cenderung dingin karena hanya dianggap perdamaian antara Israel dengan Presiden Anwar Sadat, dan bukan perdamaian antar-kedua bangsa. Dua tahun sebelumnya, Presiden Sadat tanpa diduga menyatakan, dia bersedia untuk "pergi ke ujung dunia, bahkan ke parlemen Israel Knesset" demi mencapai perdamaian di wilayah itu. Padahal saat itu di Israel dan di negara lain, harapan perdamaian lenyap setelah kubu nasional sosialis pimpinan Menachim Begin meraih kemenangan. Tapi, Begin mengundang Sadat yang kemudian datang ke Yerusalem. Setahun setelah sejumlah perundingan perdamaian yang intensif, "Perjanjian *Camp David*" akhirnya dicetuskan.

Berbagai politisi dunia mengikuti penandatanganan perdamaian yang dilaksanakan di depan Gedung Putih. Tapi, wakil dunia Arab tidak menghadirinya. Bahkan Palestina juga tidak. Mereka menentang perjanjian yang mereka sebut sebagai kesepakatan separatis. Mereka memboikot Presiden Mesir, Anwar Sadat yang meskipun demikian tak gentar menghadapi tantangan tersebut : "Rakyat Mesir dengan warisan budaya yang besar dan kesadaran atas nilai sejarahnya

yang unik, sejak awal mengerti arti dan pentingnya upaya ini. Bagi Sadat ini bukan perjanjian perdamaian separatis. Kesepakatan ini juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah Palestina.

Dari pihak Israel, Menachem Begin, pemimpin partai nasionalis Herut yang menandatangani kesepakatan itu : "Saya datang dari tanah Israel, tanah zionis dan dari Yerusalem. Di sini saya berdiri dengan rendah hati dan bangga, sebagai seorang putra bangsa Yahudi, sebagai salah seorang dari generasi Holocaust."

Penutup

Lesson learned (proses pembelajaran) yang didapat ditinjau dari perspektif strategi adalah negosiasi harus dipersiapkan dengan baik mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran sehingga akan diperoleh strategi dan hasil yang tepat. Semakin lama kita mempersiapkan sebuah negosiasi, asumsinya hasil negosiasi tersebut akan semakin menguntungkan bagi kita. Ditinjau dari perspektif komunikasi adalah Negosiasi bukan hanya sekedar diskusi, bukan beradu argumentasi, bukan hanya mempertahankan nilai dan kepentingan yang kita wakili, bukan juga soal memberikan kompromi. Beberapa *point* yang dapat diambil dalam kegiatan negosiasi tersebut adalah : Melibatkan komunikasi persuasive, Berusaha untuk menyelesaikan perbedaan, Memiliki sejumlah peraturan dan norma yang harus dipatuhi, Berdampak pada hubungan saling percaya dan mungkin didorong oleh logika, kekuatan, kompromi, perdagangan dan emosi.

Demikianlah essay tentang diplomasi dan negosiasi Mesir dalam upaya penyelesaian konflik dengan Israel. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa essay ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diperlukan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penulisan di masa-masa yang akan datang.

Mayor Inf Dian Aksmiyandita adalah
Abituren Pendidikan Regular LXI
SESKOAD TA 2021



PRO MUNDI BENEFICIO PERSPEKTIF PANAMA

Letkol Inf Drs. Jasaruddin

Pendahuluan

“Pro Mundi Beneficio”, bahasa latin yang berarti "untuk kepentingan dunia" ungkapan ini merupakan semboyan negara Republik Panama (*Republica de Panama*). Hal ini dapat dipahami bahwa Republik Panama sangat menjunjung tinggi hubungan internasional antar negara karena negara tersebut merupakan negara transit sebagai awal menjadinya titik pertemuan budaya dari seluruh dunia. Menjadi titik pertemuan karena lokasinya sangat strategis yang terletak di tenggara Amerika Tengah, sebelah utara berbatasan dengan laut Karibia, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur dengan Kolombia dan sebelah barat dengan Kosta Rika. Juga merupakan pengaturan geografis Terusan Panama yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara pantai Samudra Atlantik dan Pasifik dan perdangang global secara signifikan.

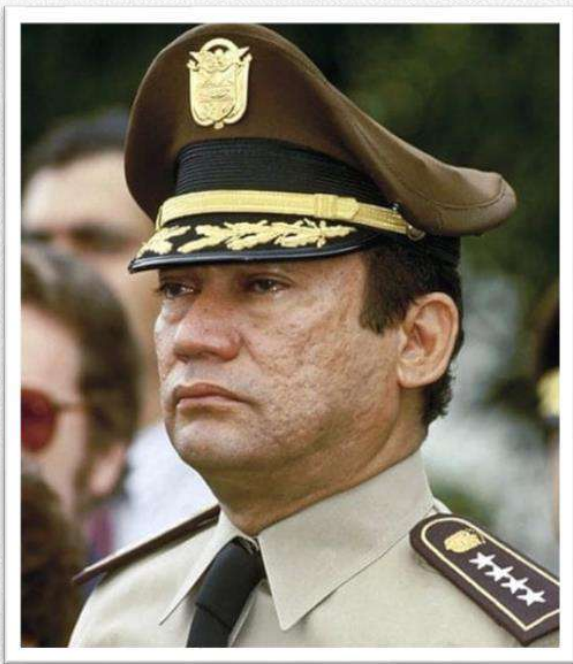
Negara Panama menganut sistem pemerintahan Republik Presidensial yang merupakan sistem pemerintahan yang dikepalai oleh seorang kepala negara yaitu Presiden dimana dipilih oleh rakyatnya melalui pemilihan secara langsung dengan masa jabatan 5 tahun.



Peta wilayah Negara Panama

Latar belakang terjadinya konflik

Operation Just Cause merupakan istilah yang terkenal di tahun 1989 dimana Amerika Serikat melakukan invasi ke Panama. Invasi ini dilatar belakangi oleh adanya upaya Amerika Serikat (AS) untuk memerangi peredaran Narkoba di negerinya sendiri khususnya di Panama. Hal ini diawali ketika Presiden Manuel Noriega direkrut sebagai agen CIA dalam rangka untuk memerangi peredaran narkotika dari Panama ke AS dan ternyata dia dinilai bekerja dengan sangat kooperatif. Perekrutan Noirega sebagai tangan kanan CIA terjadi pada tahun 1976 dimana George H. W. Bush (ayah George W. Bush) menjabat sebagai direktur CIA. Karena dinilai kooperatif akhirnya Noriega mendapat imbalan bayaran sebesar 110.000,- dolar AS.



Jenderal Manuel Noriega

Bayaran imbalan yang diterima Noriega sebagai agen CIA telah dinikmati selama beberapa tahun hingga George Bush menjadi Wakil Presiden AS pada tahun 1982. Akan tetapi peran Noriega sebagai agen CIA sejak pertama kali perekrutannya itu, Dia hanya berpura-pura bekerja sama dengan AS padahal dalam waktu yang sama justru Noriegalah yang menjadi dalang terbesar peredaran Narkoba.



George H. W. Bush

Kemudian pada tahun 1985, kiprah Noriega sebagai dalang penyelundupan Narkoba semakin sukses bahkan jalur Kawasan Nikaragua yang dibuka AS justru dimanfaatkan

oleh Noriega semaksimal mungkin untuk membuka jalur penyelundupan narkotika Panama-Kolombia-Nikaragua.

Pilot-pilot pengemudi pesawat Norwegia mengirimkan heroin yang diantaranya pilot bayaran asal AS dengan bayaran 400,- dolar AS per tiap Kg heroin yang berhasil dikirim. Sementara pesawat sewaan mafia narkotika Nikaragua memberikan imbalan bayaran kepada Noriega sebesar 100.000, - dolar AS per pesawat. Imbalan bayaran ini tentu lebih besar dibanding imbalan bayaran yang diterima sebagai agen CIA. Namun kesuksesan dan kejayaan bisnis narkotika Noriega mulai goyah dalam dekade tahun 1980an. Hal ini disebabkan karena AS sudah mulai melancarkan kampanye anti narkotika bahkan para demonstiran juga melontarkan slogan anti Noriega karena dinilainya bahwa Sang Jenderal Panama Noriegalah sebagai aktor utama penyelundup narkotika.

Dari hal ini, maka presiden AS George H. W. Bush mulai terusik akibat ulah teman lamanya itu sehingga memaksa mereka untuk berencana menangkap Noriega dengan melakukan invasi ke negara Panama. Invasi ini digelar dengan operasi yang dikenal dengan Operation *Just Cause*. Rencana ini ternyata telah terciun oleh pasukan Panama dan mereka bertekad untuk melakukan perlawanan.

Sejak itulah Jenderal Noriega menyatakan perang dengan AS yang terbukti dengan mulai memberlakukan jam malam di Panama City. Sekelompok tentara AS yang sedang menuju pangkalan terjebak jam malam dan tentara Panama melakukan pemeriksaan bahkan mengeluarkan tembakan yang kemudian menewaskan seorang Letnan dan yang lainnya luka-luka. Mendapat berita penembakan itu, tentara AS melakukan serangan dengan mengarahkan 24.000 tantara dan sejumlah pasukan tempur termasuk pesawat siluman F-117-A *Nighthawk* yang baru pertama dioperasikan menghadapi 16.000 pasukan regular Panama dengan perlengkapan yang tidak sebanding. Akibat dari serangan tersebut telah mengakibatkan 50.000 orang kehilangan tempat tinggal, menghancurkan fasilitas umum dan perumahan bahkan telah

menewaskan kurang lebih 1.600 orang di antaranya 23 orang militer AS dan 314 orang militer Panama serta 314 orang luka-luka/cedera. Bahkan dalam sumber lain seperti otoritas AS di Panama Jendral Ramsey Clark mengatakan hanya 516 orang, dan menurut laporan Palang Merah dan *Human Rights Watch* yang berpusat di Costa Rica, total korban tewas mencapai 4.000 orang dilaporkan juga saksi mata kepada Palang Merah, setidaknya 30 orang jenazah korban akibat praktik pembantaian, ribuan korban secara diam-diam diangkut ke Honduras pangkalan udara AS dan dikuburkan secara diam-diam serta korban materi diperkirakan mencapai total 2 miliar AS, dua stasiun televisi serta stasiun radio dan surat kabar oposisi. Sementara itu pasukan khusus AS, *Navy SEALs* diberi tugas khusus untuk menangkap Noriega dan mencegahnya melarikan diri dari *Panama City*.

Aksi para *Navy SEALs* itu diberi nama sandi *Operation Nifty Package*. Terkepung oleh pasukan khusus yang menerapkan metode perang psikis (*psy-war*) dan perang taktis, Noriega akhirnya menyerahkan diri kepada pasukan *Navy SEALs* pada 3 Januari 1990.

Sekitar 23 tentara dan tiga warga sipil AS tewas dalam *Operation Just Cause*. Sedangkan sekitar 150 tentara PDF dan 500 warga Panama tewas dalam operasi tersebut. Organisasi Negara-Negara Bagian Amerika Serikat dan Parlemen Uni Eropa secara formal memprotes invasi tersebut, yang mereka anggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

Joseph Nye, dalam tulisannya yang berjudul *"Public diplomacy and Soft Power"* (2008), menjelaskan bahwa *Soft power* adalah *"the ability to get what you want through attraction rather than through coercion or payments"*. *Soft Power* suatu negara bersumber dari budaya, nilai - nilai, dan kebijakan.

Pada abad ke-16 hingga pada tahun 1821 Panama pernah menjadi bagian koloni persatuan Spanyol tergabung dengan Gran Colombia Simon Boliver yang meliputi negara persatuan Kolombia.

Dipertengahan abad ke-20, visi Theodore Roosevelt atas jalur laut antar samudra mendorong usaha diplomatic AS memfasilitasi perjanjian yang akan memungkinkannya mengambil alih pengoperasian terusan itu oleh Prancis yang dimulai oleh Ferdinand de Lesseps. Pada tahun 1903 Panama mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara republik yang berdaulat dari sebuah revolusi yang nyaris tanpa pertumpahan darah.

Dua minggu setelahnya perwakilan Republik Panama menanda tangani sebuah perjanjian dengan AS yaitu *perjanjian "Hay-Bunau-Varilla"* untuk membangun sebuah kanal dan memberikan hak penuh untuk mengatur kanal tersebut yang dikenal dengan Terusan Panama (*Panama Canal*).



Terusan Panama

Hak kontrol AS terhadap kanal Terusan Panama berlangsung hingga beberapa tahun lamanya. Dalam kurung waktu tersebut pemerintah Panama terus berupaya melakukan Langkah-Langkah diplomasi strategis untuk mengalihkan hak pengelolaan kanal Terusan Panama. Pada tahun 1980an, pemimpin Panama, Manuel Noriega, pemimpin yang didukung oleh AS yang kemudian dituduh telah melakukan mata-mata kepada AS untuk Fidel Castro dalam rangka melakukan lalu lintas obat.

Rencana untuk menyingkirkan Noriega telah ada selama pemerintahan Reagan. Reagan mengirimkan 2 ribu tentara AS ke Panama dan memberlakukan sanksi ekonomi. Sanksi ini cukup berat karena melarang perusahaan AS untuk bekerja sama dengan Panama dan membekukan dana negara itu sebesar US\$ 56

Juta namun Noriega belum juga turun dari kekuasaan. Tidak seperti Reagan, Bush berhasil melengserkan Noriega dari kekuasaan namun tidak berhasil membentuk rencana pasca invasi untuk membuat pemerintahan demokratis.

Pada bulan Mei 1989, Panama mengadakan pemilu demokratis pertama di mana Guillermo Endara terpilih sebagai Presiden namun hasil pemilu dibatalkan oleh Noriega. Sebagai tanggapan, Bush mengirim 2 ribu pasukan tambahan dan mencabut Duta Besar di sana. Bush juga mengirim 24 ribu pasukan lagi untuk berjaga-jaga dalam menghadapi inflasi. Bagaimanapun, posisi lemah Noriega di negaranya sendiri membuat ia akhirnya diturunkan. Pada tahun 1992, Bush dan Ibu Negara Barbara Bush berkunjung ke Panama untuk mendukung pemerintahan demokratis pertama di sana sebagai bentuk dukunnya, AS mengucurkan bantuan dana sebesar 420 juta dollar AS. namun ternyata sebanyak 25% dana atau sekitar 108 juta dolar AS tersebut digunakan untuk menyehatkan Bank-Bank AS yang ada di Panama. Sedangkan 75% dana digunakan untuk perbaikan kanal, melatih polisi, pembenahan fasilitas umum dan lainnya. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 1999 Pemerintah Panama berhasil melakukan negosiasi dengan pemerintah AS yang menghasilkan perjanjian "*Torrijos-Carter*" dimana hak kontrol AS terhadap Terusan Panama berakhir dan beralih menjadi hak kontrol sepenuhnya oleh otoritas Terusan Panama.



Jimmy Carter and Omar Torrijos at the signing of the Panama Canal Treaty

Solusi Penyelesaian Permasalahan Diplomasi Pertahanan Negara

Perspektif Komunikasi persuasive selusi penyelesaian diplomasi atas pertikaian antara negara Panama versus Amerika Serikat seyoknya dilakukan melalui pendekatan komunikasi Persuasif. Salah satu bentuk komunikasi paling mendasar yaitu komunikasi persuasif, yakni proses mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal yang mana komunikasi persuasive ini sudah dimanfaatkan sejak lama dan bahkan Simons (1976) menjelaskan bahwa studi tentang persuasif berasal dari zaman Yunani Kuno.

Saat itu, persuasive telah digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti untuk mengadakan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di ruang pengadilan, menyampaikan pidato dalam upacara-upacara khusus, serta untuk perdebatan mengenai masalah-masalah kebijakan umum.

Komunikasi persuasi merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, komunikasi persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju. Dengan demikian, maka komunikasi persuasif adalah komunikasi yang mempunyai tujuan yang jelas dan harus dapat dicapai. Oleh karena itu, setiap kegiatan komunikasi persuasif perlu dilandasi strategi tertentu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.



Prasasti "*Torrijos-Carter*" di terusan panama

Melvin L. De Fleur dan Sandra J. Ball-Roeach (dalam Soemirat, 2017) memberikan beberapa strategi komunikasi persuasif sebagai berikut:

- a. Strategi Psikodinamika. Strategi komunikasi ini berdasarkan pada konsep psiko dinamika yang dipusatkan pada factor emosional dan factor kognitif dengan menggunakan pesan persuasi untuk pernyataan emosional, seperti marah dan takut. Strategi ini juga dapat digunakan untuk menghubungkan pembangkit emosional dengan perilaku tertentu. Asumsi lain dari strategi ini adalah faktor-faktor kognitif ber-pengaruh besar terhadap perilaku manusia, jika faktor-faktor kognitif dapat diubah, maka faktor-faktor perilaku pun dapat diubah pula.
- b. Strategi Persuasi Sosio-Kultural. Yaitu perilaku manusia yang dipengaruhi oleh kekuatan dari luar individu seperti keluarga, teman, pasangan, tetangga, dan lain sebagainya. Dalam strategi ini, penting untuk memperhatikan lingkungan atau kelompok yang diikuti oleh sasarannya.
- c. Strategi The Meaning Construction. Strategi ini dapat dilakukan dengan memanipulasi pengertian, artinya bahwa konsep dari strategi ini adalah apabila pengetahuan seseorang dapat dirubah, maka perilakunya pun juga dapat dirubah.

Lesson Learned (peroses pembelajaran) yang didapat dari Diplomasi Pertahanan yang bersifat Soft Power yaitu pada dasarnya Republik Panama sangat menjunjung tinggi hubungan internasional antar negara karena negara tersebut merupakan negara transit sebagai awal menjadinya titik pertemuan budaya dari seluruh dunia.

Dalam konstelasi politik luar negeri, Republik Panama memiliki beberapa kepentingan nasional, diantaranya adalah memajukan dan mengembangkan ekonomi nasional yaitu dengan membangun sebuah Kanal dengan nama Terusan Panama (*Panama Canal*). Untuk mengembangkan ekonominya, Panama membutuhkan dukungan besar dari negara terkuat di Kawasan Amerika yaitu Amerika Serikat.

Hal ini yang kemudian membuat Panama memiliki strategi untuk melaksanakan diplomasi *soft power* dengan AS sehingga AS memberikan dukungan sepenuhnya kepada Panama untuk memisahkan diri dari Kolombia dan mendeklarasikan ke-merdekaan Panama sebagai Negara Republik yang berdaulat. Dua minggu setelahnya perwakilan Republik Panama menanda tangani sebuah perjanjian dengan AS yaitu perjanjian "Hay-Bunau-Varilla" untuk membangun sebuah kanal dan memberikan hak penuh untuk mengatur kanal tersebut. Hak kontrol AS terhadap kanal Terusan Panama berlangsung hingga beberapa tahun lamanya.



Perjanjian "Hay-Bunau-Varilla"

Akhirnya pada tanggal 31 Desember 1999 Pemerintah Panama berhasil melakukan negosiasi dengan pemerintah AS yang menghasilkan perjanjian "*Torrijos-Carter*" dimana hak kontrol AS terhadap Terusan Panama berakhir dan beralih menjadi hak kontrol sepenuhnya oleh otoritas Terusan Panama. Di samping penyerahan Terusan Panama, AS juga menyerahkan instalasi Militer yang mana hal tersebut telah memberikan peningkatan proyek-proyek konstruksi baru.

Demikianlah *essay* tentang *Pro Mundi Beneficio Perspektif Panama* Penulis menyadari sepenuhnya bahwa *essay* ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diperlukan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penulisan di masa-masa yang akan datang.

Letkol Inf Drs. Jasaruddin adalah abiturien Pendidikan Regular LXI SESKOAD TA 2021



DIPLOMASI MALAYSIA MELAWAN INDONESIA DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN WILAYAH PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN

Letkol Czi Ketut Sudirta, S.H.

Pendahuluan

Penyelesaian Konflik sengketa wilayah kepulauan Sipadan dan pulau Ligitan antara Malaysia dan Indonesia sudah berlangsung sejak di Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat khususnya dengan Malaysia secara resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya. Pada masa awal hubungan bilateral, kedua negara sempat mengalami era konfrontasi pada tahun 1963-1965. Namun dengan terjadinya pergantian pemimpin maka masing-masing negara mempunyai cara pandang atau visi yang jauh ke depan untuk kemajuan masing-masing ke depan, para pemimpin kedua negara telah mengambil sikap yang bijak untuk segera memulihkan hubungan dan bahkan menjadi pelopor dalam pembentukan organisasi regional ASEAN pada tahun 1967.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang dilandasi oleh adanya semangat serumpun telah mendorong terus berkembangnya kerjasama kedua negara di berbagai sektor yang dibangun dengan semangat rumpun melayu. Dengan tercapainya berbagai kemajuan kerja sama malaysia dan Indonesia terdapat beberapa permasalahan yang menjadi salah satu isu yang menonjol dalam hubungan bilateral ke dua Negara.

Permasalahan inilah yang membawa Malaysia dan Indonesia merujuk kepada konflik yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia yaitu mengenai perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang menjadikannya sebagai sengketa wilayah. Ketidakjelasan batas-batas negara dan status wilayah sering menjadi sumber persengketaan di antara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas-batas landas kontinen di antara negara-negara bertetangga sehingga menimbulkan wilayah “tumpang tindih” yang dapat menimbulkan persengketaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis diidentifikasi beberapa pokok-pokok persoalan yang akan dibahas dalam penulisan ini **Pertama.** Latar belakang terjadinya konflik antar Negara yang selesai dengan diplomasi pertahanan negara. **Kedua.** Langkah-langkah strategis diplomasi. **Ketiga.** Solusi penyelesaian permasalahan diplomasi tersebut dari perspektif komunikasi persuasif. **Keempat.** *Lesson learned* yang di dapat dari dari diplomasi pertahanan bersifat soft power dari negara Dari pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan masalah dalam penulisan ini adalah **Diplomasi Malaysia melawan Indonesia dalam proses penyelesaian**

sengketa penguasaan wilayah pulau Sipadan dan pulau Ligitan

Pembahasan

Latar belakang terjadinya konflik antar negara yang selesai dengan diplomasi pertahanan negara

Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis mengenai hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan *status quo*, akan tetapi ternyata perbedaan pemahaman diantara kedua negara tersebut.



Peta wilayah pulau Sipadan dan pulau Ligitan

Pihak Malaysia membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia menganggap *status quo* wilayah tersebut masih berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai, sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati/diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai.



Malaysia membangun resor pariwisata P. Sipadan

Namun Malaysia malah membangun permukiman di sana. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia, yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu, segera mengirim protes ke Kuala Lumpur meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya, Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, dan belum diputus siapa pemiliknya. Pada tahun 1969 Kerjasama Bilateral. Dikutip melalui buku Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia dan Kawasan Asia Pasifik. Jakarta : CSIS. 1981. Hal. 80 Universitas Sumatera Utara, yakni "Pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya".

Langkah-langkah strategis diplomasi.

Titik berat penyelesaian sengketa lahan Malaysia dan Indonesia dibangun dalam suatu frame bahwa keduanya merupakan rumpun melayu yang harus duduk sama-sama menyelesaikan segala permasalahan dengan cara menggalang dukungan internasional sebagai penengah dalam menyelesaikan kebenaran klaim dari masing-masing pihak terkait kepemilikan kepulauan Sepadan dan Legitan.

Sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris Malaysia paham langkah politik tetangganya yang paling dekat dengannya yaitu Indonesia, Bangsa yang besar terdiri dari gugusan pulau dengan luas yang jauh melebihi Malaysia, begitupun juga dengan jumlah kepadatan penduduk Indonesia jauh lebih unggul. Oleh karenanya perlu suatu strategi membangun opini dukungan politik internasional melalui strategi diplomasi dengan membawa perselisihan sengketa wilayah ke Mahkamah Internasional sebagai wujud langkah strategis Malaysia disamping itu beberapa langkah lobi-lobi dukungan internasional juga dikedepankan untuk memenangkan diplomasi sengketa wilayah demi meraih suara dukungan di Mahkamah Internasional. Upaya penyelesaian perselisihan atas klaim wilayah membutuhkan waktu untuk kata sepakat dan keputusan pengadilan Internasional yang diyakini lebih menjamin Netralitas dan jauh dari pengaruh Negara lain. Kedua belah pihak sama-sama menahan diri, tidak menempuh kekerasan melainkan lebih

mengutamakan upaya lobi-lobi dalam rangka diplomasi untuk mencari dukungan terhadap penyelesaian konflik sengketa lahan ditingkat pengadilan makamah internasional.

Pada tahun 1976, Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara atau TAC (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*) dalam KTT pertama ASEAN di Bali antara lain menyebutkan bahwa akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Akan tetapi pihak Malaysia menolak. Mereka beralasan karena Malaysia juga mengalami sengketa dengan Singapura untuk klaim pulau Batu Puteh, sengketa kepemilikan Sabah dengan Filipina serta sengketa kepulauan Spratley di Laut Cina Selatan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Cina, dan Taiwan. Pada Tahun 1991 pihak Malaysia menempatkan sepasukan polisi hutan (setara dengan Brimob) untuk melakukan pengusiran semua warga negara Indonesia serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau.

Posisi Indonesia sebagai salah satu Negara Penting yang sangat berpengaruh dan memiliki peran yang sangat penting dalam ASEAN merupakan negara yang memiliki dukungan politik yang sangat baik dikalangan negara-negara ASEAN.

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations* atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama 10 (sepuluh) negara di Asia Tenggara, dibentuk Pada ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN, berdasarkan tanggal menjadi anggota, adalah Indonesia (8 Agustus 1967); Malaysia (8 Agustus 1967); Singapura (8 Agustus 1967); Thailand (8 Agustus 1967); Filipina (8 Agustus 1967); Brunei Darussalam (8 Januari 1984); Vietnam (28 Juli 1995); Laos (23 Juli 1997); Myanmar (23 Juli 1997); Kamboja (30 April 1999).

ASEAN memiliki Prinsip yang dipegang teguh yakni : "Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah,

dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN; Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN; Menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional; Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial.



KTT 1 ASEAN pada 23 -25 Februari 1976 di Bali, Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur pada tanggal 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Malaysia Mahathir Mohamad tersebut untuk membawa kasus ke Mahkamah Internasional.

Kesepakatan *final and binding* itu akhirnya ditandatangani pada 31 Mei 1997. Kedua. Malaysia mempunyai Inggris sebagai sekutu yang sangat berperan dalam kemerdekaannya. Kita sama-sama tahu Kemerdekaan Malaysia merupakan hadiah dari kerajaan Inggris sehingga kelangsungan Malaysia sedikit tidaknya mendorong Inggris suport Malaysia untuk memperoleh dukungan internasional hal ini semakin nyata dengan adanya dokumen kegiatan Inggris di Pulau Sepadan dan Legitan yang kemudian digunakan sebagai bahan klaim Malaysia memperkuat penguasaan wilayah pulau Sepadan dan Legitan.

Bagi Malaysia penyelesaian sengketa pulau Sepadan dan Pulau Legitan dengan Indonesia akan sia-sia bagi Malaysia dan akan sangat menguntungkan Indonesia karena posisi

Indonesia di ASEAN sangat dominan diantara Negara ASEAN sehingga sangat tidak mungkin di selesaikan tingkat ASEAN untuk itu berbagai langkah Indonesia untuk membawa masalah ini ke dewan tinggi ASEAN harus ditolak.

Solusi penyelesaian permasalahan diplomasi tersebut dari perspektif komunikasi persuasif

Diplomasi dalam penyelesaian sengketa pulau dengan Indonesia harus tetap dijaga dan di bangun atas asas keadilan dan kebenaran yang benar-benar adil sesuai ketentuan dalam undang-undang yang berlaku dan harus dilakukan oleh pihak ketiga Natral dan tidak berat sebelah, membangun konstruksi pelibatan pihak ketiga dalam menyelesaikan permasalahan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan sangatlah membutuhkan waktu, keyakinan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Solusi penyelesaian permasalahan diplomasi dari perspektif komunikatif *persuasive* berdasarkan **SWOT**.

Strenght/Kekuatan. Malaysia bertahan tidak mau penyelesaian masalah dibahas/ diselesaikan di tingkat ASEAN. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1996 Sikap pihak Indonesia yang ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke ICJ kemudian melunak. Pada tanggal tersebut dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Malaysia waktu itu, Mahathir Mohammad, yang pernah diusulkan pula oleh Mensesneg Moerdiono dan Wakil PM Malaysia Anwar Ibrahim, untuk membentuk kesepakatan "*Final and Binding*". Dan pada tanggal 31 Mei 1997, kedua negara menandatangani persetujuan tersebut. Indonesia meratifikasi persetujuan tersebut pada tanggal 29 Desember 1997 dengan Keppres Nomor 49 Tahun 1997, demikian pula dengan Malaysia pada 19 November 1997. Malaysia mempunyai sekutu Inggris yang selalu siap membantu Malaysia. Memanfaatkan *moment Status quo* dengan membangun bangunan pariwisata di Pulau Sipadan dan pulau Ligitan, selanjutnya menempatkan polisi kehutan setingkat brimob untuk mengusir penduduk Indonesia dari pulau Sipadan dan Ligitan.

Weaknes/kelemahan. Malaysia mempunyai keterbatasan dalam hal dukungan dari negara-negara ASEAN karena Malaysia juga mempunyai masalah perbatasan dengan beberapa negara di ASEAN. Diantaranya hubungan yang kurang harmonis dengan Singapura untuk klaim pulau Batu Puteh, sengketa kepemilikan Sabah dengan Filipina serta sengketa kepulauan Spratley di Laut Cina Selatan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Cina, dan Taiwan semakin berlarut dan semakin tidak jelas sehingga langkah yang perlu diambil adalah membawa permasalahan ini ke makamah internasional

Oppurtunity/Peluang. Kesediaan Indonesia untuk setuju menyelesaikan permasalahan penguasaan wilayah ke tingkat Makamah Internasional merupakan dan kesempatan dalam memperkuat argumen dan bukti-bukti fakta penyelesaian masalah sengketa. *Staus Quo* Indonesia untuk tidak melakukan aktifitas di pulau Sipadan dan Ligitan merupakan kesempatan dalam melakukan kegiatan administrasi yang sebelumnya telah dilakukan sambil menunggu kepastian makamah Internasional.

Treats/Ancaman. Sikap dominan Indonesia dengan menggunakan dalil hukum UCLOS merupakan salah satu landasan hukum yang cukup kuat untuk menggugurkan tuntutan Malaysia atas argumen penguasaan atas Wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pengaruh Indonesia sebagai Negara penggerak ASEAN merupakan ancaman yang dapat melemahkan posisi pengaruh Malaysia di makamah Internasional.

Keberedaaan Indonesia sudah banyak dikenal dalam setiap tugas kemanusiaan dibawah naungan PBB dapat melemahkan posisi Malaysia yang belum begitu dikenal. Gagasan Strategis sebagai upaya penyelesaian. Masalah **kombinasi SWOT** adalah :

Pertama. Kombinasi *Strenght/kekuatan* dan *Oppurtunity/Peluang* yaitu dengan Menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal tetap mendorong upaya penyelesaian Masalah sengketa Wilayah ke Makamah Internasional dan bertahan untuk tidak diselesaikan di tingkat ASEAN dengan beberapa alasan bahwa

Malaysia mempunyai beberapa masalah perbatasan dengan beberapa negara anggota ASEAN. Langkah yang dilaksanakan adalah dengan memanfaatkan kondisi status quo sebagai peluang untuk tetap memperkuat penguasaan dengan cara mem-bangun pariwisata di pulau tersebut.

Kedua. Kombinasi *Weaknes/Kelemahan* dan *Treats/Ancaman* (W-T). Yaitu Langkah untuk memperoleh alternatif defensive dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Langkah yang ditempuh Memanfaatkan kelemahan bahwa Malaysia mempunyai beberapa permasalahan dengan beberapa Negara ASEAN sehingga sangat tidak mungkin penyelesaian sengketa dibawah ke ranah ASEAN dengan demikian dapat meminimalkan tekanan Indonesia yang selalu mendorong penyelesaian di tingkat ASEAN.

Ketiga. Kombinasi *Stenght/Kekuatan* dan *Treats/Ancaman* (S-T) yaitu langkah yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan secara maksimal untuk mengurangi ancaman dari luar. Langkah yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan sumber daya dalam pengelolaan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, langkah langkah nyata yang dilakukan yaitu dengan menambah pembangunan pariwisata di pulau sengketa, tetap menduduki dan menguasai dengan cara menempatkan polisi kehutan yang setara brimob untuk mengamankan pulau sengketa.

Keempat. Kombinasi *Weaknes/Kelemahan* dan *Opportunity/peluang* (W-O) dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Langkah strategi yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan mengambil keuntungan sebanyak peluang yang tersedia. Kelemahannya adalah kembali lagi pada pokok persoalan Indonesia mempunyai banyak permasalahan batas wilayah pulau-pulau terluar dengan beberaa anggota ASEAN sehingga tidak mungkin diselesaikan di ASEAN dengan adanya peluang kesepakatan dalam kunjungan Presiden Soeharto ke Kuala Lumpur pada tanggal 7 Oktober 1996, akhirnya menyetujui usulan PM Malaysia Mahathir Mohamad tersebut untuk membawa kasus ke

Mahkamah Internasional. Kesepakatan final and binding itu akhirnya ditandatangani pada 31 Mei 1997.

Dengan demikian kemudian sengketa pulau tersebut resmi dibawa ke Makamah Internasional, peluang ini tidak disia-siakan kemudian pada akhirnya membawa hasil yang memberi kemenangan kepada Malaysia beberapa *point* penting yang menjadi catatan diplomasi yaitu selama diplomasi Malaysia tetap Menduduki Wilayah Sengketa selama diplomasi. Pembangunan resor di pulau yang tengah menjadi sengketa itu pun menjadi sorotan. Pengusaha Malaysia telah menambah jumlah penginapan menjadi hampir 20 buah. Selanjutnya adanya kegiatan *Effective occupation* merupakan Kunci penyelesaian klaim Pulau Sepadan dan Pulau Legitan. *Effective occupation* adalah hukum internasional yang berasal dari hukum Romawi kuno yang berarti tindakan administratif dan bukan pendudukan secara fisik. *Effective occupatin* dapat diterapkan pada Wilayah baru atau wilayah tak bertuan atau wilayah yang dianggap tak bertuan dan disengketakan oleh negara.

Dari data yang digunakan pada akhirnya menempatkan Indonesia pada Lemahnya kemampuan dalam melindungi pulau-pulau yang dimilikinya, Hal ini tergambar dari argument yang digunakan di Mahkamah Internasional saat berlangsungnya sidang memutuskan nasib Pulau Sipadan dan Ligitan. Dalam upaya memperjuangkan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut, Indonesia menggunakan argumentasi berdasarkan Konvensi 1891 (*Treaty Based Title*).

Malaysia sangat paham dalam membangun diplomasi dengan Indonesia terutama dalam ranah pengadilan Makamah Internasional, sehingga terkait dengan penyelesaian Pulau Sepadan dan Legitan Malaysia mengedepankan konsep *effective occupation*.

Leson learned yang di dapat dari dari diplomasi pertahanan bersifat soft power dari Negara"

Putusan Mahkamah Internasional. Pada babak akhir, Mahkamah Internasional menilai, argumentasi yang diajukan Indonesia

mengenai kepemilikan Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur itu tidak relevan. Karena itu, secara defacto dan de jure, dua pulau yang luasnya masing-masing 10,4 hektare untuk Sipadan dan 7,4 ha untuk Ligitan itu menjadi milik Malaysia. Keputusan yang diambil melalui pemungutan suara itu bersifat mengikat bagi Indonesia dan Malaysia. Kedua negara bertetangga itu juga tidak dapat lagi mengajukan banding. Dengan pertimbangan *Effective occupation* maka Mahkamah Internasional juga memandang situasi Pulau Sipadan-Ligitan lebih stabil di bawah pengaturan pemerintahan Malaysia.

Pelajaran berharga dari Diplomasi Malaysia dan Indonesia merupakan suatu kemenangan yang harus digunakan sebagai model dalam menyelesaikan diplomasi untuk kepentingan Negara. Beberapa hal Penting pembelajaran yang diambil dari penyelesaian Diplomasi sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Malaysia dan Indonesia adalah : **Pertama** Pahami Permasalahan, **Kedua** Kenali Lawan, **Ketiga** Penentuan Pihak Ketiga yang tepat merupakan Kunci dukungan terhadap dalil yang mendukung tujuan diplomasi. **Keempat** Perlu adanya Cipta Kondisi untuk meraih dukungan dunia Internasional dalam hal ini Mahkamah Internasional sebagai pihak ke tiga dan yang terakhir adalah pandai dalam lobi-lobi untuk cari dukungan politik dan kepentingan, **Kelima**. Kuasai Pulau terluar yang Kosong dengan segala kekayaannya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS dan **Keenam** Perlu adanya tindakan *Effective Occupation* terhadap pulau-pulau terluar untuk menghindari klaim sepihak dari Negara asing.



Penutup

Malaysia sebagai rumpun negara melayu sangat paham dengan konsep politik Indonesia dalam membangun visi dan misi bangsa Negara kesatuan secara internal maupun dalam hubungan politik luar negeri bebas aktif.

Dari uraian di dalam menjawab ke empat pokok permasalahan maka penulis mengambil kesimpulan dalam enam langkah yang diperlukan dalam diplomasi sengketa Wilayah antara Malaysia dan Indonesia sebagai berikut: **Pertama**. Pahami Permasalahan, **Kedua** Kenali Lawan, **Ketiga** Penentuan Pihak Ketiga yang tepat merupakan Kunci dukungan terhadap dalil yang mendukung tujuan diplomasi. **Keempat** Perlu adanya Cipta Kondisi untuk meraih dukungan dunia Internasional dalam hal ini Mahkamah Internasional sebagai pihak ke tiga dan yang terakhir adalah pandai dalam lobi-lobi untuk cari dukungan politik dan kepentingan, **Kelima** Kuasai Pulau terluar yang Kosong dengan segala kekayaannya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS dan **Keenam** Perlu adanya tindakan *Effective Occupation* terhadap pulau-pulau terluar untuk menghindari klaim sepihak dari Negara asing

Demikian essay ini dibuat untuk melengkapi tugas Pasis dikreg ke LXI khususnya materi Komunikasi Strategis, Diplomasi dan Negosiasi. Harapan yang ingin disampaikan agar apa yang terjadi pada konflik sengketa penguasaan wilayah pulau sipadan dan Malaysia menjadi pembelajaran khususnya dalam pengelolaan pulau-pulau yang menjadi wilayah penguasaan.

Bahwa diplomasi dan negosiasi menjadi instrumen yang sangat penting dalam membangun komunikasi antara beberapa negara dalam rangka dukungan politik internasional yang pada akhirnya menjadi sangat menentukan dalam kedaulatan bangsa dimata Internasional

Letnan Kolonel Czi Ketut Sudirta adalah abituren Pendidikan Regular LXI SESKOAD TA 2021



PERTEMPURAN CARACAS : KAJIAN PERTEMPURAN KEMERDEKAAN VENEZUELA

Koptol A. Mukti Surya A. S., S.H., S.I.K., M.Si.

Pendahuluan

Perang Kemerdekaan Venezuela (1810-1823) adalah salah satu perang yang terjadi di benua Amerika yang terjadi antara awal abad kesembilan belas, ketika gerakan kemerdekaan di Amerika Latin berperang melawan pemerintahan kekaisaran Spanyol, Upaya revolusi melawan kekuasaan Spanyol di Venezuela dimulai sejak negeri tersebut ditaklukkan Napoleon pada medio 1800-an. Situasi itu lalu dimanfaatkan oleh berbagai negara di Amerika Latin untuk melawan. Sementara di Venezuela, tercatat pada April 1810, mereka secara de facto menyatakan merdeka dan segera mendirikan pemerintahan yang dipimpin oleh Simon Bolivar. Berdasarkan uraian tersebut maka esai ini akan mengidentifikasi pokok-pokok persoalan yaitu; Pertama, Apa latar belakang sejarah terjadinya perang di negara tersebut? Kedua, Bagaimana perang yang terjadi di negara tersebut dihadapkan dengan teori perang?, Ketiga, Bagaimana pergerakan Pasukan yang terlibat dalam perang tersebut?, Keempat, Bagaimana Taktik perang yang digunakan? Kelima, Dampak yang ditimbulkan akibat perang tersebut? Keenam, Pelajaran yang dapat diambil untuk masa yang akan datang?.

Berdasarkan pokok persoalan tersebut maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana terjadinya pertempuran kemerdekaan Venezuela dalam melawan kolonialisme Spanyol.

Pembahasan

Latar belakang sejarah terjadinya perang.

Peperangan Venezuela melawan kolonialisme Spanyol dilatarbelakangi oleh penjajahan yang dilakukan oleh kerajaan Spanyol pada masa kolonialisme Eropa di wilayah Amerika Selatan, bermula dari Invasi Perancis ke Spanyol pada tahun 1808, sehingga menyebabkan runtuhnya Monarki Spanyol. Sebagian besar rakyat Spanyol tidak menerima pemerintahan Joseph Bonaparte, yang ditempatkan di atas takhta Spanyol oleh saudaranya, Kaisar Napoleon Bonaparte dari Perancis.

Revolusi melawan kekuasaan Spanyol di Venezuela dimulai pada 1810 ketika gubernur Spanyol di Venezuela digulingkan dari kursi kekuasaannya. gerakan kemerdekaan di Venezuela menambah masalah bagi Kerajaan Spanyol, yang di saat bersamaan terlibat Perang Napoleon di Eropa.



Joseph Bonaparte

Pada 5 Juli 1811, tujuh dari sepuluh provinsi mendeklarasikan kemerdekaan di Venezuela yang memanfaatkan kondisi Spanyol yang sedang berperang dengan Prancis di Eropa sekaligus melemahkan kondisi Spanyol di wilayah Venezuela.



Peta Wilayah Negara Venezuela

Bagaimana perang yang terjadi di negara tersebut dihadapkan dengan teori perang.

Mengacu pada teori perang sebagaimana yang disebutkan oleh Clausewitz, bahwa dalam melakukan perang haruslah dilakukan dengan keseluruhan (total) kemampuan dan sarana yang ada, sebab bila tidak, maka kemenangan tak akan tercapai. Dimana dalam sebuah pertempuran penggunaan kekuatan secara penuh (*Offensif*) merupakan keharusan.

Dikorelasikan dengan teori tersebut, pertempuran yang dipimpin oleh Simon Bolivar dan pasukan Royalis yang dipimpin oleh Marshall Lapangan Spanyol, Miguel de la Torre. Kemenangan Bolivar di Carabobo menyebabkan kemerdekaan Venezuela dan pembentukan Republik Gran Columbia membebaskan berbagai wilayah pesisir sungai Cartagena. Termasuk memenangi "Pertempuran Cúcuta" melawan armada gabungan antara Spanyol dan royalis yang jumlahnya lebih besar, dengan *strategi Total War* atau mengerahkan semua kekuatan yang dimiliki dalam melawan pasukan yang lebih besar.



Simon Bolivar

Bagaimana pergerakan Pasukan yang terlibat dalam perang tersebut.

Pada tanggal 19 April 1810 dewan administratif Caracas memimpin gerakan yang sukses untuk menggulingkan Gubernur Spanyol yang dipimpin oleh Jenderal, Vicente Emparán, kemudian sebuah junta (dewan direktur) yang didirikan di Caracas, dan segera provinsi-provinsi Venezuela lainnya mengikutinya.

Gema dari tindakan kemerdekaan ini dapat langsung dirasakan di seluruh Venezuela. Di seluruh Venezuela, kota-kota besar dan kecil memutuskan untuk memihak gerakan yang berbasis di Caracas, hingga memunculkan Gerakan revolusi di hampir semua wilayah di Venezuela. Junta Caracas kemudian menyerukan Kongres provinsi Venezuela untuk mendirikan sebuah pemerintahan untuk daerah, kemudian dipimpin oleh Simon Bolívar (seorang pemimpin kemerdekaan Venezuela) dan kaum republikan lainnya melanjutkan perlawanan di Caracas, dengan mengorganisir gerakan gerilya di pedalaman negara itu.

Pada tahun 1813 Bolívar bergabung dengan tentara yang disebut sebagai New Granada setelah memenangkan serangkaian pertempuran, kemudian Simon Bolívar menerima persetujuan Kongres New Granada untuk memimpin pasukan pembebasan ke wilayah Caracas. Pada saat yang sama, pejuang Venezuela yang lain bernama Santiago Marino menyerbu dari timur laut dalam kampanye yang terorganisir secara independen.

Kedua pasukan dengan cepat mengalahkan pasukan kerajaan Spanyol dalam berbagai pertempuran, seperti Alto de los Godos hingga Simon Bolívar memasuki Caracas pada tanggal 6 Agustus 1813 setelah mengalahkan Spanyol yang kemudian memproklamkan kemerdekaannya.

Taktik perang yang digunakan

Taktik perang yang digunakan oleh Pasukan revolusi Venezuela yang dipimpin oleh Simon Bolívar menggunakan Taktik perang Gerilya seperti Pertempuran Alto de los Godos yang merupakan pertempuran yang terjadi pada tanggal 25 Mei 1813 di Maturin, Venezuela, di wilayah *New Granada* yang menghasilkan kemenangan melawan pasukan Spanyol yang dipimpin oleh Domingi de Monteverde, dimana strategi gerilya cukup efektif mengalahkan Spanyol.

Setelah membuat "*Manifesto Cartagena*", ia melanjutkan misinya dengan memanfaatkan kepaiwaiannya dalam berpidato. Alhasil, kaum patriot, rakyat miskin, dan para budak bersimpati dengannya, hingga semua orang yang bersimpati dan anti terhadap Spanyol

mau dan ikut angkat senjata untuk Venezuela melalui perang Gerilya.

Perang gerilya yang dilakukan oleh Simon Bolívar dilakukan secara sembunyi sembunyi, penuh kecepatan, sabotase dan biasanya dalam kelompok yang kecil tapi sangat fokus dan efektif, kemudian Simon Bolívar menyebarkan propaganda dan melakukan pidato ke wilayah-wilayah yang merupakan kantong-kantong anti Spanyol.

Prinsip dasar dari perang gerilya yang digunakan oleh Bolívar adalah tidak ada pertempuran, konflik bersenjata atau pertempuran kecil yang akan dilaksanakan kecuali yakin akan dimenangkan. Itu artinya kemampuan 'gerakan bawah tanah', tipuan, atau kejutan merupakan elemen mendasar, sebelum dilaksanakannya perang besar-besaran sehingga pihak musuh tidak siap dalam melawan gerilyawan Venezuela.

Dampak yang ditimbulkan akibat perang tersebut

Pasca perang besar-besaran yang terjadi di wilayah Caracas sebagaimana uraian sebelumnya, Tahun-tahun berikutnya peperangan terus terjadi untuk mendapatkan kemerdekaan Venezuela, kekalahan dan kemenangan silih berganti, namun Simon Bolívar sebagai pimpinan Venezuela tetap bertekad untuk merebut kembali tanah airnya, sehingga Pada 1819, Simon Bolívar memimpin tentara dengan peralatan seadanya untuk menyeberangi wilayah Andes, demi menyerang pasukan Spanyol di Kolombia.

Di sana, ia dan pasukannya berhasil memenangkan sebuah pertempuran, yang dikenal dengan *Battle of Boyace*, pada 7 Agustus 1819. Venezuela akhirnya dapat dimerdekakan pada 1821, disusul dengan Ekuador pada 1822, Tiga tahun kemudian, tepatnya pada Juni 1821, Bolívar bersama pasukan Republik akhirnya baru benar-benar mengusir habis pasukan Spanyol di Caracas dan di beberapa daerah kecil di Venezuela. Setelah itu giliran Ekuador yang dibebaskan, kemudian Peru dua tahun berselang.

Cita-cita Bolívar membebaskan seluruh Amerika Selatan dari kolonialisme Spanyol pun perlahan terwujud.

Pasca kekalahan beruntun yang dialami, Spanyol mengirim armada pada tahun 1823 untuk merebut kembali negara itu tetapi dikalahkan di Pertempuran Danau Maracaibo. Pada tahun-tahun berikutnya pasukan Venezuela, sebagai bagian dari tentara Gran Kolombia, terus berkampanye di bawah kepemimpinan Bolívar untuk membebaskan bagian selatan New Granada di wilayah Venezuela dan Ekuador.

Setelah ini tercapai, Bolívar melalui Pidatonya melanjutkan perjuangannya melawan Spanyol sampai ke wilayah Peru dan Bolivia hingga perjuangan meletus di hampir semua jajahan Spanyol di wilayah Amerika Selatan.

Pasca perang yang akhirnya mengakhiri Kolonialisme Spanyol Simon Bolívar menjadi orang yang sangat ambisius untuk membangun sebuah federasi yang terdiri dari negara-negara baru merdeka di Amerika Selatan. Akhirnya terbentuk federasi antara Venezuela, Kolombia, dan Ekuador, diberi nama Republik Kolombia Raya, dengan Simon Bolívar sebagai presidennya. Namun federasi yang dibuatnya tidak berjalan dengan mulus, Venezuela dan Ekuador memisahkan diri dari republik Kolombia Raya dan menjadikan Simon Bolívar sebagai Presiden Venezuela Pertama.

Pelajaran yang dapat diambil

Pelajaran yang dapat diambil oleh pimpinan TNI AD dimasa yang akan datang salah satunya adalah kepemimpinan Simon Bolívar dalam menginspirasi rakyatnya untuk mau dan

mengikuti dirinya dalam melawan penjajahan Spanyol melalui kepiawaiannya dalam berpidato.

Alhasil, kaum patriot, rakyat miskin, dan para budak bersimpati dengannya, hingga semua orang yang bersimpati dan anti terhadap Spanyol mau dan ikut angkat senjata untuk Venezuela melalui perang Gerilya. Hal tersebut merupakan sebuah pelajaran yang dapat diambil oleh pemimpin saat ini dan masa mendatang dalam membangun sebuah kekuatan sistem pertahanan semesta, dimana kondisi saat ini justru dalam konteks Indonesia sendiri sedang terjadi krisis kepemimpinan, mengingat sistem pertahanan Indonesia yang mengacu pada Sistem pertahanan Semesta dengan rakyat sebagai komponen cadangan yang memerlukan motivasi pemimpin dalam menggerakkan masyarakat, bahkan Simon Bolívar bukan saja hanya menginspirasi masyarakat Venezuela dalam merebut kemerdekaan dari Spanyol, tapi hampir semua wilayah di Amerika Selatan yang merdeka pasca revolusi dan perang besar-besaran di wilayah Caracas Venezuela.

Selain kepemimpinan, sebuah pembelajaran perang gerilya yang digunakan oleh Bolívar adalah tidak hanya mengacu pada pertempuran, Bolívar tidak akan mengizinkan pasukannya berperang jika hanya melaksanakan pertempuran kecil, konflik bersenjata atau pertempuran kecil yang akan dilaksanakan kecuali yakin akan dimenangkan. Itu artinya kemampuan 'gerakan bawah tanah', tipuan, atau kejutan merupakan elemen mendasar.



Keterangan



Pertempuran Maracaibo



Pertempuran Carabobo

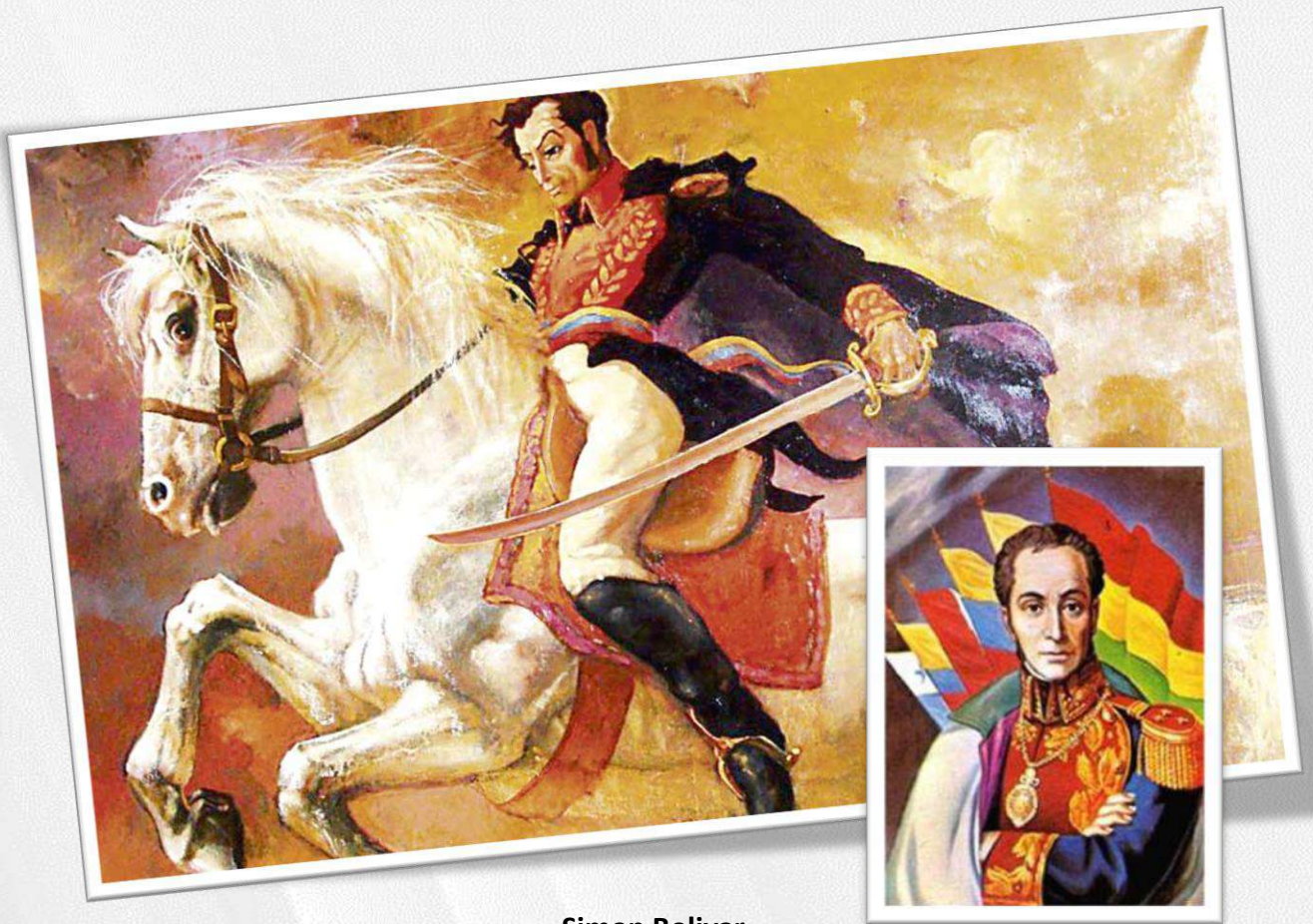


Pertempuran Caracas



Dampak Pertempuran Venezuela

Peta pertempuran di Venezuela



Simon Bolivar

Penutup

Perang Kemerdekaan Venezuela (1810-1823) adalah salah satu perang yang terjadi di benua Amerika yang terjadi antara awal abad kesembilan belas, ketika gerakan kemerdekaan di Amerika Latin berperang melawan pemerintahan kekaisaran Spanyol, Upaya revolusi melawan kekuasaan Spanyol di Venezuela dimulai sejak negeri tersebut ditaklukkan Napoleon pada medio 1800-an. Situasi tersebut lalu dimanfaatkan oleh berbagai negara di Amerika Latin untuk melawan. Sementara di Venezuela, tercatat pada April 1810, mereka secara de facto menyatakan merdeka dan segera mendirikan pemerintahan yang dipimpin oleh Simon Bolivar.

Di seluruh Venezuela, kota-kota besar dan kecil memutuskan untuk memihak gerakan yang berbasis di Caracas, hingga memunculkan Gerakan revolusi di hampir semua wilayah di Venezuela. Junta Caracas kemudian menyerukan Kongres provinsi Venezuela untuk mendirikan sebuah pemerintahan untuk

daerah, kemudian dipimpin oleh Simon Bolívar (seorang pemimpin kemerdekaan Venezuela) dan kaum republikan lainnya melanjutkan perlawanan di Caracas, dengan mengorganisir gerakan gerilya di pedalaman negara tersebut.

Selain kepemimpinan, sebuah pembelajaran perang gerilya yang digunakan oleh Bolivar adalah tidak hanya mengacu pada pertempuran, Bolivar tidak akan mengizinkan pasukanya jika hanya melaksanakan pertempuran kecil, konflik bersenjata atau pertempuran kecil yang akan dilaksanakan kecuali yakin perang akan dimenangkan. Itu artinya kemampuan 'gerakan bawah tanah', tipuan, atau kejutan merupakan elemen mendasar dalam menerapkan strategi gerilya.

Kompol A. Mukti Surya A. S., S.H., S.I.K., M.Si. adalah Abituren Pendidikan Regular LXI SESKOAD TA 2021



TINJAUAN DIPLOMASI PERTAHANAN TERHADAP UPAYA MONAKO MEMISAHKAN DIRI DARI PERANCIS

Mayor Czi Sigit Adi Soebekti, S.T.

Pendahuluan

Perkembangan hubungan internasional diikuti dengan semakin banyaknya dan peliknya isu-isu hukum internasional telah terjadi pada saat belakangan ini. Pemisahan diri suatu wilayah dari sebuah negara adalah salah satu contohnya. Latar belakang terjadinya pemisahan diri suatu wilayah ini adalah keinginan untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak dasar yang harus didapat dan dimiliki oleh setiap individu. Untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan tersebut banyak cara yang dapat dilakukan oleh suatu kelompok maupun masyarakat agar dapat memenuhi hasrat untuk merdeka. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkannya adalah dengan dilaksanakannya sebuah pemungutan suara dan salah satunya adalah melakukan referendum kemerdekaan. Referendum kemerdekaan disini berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya dan ikut turut campur dalam menentukan masa depan bagi wilayahnya sendiri dimana dalam setiap individu memiliki hak memiliki kebebasan berpendapat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.

Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan "*conflict*" atau "*dispute*". Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan "*conflict*" atau "*dispute*".

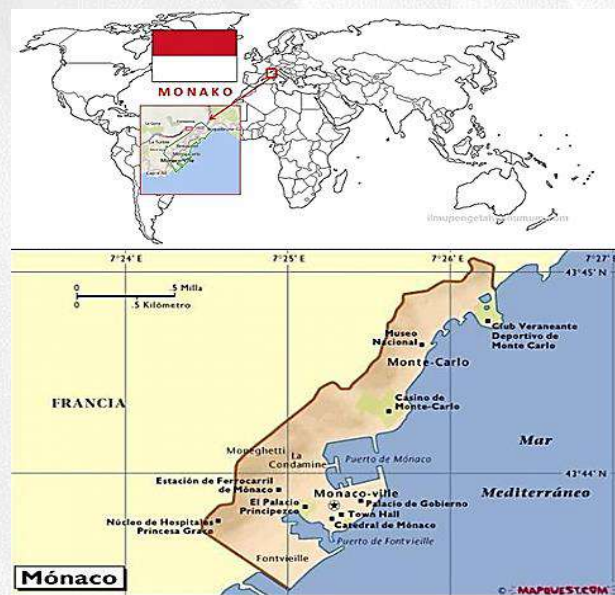
Referendum kemerdekaan merupakan fenomena yang telah banyak terjadi pada saat belakangan ini. Banyak hal yang melatar belakangi mengapa fenomena referendum kemerdekaan dilakukan oleh berbagai kelompok, etnis maupun bangsa dari wilayah satu Negara.

Perasaan tidak terwakilinya kepentingan suatu wilayah maupun kelompok di pemerintahan pusat, kuatnya identitas kebangsaan dan juga terdapatnya perbedaan dari segi ideologi, tradisi maupun budaya menjadi beberapa alasan dari banyaknya alasan mengapa pada saat belakangan ini banyak terjadi fenomena referendum kemerdekaan pada Negara-negara di dunia. Wilayah dari suatu Negara melaksanakan referendum dengan pilihan memisahkan diri dari Negara tersebut dan membentuk Negara baru atau tetap menjadi bagian dari suatu Negara. Referendum menjadi pilihan atau cara bagi wilayah suatu Negara untuk memisahkan diri dari Negara.

Dalam hal melaksanakan referendum kemerdekaan dengan tujuan untuk memisahkan diri, banyak wilayah Negara-negara tersebut melandaskannya pada hak

untuk menentukan nasib sendiri atau *The Right of Self Determination*. Hak menentukan nasib sendiri atau *The Right of Self Determination* adalah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap bangsa untuk dapat menentukan nasibnya sendiri berkaitan dengan penentuan status politik, pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Hal tersebut dialami oleh Monako, dimana pada tahun 2002 Monako yang merupakan salah satu wilayah bagian dari Perancis melaksanakan sebuah referendum kemerdekaan terkait dengan keinginan dari masyarakat Monako yang berkeinginan untuk memisahkan diri dan membentuk negara merdeka. *Referendum* kemerdekaan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Monako pada tanggal 24 Oktober 2002 mendapatkan hasil berupa 90% suara masyarakat Monako setuju untuk wilayahnya memisahkan diri dari Perancis dan kemudian memerdekakan diri serta dibentuknya negara baru yang merdeka sekaligus menetapkan masalah wilayah kedaulatan yang diangkat oleh revisi konstitusi Monako tahun 2002.



Peta Wilayah Negara Monako

Konstitusi Monako tersebut dibentuk oleh pemerintahan Monako merupakan dasar hukum dari pelaksanaan referendum.

Pemerintahan Monako mendasarkan pelaksanaan dari referendum kemerdekaan ini berdasarkan *The Right of Self Determination* (hak menentukan nasib sendiri) hal ini dapat ditemukan sebagaimana tertuang dalam pembukaan konstitusi yang menyatakan

bahwasanya di dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) serta *The International Covenant on Economical, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang telah diratifikasi oleh Perancis dan *The Charter of United Nation* (Piagam PBB) mengakui adanya hak untuk menentukan nasib sendiri atau *The Right of Self Determination*.

Berdasarkan prinsip tersebut maka pemerintahan Monako merasa bahwa Monako adalah wilayah yang dapat memisahkan diri dan membentuk negara baru sejalan dengan pelaksanaan dari haknya sebagai suatu wilayah atau kelompok untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam proses pemisahan diri dari Perancis, Monako tidak serta merta mendapatkan kemudahan, melainkan tetap ada konflik antar kedua negara yang terjadi. Pasalnya Perancis merasa bahwa Monako tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk menyatakan diri sebagai wilayah yang baru dan memisahkan diri dari Perancis.

Maka pentingnya penulisan esai ini adalah untuk mengetahui mekanisme diplomasi pertahanan (*soft power*) yang dilakukan oleh Monako untuk mencapai resolusi konflik antar kedua negara, sehingga pada akhirnya dapat memisahkan diri dan menjadi sebuah negara baru yang berdaulat. Berkaca dari sengketa tersebut pihak-pihak yang bersengketa seharusnya menyelesaikan sengketa melalui jalur damai terlebih dahulu seperti Negosiasi, Jasa- jasa baik dan jalur damai lainnya, jika tidak menemukan jalan keluarnya maka dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur Hukum atau melibatkan pihak ketiga untuk menjadi mediator dalam menjembatani kedua negara untuk menyelesaikan sengketa.

Pentingnya penulisan esai ini adalah untuk mengetahui penyelesaian konflik referendum Monako terhadap Perancis sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut dari perspektif diplomasi pertahanan. Persoalan yang akan dibahas dalam penulisan esai ini adalah sebagai berikut: Pertama, latar belakang terjadinya konflik. Kedua, langkah-langkah strategis diplomasi pertahanan (*soft power*) yang digunakan. Ketiga, solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan negara

tersebut dari perspektif komunikasi persuasif. Keempat, lesson learned yang didapat dari diplomasi pertahanan yang bersigat soft power dari negara tersebut.

Pembahasan

Referendum merupakan cara yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara langsung ikut dalam memutuskan terhadap beberapa isu penting baik referendum tersebut dibuat oleh pemerintahan, kemudian dengan kata lain referendum menyerahkan keputusan terhadap suatu kebijakan atau isu tertentu berdasarkan suara terbanyak yang didapat dari hasil referendum tersebut.

Pelaksanaan referendum kemerdekaan di dalam praktik hubungan internasional telah dianggap sebagai suatu proses demokrasi kemudian referendum dijadikan sarana atau alat bagi masyarakat untuk melegitimasi pilihannya ataupun kehendaknya. Bahwasanya pelaksanaan referendum kemerdekaan yang dilakukan oleh Monako masih menimbulkan kontroversi di dalam ruang lingkup hubungan internasional sehingga pembahasan mengenai isu ini masih menarik untuk diangkat.



Pasukan Militer Negara Monako

Latar Belakang Terjadinya Konflik

Asal-usul sejarah Kerajaan Monako dapat ditelusuri jauh ke masa lalu. Di zaman kuno, batu Monako dan pelabuhan alamnya ditawarkan perlindungan bagi orang-orang primitif. Meskipun Konstitusi berisi konsesi yang signifikan untuk posisi liberal, terutama dalam hal pengakuan hak dan kebebasan, ia mempertahankan keutuhan struktur dasar monarki konstitusional, dengan sentralisasi yang kuat dari kekuasaan di tangan Pangeran.

Pada saat Perancis berubah bentuk pemerintahan, yang awalnya monarki menjadi bentuk pemerintahan republik, hal ini pun berdampak pada Monako, karena wilayah tersebut diberikan status menjadi wilayah otonomi. Krisis *referendum* Monako dimulai pada tahun 1918 yang dilatarbelakangi oleh bantahan Perancis terhadap keberadaan seorang warga negara Jerman yang mewarisi takhta Kerajaan Monako, yaitu Pangeran Albert I. Hal ini menimbulkan sebuah dilema, karena pada saat pewaris takhta Monako tidak memiliki anak yang sah, maka kemungkinan sepupu Jermannya yang Bernama Adipati Urach yang berhasil menempati posisi sebagai pewaris takhta, dimana hal tersebut tidak bisa diterima oleh Perancis. Akibatnya Monako secara sepihak mendeklarasikan bahwa akan memisahkan diri dari Perancis dengan tetap menggunakan bentuk pemerintahan monarki.



Pangeran Albert I

Menanggapi hal tersebut pada 17 Juli 1918 menanggapi deklarasi Monako dengan mengadakan perjanjian. Namun dalam proses perjanjian tersebut Perancis memberikan tekanan kepada Monako untuk meratifikasi ketentuan perjanjian yang akan memperkuat posisi Perancis dalam tatanan monarki, sehingga penentuan pewaris takhta tidak dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki dalam bentuk pemerintahan monarki. Hal ini dilakukan Perancis untuk menutup Monako dari pengaruh Jerman. Keleluasaan otonomi yang dimiliki oleh Kerajaan Monako tidaklah berlangsung lama karena Perancis sempat

mencabut status otonomi wilayah Monako, hal ini pun memaksa Monako untuk sementara menghentikan operasional regionalisme yang ada pada wilayahnya. Dengan adanya kondisi tersebut memberikan tekanan kepada gerakan referendum Monako. Hal ini yang selanjutnya menjadi pemicu bagi masyarakat Monako untuk memisahkan diri dari Perancis.

Perkembangan situasi politik yang ada di Catalunya mengakibatkan pemerintah Monako untuk melakukan perubahan terhadap Konstitusi Monako dengan tujuan untuk memperluas kekuasaan ataupun status otonomi yang dimiliki oleh Monako. Di dalam perubahan tersebut disebutkan bahwa Catalunya adalah sebuah “bangsa” yang memiliki sistem pemerintahan monarki. Pernyataan Monako sebagai sebuah bangsa menimbulkan kontroversi dimana akhirnya Mahkamah Konstitusi Perancis mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang sah untuk menyebut Monako sebagai sebuah bangsa.

Putusan tersebut menimbulkan protes secara besar-besaran dilakukan oleh masyarakat Monako. Masyarakat Monako turun ke jalan untuk memprotes atas keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Perancis dan jadi momen awal bagi masyarakat Monako untuk menuntut pemisahan diri dari Perancis.

Masyarakat Monako secara terus menerus melakukan protes. Protes yang dilakukan adalah bertujuan untuk menuntut Monako memerdekakan diri dari Perancis. Krisis antara Prancis dan Monako berakhir sementara pada tahun 1963. Kompromi pada dasarnya masih berlaku (revisi substansial terakhir adalah pada tahun 2003 dengan perjanjian pajak bilateral yang baru). Penduduk Prancis Monako tidak lagi mendapat manfaat dari pengecualian: mereka harus membayar pajak penghasilan mereka ke Prancis. Ini tidak sepele, meskipun terus menurun, populasi Prancis di Monako masih melebihi jumlah warga *Monégasque*.

Langkah-Langkah strategis diplomasi pertahanan (soft power) yang digunakan

Usaha-usaha provinsi dan wilayah untuk berpisah dari negara induknya, adalah model khusus dari konflik perbatasan.

Bukan batas dari dua negara, tetapi usaha dari bagian negara itu sendiri untuk membuat perbaikan sendiri sebagai negara baru. Sebagian besar pemisahan diri ini terjadi hampir di seluruh dunia, dengan kadar keefektifan politis yang berbeda-beda, tetapi hanya sebagian kecil saja dari mereka yang sukses untuk berpisah. Negara induk hampir mencoba untuk menahan wilayah tersebut tetap menjadi bagiannya.

Kekacauan permasalahan perbatasan telah tercipta dalam beberapa kasus terbaru, di mana negara multinasional pecah menjadi beberapa bagian. Dalam beberapa kasus, perbatasan yang tadinya internal menjadi batas internasional, dan sejak perbatasan baru tersebut, mereka akan lebih peka terhadap tantangan. Pecahnya suatu negara seharusnya tidak mendorong ke arah kekerasan. Monarko terpisah dari Perancis dan memutuskan untuk menjadi negara yang berdaulat, berdiri sendiri dalam suasana yang tidak terlalu baik, karena ada beberapa konflik yang diakibatkan oleh keputusan tersebut.

Berkaitan dengan konflik yang mengakibatkan perpecahan antara Monako dengan Perancis, komunitas internasional dan organisasi kawasan hadir untuk menawarkan alternatif dalam menyelesaikan konflik tanpa kekerasan dan perpecahan. Namun demikian Monako sendiri dalam mengupayakan pemisahan wilayah dengan Perancis secara damai bekerja memperkuat jaringan masyarakat sipil untuk perdamaian dan keamanan dengan melakukan tindakan di tingkat lokal, nasional dan global, serta terlibat secara efektif bersama PBB. Monako menggunakan langkah strategis diplomasi bilateral untuk membangun dialog dengan Perancis secara berimbang serta menawarkan kerangka kerja yang bersifat netral secara politik. Selain itu dalam konteks politik saat ini, Langkah strategis yang dilakukan mempertimbangkan hubungan antara kedua negara yang sedang terganggu, jalur diplomasi dapat berfungsi sebagai link yang sangat penting. Dialog antara para ahli dari kedua belah pihak akan membantu untuk menganalisis dan menilai akar permasalahan dari krisis yang sedang berlangsung. Kemungkinan solusi dan rekomendasi yang

diuraikan oleh komunitas ahli kemudian harus diserahkan kepada badan-badan negara bagian dan organisasi internasional. Forum dialog ini di satu sisi dapat membantu dalam hal pengambilan keputusan atau solusi berdasarkan temuan-temuan yang ada, dan di sisi lain dapat berkontribusi untuk membangun kepercayaan dan interaksi antara masyarakat.

Sejak saat itu langkah strategis yang disepakati pada dialog putaran kedua kemudian dikembangkan menjadi prospek hubungan bilateral yang saling mendukung. Pasca pemisahan Monako dengan Perancis, dan menjadi negara kerajaan Monako, hubungan kedua negara terbilang ternormalisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari relasi diplomatik yang terjalin untuk mempermudah penduduknya dalam memperoleh kewarganegaraan.

Walau sempat diisi dengan kekisruhan, namun dapat dikatakan diplomasi pertahanan melalui cara-cara bilateral dan juga melibatkan jaringan masyarakat yang dilakukan oleh Monako berhasil untuk membuah proses referendum berjalan dengan baik.

Solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan negara tersebut dari perspektif komunikasi persuasif

Jika dipandang menggunakan perspektif komunikasi persuasive, maka apa yang terjadi pada proses pemisahan Monako dari Perancis memiliki faktor penyebab perkembangan isu pemisahan menjadi konflik, yang salah satunya adalah bentuk pemerintahan. Di dalam konflik ini terdapat unsur-unsur sensitif dalam interaksi sosial politik biasanya menjadi penyebab utama dalam konflik. Maka pendekatan yang perlu digunakan adalah menciptakan kompromi.

Kompromi memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan yang memiliki nilai lebih besar. Ini menunjukkan bahwa kompromi mungkin berbeda nilai untuk masing-masing pihak.

Cara untuk menerapkan pendekatan tersebut dalam menyelesaikan konflik ini adalah meningkatkan peran diplomasi masing-masing negara untuk membangun rasa percaya atau CBM (Confidence Building Measures) antar kedua negara. CBM memiliki pengaruh yang cukup penting bagi kedua negara yang rentan akan konflik.

Dalam hal penyelesaian konflik pemisahan diri Monako dari Perancis diselesaikan melalui mekanisme seperti penyelesaian sengketa dengan cara damai pada umumnya, dengan mengadakan dialog-dialog bilateral dengan harapan dapat mampu menjembatani kepentingan kedua negara untuk memisahkan diri. Berdasarkan perspektif komunikasi persuasif, dapat dianalisa bahwa dalam konflik yang terjadi antara kedua belah pihak masih dapat menemukan resolusi konflik walaupun diselesaikan dalam format track one diplomacy atau diplomasi yang dilakukan secara konvensional oleh masing-masing negara yang berkonflik dengan menjunjung tinggi cara-cara damai. Dalam perspektif komunikasi persuasif, penyelesaian kasus ini menggunakan pendekatan kompromi.

Kompromi pada kasus ini tidak menggunakan negosiator dari pihak ketiga, melainkan peran masing-masing negara, secara khusus Monako yang mengupayakan pemisahan dengan Perancis berlangsung dengan dinamis, walau demikian pada akhirnya tetap berakhir dengan damai, sehingga kedua belah pihak dapat tetap menjalin hubungan diplomasi yang baik untuk keuntungan kedua belah pihak. Penggunaan pendekatan kompromi dapat diterima sebagai strategi untuk menyelesaikan suatu konflik pemisahan teritorial agar tidak ada pihak yang dirugikan, melainkan resolusi konflik yang dicapai bersifat *win-win solution*.

Lesson learned yang didapat dari diplomasi pertahanan yang bersifat soft power dari negara tersebut

Pada bagian ini penulis akan menggunakan metode SWOT untuk menemukan lesson learned yang didapat dari konflik Monako dan Perancis. Kekuatan yang dimiliki oleh Monako dalam keterlibatannya pada konflik ini adalah letak geopolitik dan struktur pemerintahan yang sudah melekat dengan masyarakat, sehingga memudahkan Monako untuk mengakui wilayah yang menjadi bagian dari kedaulatan nasionalnya. Kelemahan yang dimiliki oleh Monako dalam keterlibatannya pada konflik ini adalah tidak mampu mempertahankan kepentingan nasionalnya secara khusus dalam mempertahankan teritorial dengan utuh, karena ada yang harus di bagi dengan Perancis, disisilain Monako sendiri kekuatan nasionalnya tidak sebanding dengan Perancis.

Peluang yang dimiliki Monako dalam menyelesaikan konflik ini adalah itikad baik dari kedua negara untuk menyelesaikan konflik ini menggunakan langkah-langkah diplomasi damai dan dukungan dari masyarakat terhadap pemisahan kedua negara tersebut menjadi masing-masing negara yang berdaulat. Sedangkan kendala yang dialami Monako dalam konflik ini adalah mengalami pembagian wilayah, pembagian harta kekayaan negara, pembagian arsip penting yang dimiliki oleh negara, penetapan status mata uang, dan penetapan kewarganegaraan penduduk yang tentu menjadi proses yang rumit.

Berdasarkan analisa SWOT tersebut, maka Monako menggunakan strategi melalui langkah negosiasi cara damai yang melibatkan organisasi kawasan dan internasional. Merupakan kewajiban Monako dalam menyelesaikan suatu sengketa melalui Jalur Damai terlebih dahulu ini bertujuan untuk menjaga dan menahan diri dari suatu tindakan-tindakan yang dimana tindakan tersebut dapat memperburuk situasi dari kedua belah pihak. Penyelesaian konflik pemisahan Monako dengan Perancis ini dilakukan dengan menggunakan proses negosiasi dan mediasi. Dalam proses pemisahan tersebut, Monako mengambil langkah strategis melalui jalur negosiasi yaitu dengan mengadakan serangkaian kerjasama diplomasi ekonomi. Hal ini ditujukan untuk menambah dukungan negara-negara internasional untuk Monako atas kedaulatannya.

Melalui analisa SWOT tersebut maka *lesson learned* yang dapat diambil oleh Indonesia melalui upaya diplomasi pertahanan (*soft power*) Monako dalam menyelesaikan konflik pemisahan dengan Perancis adalah melakukan Langkah pemeliharaan terhadap wilayah perbatasan untuk menunjukkan kepada komunitas internasional akan komitmen negara dalam mempertahankan wilayah perbatasan. Selain itu diperhadapkan dengan permasalahan perbatasan yang rentan terjadi di Indonesia, maka pemerintah Indonesia juga perlu melakukan pencarian fakta yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan.

Fakta-fakta yang didapat mengenai kepemilikan atau fakta yang terjadi dilapangan kemudian disampaikan kepada publik internasional. Selanjutnya adalah mengupayakan langkah diplomasi atau negosiasi secara damai dengan negara terkait agar konflik bisa diselesaikan secara bilateral dan damai tanpa merusak

hubungan diplomatik antara negara-negara yang bertikai.

Penutup

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dijelaskan bahwa keputusan mengenai pemisahan Monako dari Perancis dipengaruhi oleh kepentingan nasional dari masing-masing negara yang beroperasi dengan dorongan pihak ketiga sebagai perantara. Hal ini merupakan salah satu fenomena yang menarik karena pasca pemisahan tersebut terjadi, hubungan diplomatik diantara kedua negara terjalin dengan baik, terbukti melalui berbagai bentuk kerjasama bilateral yang dilakukan. Bahkan pada saat melalui proses pemisahan wilayah, kedua negara tersebut tidak menunjukkan indikasi proses yang destruktif, melainkan mengutamakan langkah-langkah diplomasi secara damai.

Merujuk pada perspektif komunikasi *persuasive*, maka pendekatan yang digunakan pada penyelesaian konflik ini adalah pendekatan kompromi, dimana kedua negara melakukan negosiasi dengan cara damai dengan tetap mengutamakan tercapainya kepentingan nasional masing-masing negara.

Lesson learned yang didapat oleh Indonesia melalui konflik ini adalah agar permasalahan perbatasan yang dialami membuat Indonesia menjadikan pemeliharaan dan pertahanan di wilayah perbatasan sebagai prioritas untuk menunjukkan citra positif kepada komunitas internasional. Selain itu Indonesia juga harus memiliki bukti data dan fakta yang kuat untuk membuktikan kepemilikan Indonesia terhadap wilayah tersebut.

Demikian essay ini dibuat sebagai bentuk analisa penulis terhadap studi kasus yang diberikan. Melalui esai ini penulis menyadari bahwa diplomasi dan negosiasi menjadi instrumen penting yang menggambarkan hubungan satu negara dengan negara lain, dan sangat menentukan hasil akhir dari hubungan yang dilakukan antar negara.

Mayor Czi Sigit Adi Soebekti, S.T. adalah
Abituren Abituren Pendidikan Regular LXI
SESKOAD TA 2021



**"JAGALAH
NAMAMU,
JANGAN SAMPAI
DISEBUT
PENGKHIANAT
BANGSA."**

JENDERAL GATOT SUBROTO (1907-1962)
PAHLAWAN NASIONAL





**“Dengan buku aku bebas”
- BUNG HATTA -**



SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani

ISSN 2086-9312



9772086931295